

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
TENTANG “RETRIBUSI PELAYANAN KELAS III PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE”**

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

2 0 1 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Status kesehatan masyarakat dicapai melalui pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu, pembangunan kesehatan yang dilaksanakan memiliki sasaran untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan.

Bentuk pelaksanaan pembangunan kesehatan telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang selanjutnya disingkat UU Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Salah satu bentuk pembangunan kesehatan adalah melalui upaya kesehatan yang merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak mendapatkan

pelayanan kesehatan. Dengan dicantumkannya hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia, maka Pemerintah sebagai penyelenggara Negara memiliki tanggungjawab terhadap pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan. Tanggungjawab pemerintah ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) UU Kesehatan menyatakan bahwa

- Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara terutama pemerintah,
- Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan melalui berbagai tindak pemerintahan, antara lain menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan membentuk produk hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pemerintah Kota Surabaya dalam pelayanan kesehatan telah melakukan tindakan hukum dan tindakan non hukum. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya membentuk, antara lain :

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perizinan Kesehatan di Kota Surabaya;
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD dr. Mohammad Soewandhie; dan
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Upaya Kesehatan;

Sedangkan tindakan non hukum dalam pelayanan kesehatan, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan :

1. Pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Milik Daerah (RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan RSUD Bakti Dharma Husada) dan 63 Puskesmas milik Daerah.
2. Pelayanan Imunisasi bagi warga Surabaya;
3. Penyediaan Ambulans untuk menjemput Ibu yang akan melahirkan atau pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan;
4. Penyediaan *Command Center* yang siap melakukan pertolongan bagi masyarakat yang mengalami kondisi darurat termasuk pertolongan kesehatan;
5. Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat;
6. Pengawasan dan pemeriksaan Makanan olahan dan siap saji; dan
7. Peningkatan Akreditasi Puskesmas.

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan berupa Rumah Sakit Umum dan Puskesmas, dimana sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PP Fasyankes dicantumkan bahwa yang

dimaksud dengan Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pada kenyataannya pembiayaan fasilitas pelayanan kesehatan belum sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah atau pemerintah daerah, sehingga masyarakat yang mempergunakan fasilitas pelayanan kesehatan wajib membayar biaya pengobatan, baik dalam bentuk retribusi atau penyebutan lainnya. Kebijakan Pembangunan Kesehatan di Kota Surabaya didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Upaya Kesehatan, dimana peraturan daerah ini menjadi dasar hukum bagi fasilitas pelayanan kesehatan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya maupun diselenggarakan oleh masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang berupa pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota Surabaya. Rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie dan Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Dharma Husada. Pengaturan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie, dimana dalam perda tersebut diatur tentang jenis dan retribusi pelayanan kesehatan.

Sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, maka RSUD dr. Mohamad Soewandhie mengalami perkembangan dalam memberikan pelayanan kesehatan, baik jenis dan jumlahnya dengan ditunjang peralatan dan teknologi yang mutakhir. Penambahan dan peningkatan pelayanan kesehatan membawa konsekwensi dalam biaya operasional rumah sakit, dimana pembiayaan tidak hanya didasarkan pada APBD Kota Surabaya tetapi juga dapat menggunakan dana masyarakat melalui retribusi yang harus dibayar oleh orang atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III di RSUD dr. Mohamad Soewandhie, disusun berdasarkan identifikasi atas masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kewenangan pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan penarikan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD dr. Mohamad Soewandhie milik pemerintah Kota Surabaya yang telah jadi badan layanan umum daerah?
- b. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis mengenai perubahan retribusi pelayanan kesehatan dalam memenuhi hak rakyat atas pelayanan kesehatan?
- c. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III di RSUD dr. Mohamad Soewandhie?

1.3. Tujuan dan Kegunaan yang Ingin Dicapai

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan naskah akademik ini adalah untuk :

- a. Memberikan penjelasan secara teoritik ilmiah tentang disusunnya rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III di RSUD dr. Mohammad Soewandhie.
- b. Menjelaskan landasan hukum yang mendasari penyusunan rancangan peraturan daerah Kota Surabaya tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III di RSUD dr. Mohammad Soewandhie.
- c. Menjelaskan hal-hal penting yang diatur di dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III di RSUD dr. Mohammad Soewandhie.
- d. Memberikan kepastian hukum bagi pengelola RSUD dr. Mohammad Soewandhie dalam menarik retribusi pelayanan kesehatan agar pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dr. Mohammad Soewandhie dapat optimal.

Kegunaan dari penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan draft rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III di RSUD dr. Mohammad Soewandhie.

1.4. Metode

Jenis kajian terhadap penyusunan naskah akademik rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III di RSUD dr. Mohammad Soewandhie merupakan kajian hukum dengan pendekatan kajian atas peraturan perundang-undangan (*statute approach*),

pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan historis (*historical approach*) atas kebijakan pemungutan retribusi, khususnya retribusi pelayanan kesehatan. Dalam mendukung kajian hukum tersebut, bahan-bahan hukum sekunder diperlukan seperti data-data mengenai jenis pelayanan kesehatan dan pembiayaan di RSUD dr. Mohammad Soewandhie melalui wawancara dengan *stakeholder* yang relevan, yaitu Pengelola RSUD dr. Mohammad Soewandhie, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum dan Dewan Pengawas RSUD dr. Mohammad Soewandhie, sehingga metode ini didukung dengan observasi, dokumentasi dan wawancara (melalui diskusi). Dengan kata lain, data primer dalam kajian hukum adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder adalah berupa hasil kajian, data, hasil diskusi/wawancara dengan *stakeholder* yang relevan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama kajian adalah sebagai berikut :

- a. Kajian literatur dan perundang undangan. Dalam tahapan ini dilakukan pengumpulan literatur dan dokumen perundang-undangan yang relevan dengan kajian ini.
- b. Pembuatan instrumen analisis (*Content Analysis*). Instrumen analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis tentang isi perundang-undangan dan literatur yang terkait untuk mengetahui sejauh mana konsistensi antara amanat perundang-undangan yang lebih tinggi dengan perda yang dibuat.
- c. Pengumpulan data (Data Primer dan Sekunder). Data primer diperoleh dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait sebagai pembuat peraturan daerah pada lokasi penelitian;
- d. metode lain yang digunakan adalah melalui diskusi kelompok terarah (FGD) pada daerah penelitian. Data sekunder yang dibutuhkan dalam kajian ini terkait dengan undang-undang dan peraturan lain yang dianggap relevan.

e. Pengolahan dan analisis data. Data yang telah dikumpulkan diolah sesuai kebutuhan kajian. Analisis yang akan dilakukan adalah analisis kualitatif yang menggunakan pedoman utama berupa produk hukum perundang undangan yang terkait dan berlaku. Isi produk hukum tersebut diperbandingkan satu dengan lainnya untuk mendapatkan kesesuaian atau konsistensinya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Kajian teoritis dalam konteks ini dibagi dalam dua hal, yaitu aspek pemungutan retribusi sebagai pembiayaan terhadap pelayanan kesehatan dan kajian kewenangan pemerintah kota dalam mengatur pemungutan retribusi kesehatan pada rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

A. Pemungutan Retribusi Kesehatan Sebagai Pembiayaan Pelayanan Kesehatan

Di dalam setiap konstitusi atau Undang-Undang Dasar, peran negara yang utama adalah mewujudkan cita-cita bangsa itu sendiri, dan cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi Negara Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah diamandemen, memiliki semangat yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia serta membentuk negara kesejahteraan.

Konsep negara kesejahteraan menurut Bagir Manan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memikul tanggung jawab utama untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Sejalan dengan pendapat Bagir Manan, menurut Sjahran Basah, berkaitan dengan negara kesejahteraan tersebut, maka tujuan pemerintah tidak semata-mata di bidang pemerintahan saja, melainkan harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional.²

¹ Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Fakultas Hukum UNILA, Lampung, 1996, hlm. 16.

² Sjahran Basah, *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 3.

Negara Indonesia menunjukkan keinginan untuk membentuk negara kesejahteraan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: "Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".³

Dalam mencapai tujuan yang diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka dilakukanlah pembangunan nasional di dalam segala bidang kehidupan baik fisik maupun pembangunan non fisik. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Pasal 1 UUD 1945 menetapkan bahwa : "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik".

Di dalam mencapai tujuan tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan negara membagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat UU Pemerintahan Daerah, merupakan momentum yang sangat baik untuk melaksanakan otonomi daerah. Berdasarkan menurut

³ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 2

Pasal 1 angka 6 UU Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan otonomi daerah yaitu : “Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai negara kesatuan Republik Indonesia”.

Lebih lanjut Pasal 1 angka 1 UU Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa daerah otonom yaitu :

“Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah mencantumkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pelaksanaan otonomi daerah berkaitan dengan pelaksanaan urusan konkuren, hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) yang mencantumkan bahwa urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota adalah urusan konkuren. Dalam Pasal 12 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah mencantumkan bahwa kesehatan merupakan salah satu dari melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Konsekuensi Pasal 12 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah ini memberikan kewajiban kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan kesehatan. Berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pembangunan kesehatan meliputi: upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen dan informasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Upaya kesehatan merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat, sehingga penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan melalui pelayanan kesehatan, baik melalui upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan upaya kesehatan kegawatdaruratan dan bencana.

Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan kesehatan. Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah membawa konsekuensi penyerahan sebagian sumber-sumber keuangannya. Hal ini dilakukan guna menjamin kelancaran penyelenggaraan urusan tersebut, sehingga akan terjadi suatu keseimbangan antara urusan yang dibebankan serta sumber-sumber keuangan untuk pembiayaannya. Keadaan inilah yang kemudian menimbulkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Berdasarkan Pasal 279 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah dicantumkan bahwa Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah. Sedangkan Pasal 279 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah mencantumkan bahwa hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah meliputi:

- a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
- d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 UU Pemerintah Daerah bersumber dari : Pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Rincian sumber pendapatan tersebut sesuai dengan Pasal 285 UU Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 - 1. pajak daerah;
 - 2. retribusi daerah;
 - 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer meliputi:
 - 1. Dana perimbangan;
 - 2. Dana otonomi khusus;
 - 3. Dana keistimewaan; dan
 - 4. Dana desa
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah meliputi:
 - 1. pendapatan bagi hasil; dan
 - 2. bantuan keuangan.

Secara sosiologis, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan ganda. Pertama, pemberian otonomi daerah merupakan strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu *sharing of power*, *distribution of income*, dan kemandirian sistem manajemen di daerah. Kedua, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat

perekonomian daerah dalam rangka memperkuat perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 ini, maka pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan tindak pemerintahan yang dapat dilakukan untuk pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dapat berupa :

- a. Pembentukan peraturan perundang-undangan, misalnya menyusun Peraturan Daerah;
- b. Penerbitan keputusan, misalnya menerbitkan Izin;
- c. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum; dan/atau
- d. Melakukan tindakan materiil, berupa berbagai kebijakan untuk pemenuhan hak tersebut.

Sesuai dengan ruang lingkup pelayanan public sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat UU Pelayanan Publik, maka pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggaran fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan UU Kesehatan dan PP Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggaran fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Dengan demikian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus didasarkan pada asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Pelayanan Publik, yaitu :

⁴ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002.

- a. Kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Dengan demikian untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, masyarakat membayar sejumlah uang sebagai bentuk pembiayaan pelayanan kesehatan. Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf a UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicantumkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah.

B. Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya Menetapkan Tarif Rumah Sakit Yang Bersatus Sebagai Badan Layanan Umum Daerah

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah, bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga Pemerintah Kota Surabaya sebagai pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, yang salah satunya menyediakan rumah sakit dan puskesmas di setiap kecamatan. Sesuai dengan Pasal 4 UU Rumah Sakit, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan

secara paripurna, sehingga dalam menjalankan tugasnya rumah sakit mempunyai fungsi: pelayanan pemeliharaan, pengobatan, pemulihan dan peningkatan kesehatan.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, pembiayaan rumah sakit bersumber dari penerimaan rumah sakit, anggaran pemerintah, subsidi pemerintah, anggaran pemerintah daerah, subsidi pemerintah daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah yang menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menarik biaya pelayanan kesehatan meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Pasal 110 ayat (1) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), mencantumkan bahwa pemerintah daerah sebagai penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas berwenang menarik retribusi pelayanan kesehatan. Pasal 111 PDRD mencantumkan objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Yang dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Berdasarkan Pasal 48 UU Rumah Sakit, dicantumkan bahwa pembiayaan rumah sakit dapat bersumber dari penerimaan rumah sakit, anggaran pemerintah, subsidi pemerintah, anggaran pemerintah daerah, subsidi pemerintah daerah atau

sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan besaran tarif rumah sakit harus berdasarkan pola tarif nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, dimana pola tarif nasional berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan dan dengan memperhatikan kondisi regional.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit

Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa. Berdasarkan Pasal 2 Permenkes Pola Tarif Nasional Rumah Sakit mencantumkan bahwa tarif rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ditetapkan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya, namun harus mengikuti ketentuan Menteri Kesehatan atau pemerintahan daerah paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

Dalam melakukan pelayanan kesehatan di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 2 rumah Sakit dan 63 Pskesmas. 2 Rumah sakit milik Kota Surabaya tersebut, adalah Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie dan Rumah sakit Bakti Dharma Husada. RSUD dr. Mohamad Soewandhie sebagai rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya telah melewati banyak perkembangan, sehingga saat ini mampu menjadi rumah sakit pilihan masyarakat Kota Surabaya, terutama untuk mendukung Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Tahun 2002 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2002 status RSUD dr. Mohamad Soewandhie menjadi Badan

Pengelola Rumah Sakit Daerah dr. Mohamad Soewandhie, dimana berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI Nomor: 371/MENKES/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya yang sebelumnya adalah Rumah Sakit Umum Daerah dengan klasifikasi kelas C berubah menjadi Rumah Sakit Umum kelas B. Selain itu juga memperoleh status Badan Layanan Umum pada tanggal 23 Juli 2009 melalui SK Walikota No. 188.45/251/436.1.2/2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.

Sesuai dengan kriteria BLUD pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie, maka berdasarkan PP Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit, Tarif Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah untuk kelas III ditetapkan oleh pemerintahan daerah melalui peraturan daerah, sedangkan tarif kegiatan pelayanan selain kelas III dan kelas II dan kegiatan non pelayanan ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit.

C. Asas-asas / Prinsip Penyusunan Norma

Asas-asas yang dipakai dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah :

1. Asas tujuan yang jelas.

Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah mengkaji dan meneliti secara akademik pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya yang dilanjutkan dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Retribusi Pelayanan Kelas III

Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie.

2. Asas lembaga yang tepat.

Dalam penyusunan naskah akademik ini melibatkan RSUD dr. Mohamad Soewandhie, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum, Bagian Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya dan lain-lain serta dalam sosialisasi rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Retribusi Pelayanan Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie melibatkan *stake holder*.

3. Asas perlunya pengaturan.

Penyusunan naskah akademik ini sebagai implementasi atau amanah dari peraturan-peraturan di atasnya yaitu : UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU tentang Kesehatan; UU tentang Rumah Sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit.

4. Asas dapat dilaksanakan.

Penyusunan naskah akademik yang nantinya dilanjutkan menjadi rancangan peraturan daerah kemudian menjadi peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Asas konsensus atau asas keseimbangan.

Dalam penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kesehatan kelas III RSUD dr. Mohamad Soewandhie ini melalui kajian literatur, penelitian lapangan, sosialisasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan, uji publik sesuai dengan *framework* penyusunan peraturan perundangan daerah.

6. Asas terminologi dan sistematika yang benar.

Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kesehatan kelas III RSUD dr. Mohamad Soewandhie ini memakai terminologi yang operasional berdasarkan kajian ekonomi, literatur dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Asas mudah dikenali atau dapat dimengerti.

Meskipun naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kesehatan kelas III RSUD dr. Mohamad Soewandhie merupakan persoalan teknis penghitungan biaya (cost) pelayanan kesehatan oleh rumah sakit, namun dalam penyusunannya telah diupayakan memakai istilah, terminologi dan bahasa legal yang dapat dimengerti oleh masyarakat nantinya.

8. Asas perlakuan yang sama dalam hukum.

Naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kesehatan kelas III RSUD dr. Mohamad Soewandhie ini nantinya akan berlaku bagi seluruh masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan di RSUD dr. Mohamad Soewandhie, tidak diskriminatif atau bermaksud mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan tertentu atau mendiskreditkan kelompok tertentu. Oleh karena itu dalam rancangan peraturan daerah ini juga diatur tentang peran serta masyarakat dan swasta.

9. Asas kepastian hukum dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.

Naskah akademik raperda tentang retribusi pelayanan kesehatan kelas III RSUD dr. Mohamad Soewandhie ini diharapkan sampai pada Peraturan Daerah yang disahkan dan diundangkan pada lembaran daerah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Mohamad

Soewandhie, serta dengan evaluasi pelaksanaan secara berkala.

D. Praktik Pelayanan Kesehatan Di RSUD dr. Mohamad Soewandhie

RSUD Dr. Mohamad Soewandhie merupakan salah satu rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya yang bertugas untuk melakukan pelayanan kesehatan secara paripurna, sehingga RSUD dr. Mohamad Soewandhie memiliki fungsi untuk melakukan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative. RSUD dr. Mohamad Soewandhie berawal dari pelayanan kesehatan di Kecamatan Tambaksari yang dikenal dengan nama Poli Penyakit Kelamin Tambakrejo kemudian Tahun 1966 diubah menjadi Puskesmas Kecamatan Tambaksari. Tahun 1997 melalui Surat Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 61 Tahun 1997, Puskesmas Tambakrejo menjadi puskesmas rujukan, dimana pengelolaan keuangan ditetapkan melalui SK Walikotamadya Nomor : 04 Tahun 1998 Tentang Cara Pengelolaan Keuangan sebagai Unit Swadana Daerah Puskesmas Rujukan Tambakrejo. Pada tanggal 14 November 1997 melalui Surat Permohonan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 645.3/3590/4025.02/1997 diajukan Izin Pendirian Puskesmas Tambakrejo menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Tambakrejo.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor : 188.4/4094/115.4/1998 tanggal 12 Mei 1998 tentang Izin Pendirian berdiri Rumah Sakit Umum Daerah Tambakrejo Kotamadya Surabaya yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 94 Tahun 1998 tanggal 23 November 1998 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tambakrejo Kotamadya Surabaya. RSUD Tambakrejo merupakan rumah sakit Type C sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/3022/SJ tanggal 13 Desember 1999 Rumah Sakit Tambakrejo menjadi Rumah Sakit type C. Pada Tahun 2002 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 status RSUD Tambakrejo menjadi Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah dr. Mohamad Soewandhie dan berkedudukan sebagai lembaga teknis Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005.

Pada Tahun 2009 berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI Nomor : 371/MENKES/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya menjadi Rumah Sakit Umum kelas B dan memperoleh status Badan Layanan Umum pada tanggal 23 Juli 2009 melalui SK Walikota No. 188.45/251/436.1.2/2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya, dimana pada Tahun 2015 RSUD Dr. Soewandhie mendapatkan Sertifikasi sebagai Rumah Sakit Pendidikan (*Teaching Hospital*) yaitu Rumah Sakit yang berhubungan erat dengan Pendidikan Kedokteran dan berfungsi dalam pendidikan praktik untuk mahasiswa kedokteran, *Internship* dan residen atau peserta pendidikan spesialis.

Dengan ditetapkannya RSUD dr. Mohamad Soewandhie sebagai BLUD, maka pengelolaan penerimaan RSUD dr. Mohammad Soewandhie didasarkan pada pengelolaan keuangan BLUD, di mana tarif pelayanan kesehatan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan

Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie, pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Dokter Mohamad Soewandhie terdiri atas:

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Rawat Inap;
- c. Pelayanan Tindakan Medik;
- d. Pelayanan Persalinan/Kebidanan Rawat Inap;
- e. Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut;
- f. Pelayanan Ambulance;
- g. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- h. Pelayanan Konsultasi Khusus dan/atau Tindakan Khusus;
- i. Pelayanan Jenazah; dan
- j. Pelayanan Penunjang Diagnostik.

Bahwa atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum dr. Mohamad Soewandhie dikenakan retribusi sebagai berikut:

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE**

A. RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Rawat jalan umum	6,000	4,000	10,000
2	Rawat jalan spesialis	9,000	6,000	15,000
3	Rawat darurat	10,500	7,000	17,500
4	Konsultasi antar poliklinik/dokter spesialis (jam kerja)	0	10,000	10,000
5	Konsultasi dokter spesialis (di luar jam kerja)	0	15,000	15,000
6	Rawat jalan eksekutif	45,000	30,000	75,000
7	Observasi di Ruang IRD (< 6 jam / Perhari)	45,000	30,000	75,000

B. RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT INAP

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Akomodasi Kelas III	24,000	16,000	40,000
2	Akomodasi Kelas III Rawat Gabung Bayi	12,000	8,000	20,000
3	Konsul spesialis di ruangan Kls III	0	15,000	15,000
4	Konsul spesialis diluar jam kerja di ruangan Kls III	0	22,500	22,500
5	Akomodasi Kelas II	48,000	32,000	80,000
6	Akomodasi Kelas II Rawat Gabung Bayi	24,000	16,000	40,000
7	Akomodasi Kelas I	90,000	60,000	150,000
8	Akomodasi Kelas I Rawat Gabung Bayi	45,000	30,000	75,000
9	Konsul spesialis di ruangan Kls II & I	0	25,000	25,000
10	Konsul spesialis diluar jam kerja di ruangan Kls II & I	0	37,500	37,500
11	Akomodasi Kelas UTAMA	240,000	160,000	400,000
12	Akomodasi Kelas UTAMA Rawat Gabung Bayi	120,000	80,000	200,000
13	Konsul spesialis di ruangan UTAMA	0	35,000	35,000
14	Konsul spesialis diluar jam kerja di ruangan Kls UTAMA	0	52,500	52,500
15	ICU/ICCU	180,000	120,000	300,000
16	NICU	180,000	120,000	300,000
17	Konsul spesialis di ruang ICU dan NICU	0	50,000	50,000
18	Konsul spesialis diluar jam dinas di ruang ICU dan NICU	0	75,000	75,000

C. RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

TINDAKAN MEDIK OPERATIF

TINDAKAN	KELAS I				KELAS II				KELAS III						
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Operator	Jasa Medik Sp. Anestesi	TARIF (Rp)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Operator	Jasa Medik Sp. Anestesi	TARIF (Rp)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Operator	Jasa Medik Sp. Anestesi	TARIF (Rp)
Operasi Bedah Khusus	4,290,000	457,800	1,718,000	898,400	7,160,000	3,222,000	343,800	1,288,800	515,520	5,370,000	1,980,000	211,200	792,000	318,800	3,300,000
Operasi Besar	3,000,000	320,000	1,200,000	400,000	5,000,000	2,282,000	234,800	880,800	352,220	3,670,000	1,350,000	144,000	540,000	218,000	2,250,000
Operasi Sedang	1,521,000	162,240	608,400	243,360	2,635,000	1,288,000	135,360	507,800	203,040	2,115,000	780,000	83,200	312,000	124,800	1,300,000
Operasi Kecil (Narkose)	810,000	88,400	324,000	129,800	1,360,000	675,000	72,000	270,000	108,000	1,125,000	450,000	48,000	180,000	72,000	750,000
Operasi Kecil (Lokal)	480,000	51,200	182,000	76,800	800,000	406,000	43,200	162,000	64,800	675,000	300,000	32,000	120,000	48,000	500,000

TINDAKAN MEDIK OPERATIF KELAS UTAMA

TINDAKAN	KELAS UTAMA				KELAS UTAMA DI LUAR JAM KERJA				KELAS UTAMA CITO						
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Operator	Jasa Medik Sp. Anestesi	TARIF (Rp)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Operator	Jasa Medik Sp. Anestesi	TARIF (Rp)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Operator	Jasa Medik Sp. Anestesi	TARIF (Rp)
Operasi Bedah Khusus	4,960,000	628,000	1,980,000	792,000	8,260,000	6,187,500	680,000	2,475,000	990,000	10,212,500	9,900,000	1,068,000	3,980,000	1,584,000	16,500,000
Operasi Besar	3,375,000	380,000	1,360,000	540,000	5,625,000	4,218,750	450,000	1,887,500	675,000	7,891,250	6,750,000	720,000	2,700,000	1,080,000	11,250,000
Operasi Sedang	1,950,000	208,000	780,000	312,000	3,250,000	2,437,500	280,000	975,000	390,000	4,082,500	3,800,000	418,000	1,580,000	624,000	6,500,000
Operasi Kecil (Narkose)	1,125,000	120,000	450,000	180,000	1,875,000	1,406,250	150,000	582,500	225,000	2,943,750	2,250,000	240,000	900,000	360,000	3,750,000
Operasi Kecil (Lokal)	750,000	80,000	300,000	120,000	1,250,000	937,500	100,000	375,000	150,000	1,582,500	1,500,000	180,000	600,000	240,000	2,500,000

TINDAKAN MEDIK OPERATIF DI LUAR JAM DINAS

TINDAKAN	KELAS I				KELAS II				KELAS III						
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Operator	Jasa Medik Sp. Anestesi	TARIF (Rp)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Operator	Jasa Medik Sp. Anestesi	TARIF (Rp)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Operator	Jasa Medik Sp. Anestesi	TARIF (Rp)
Operasi Bedah Khusus	5,282,500	572,000	2,145,000	858,000	8,937,500	4,027,500	429,800	1,611,000	644,400	6,712,500	2,475,000	284,000	990,000	388,000	4,125,000
Operasi Besar	3,750,000	400,000	1,500,000	600,000	6,250,000	2,752,500	292,800	1,101,000	440,400	4,987,500	1,887,500	180,000	675,000	270,000	2,812,500
Operasi Sedang	1,901,250	202,800	780,500	304,200	3,188,750	1,588,250	189,200	694,500	253,900	2,843,750	975,000	104,000	380,000	158,000	1,825,000
Operasi Kecil (Narkose)	1,012,500	108,000	405,000	162,000	1,687,500	1,403,750	90,000	337,500	125,000	1,868,250	582,500	80,000	225,000	90,000	937,500
Operasi Kecil (Lokal)	800,000	84,000	240,000	98,000	1,000,000	506,250	54,000	202,500	81,000	843,750	375,000	40,000	150,000	60,000	625,000

TINDAKAN MEDIK OPERATIF GITO

TINDAKAN	KELAS I					KELAS II					KELAS III				
	Jasa		Jasa Medik		TARIF (Rp)	Jasa		Jasa Medik		TARIF (Rp)	Jasa		Jasa Medik		TARIF (Rp)
	Sarana	Pelayanan	Operator	Sp. Anestesi		Sarana	Pelayanan	Operator	Sp. Anestesi		Sarana	Pelayanan	Operator	Sp. Anestesi	
Operasi Bedah Khusus	8.500,000	916,200	3.432,000	1.372,800	14.900,000	8.444,000	887,200	2.577,800	1.031,040	10.740,000	3.980,000	422,400	1.584,800	823,600	6.800,000
Operasi Besar	8.000,000	840,000	2.400,000	980,000	10.600,000	4.404,000	489,760	1.761,800	704,640	7.340,000	2.700,000	288,000	1.080,800	422,000	4.500,000
Operasi Sedang	2.042,000	324,480	1.216,800	486,720	5.070,000	2.538,000	270,720	1.015,200	408,960	4.230,000	1.500,000	188,400	824,000	248,000	2.800,000
Operasi Kecil (Warhouse)	1.820,000	172,800	648,000	252,200	2.700,000	1.260,000	144,000	548,000	216,000	2.260,000	900,000	90,000	360,000	144,000	1.500,000
Operasi Kecil (Lokal)	980,000	102,400	384,000	153,600	1.600,000	832,819	87,600	253,126	101,260	1.064,000	600,000	64,000	240,000	98,000	1.000,000

TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

TINDAKAN	KELAS I					KELAS II					KELAS III				
	Jasa		Jasa Medik		TARIF (Rp)	Jasa		Jasa Medik		TARIF (Rp)	Jasa		Jasa Medik		TARIF (Rp)
	Sarana	Pelayanan	Operator	Sp. Anestesi		Sarana	Pelayanan	Operator	Sp. Anestesi		Sarana	Pelayanan	Operator	Sp. Anestesi	
Poliklinik															
Tindakan Khusus	157,500	16,800	83,000	25,200	282,500	131,250	14,000	62,500	21,000	218,750	105,000	11,200	42,000	18,800	175,000
Tindakan Besar	112,500	12,000	45,000	18,000	187,500	93,750	10,000	37,500	15,000	160,250	75,000	8,000	30,000	12,000	125,000
Tindakan Sedang	67,500	7,200	27,000	10,800	112,500	58,250	6,000	22,500	9,000	82,750	45,000	4,800	18,000	7,200	75,000
Tindakan Kecil	45,000	4,800	18,000	7,200	75,000	37,500	4,000	15,000	6,000	62,500	30,000	3,200	12,000	4,800	50,000
Sederhana	13,500	1,440	5,400	2,160	22,500	11,250	1,200	4,500	1,800	18,750	9,000	960	3,600	1,440	15,000
Rawat Inap															
Tindakan Khusus	180,000	19,200	72,000	28,800	300,000	150,000	16,000	80,000	24,000	260,000	120,000	12,800	48,000	19,200	200,000
Tindakan Besar	125,000	14,400	54,000	21,600	225,000	112,500	12,000	45,000	18,000	187,500	90,000	9,600	36,000	14,400	150,000
Tindakan Sedang	90,000	9,600	36,000	14,400	160,000	75,000	8,000	38,000	12,000	125,000	60,000	6,400	24,000	9,600	100,000
Tindakan Kecil	67,500	7,200	27,000	10,800	112,500	58,250	6,000	22,500	9,000	82,750	45,000	4,800	18,000	7,200	75,000
Sederhana	51,750	5,520	20,700	8,280	86,250	43,125	4,800	17,250	6,900	71,875	34,500	3,680	13,800	5,520	57,500

D.1. RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSALINAN/KEBIDANAN RAWAT INAP KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK			TARIF (Rp)
				Sp.O&S	Sp.An	Sp.A	
A	DITOLONG BIDAN						
1.	Partus Normal (Bidan Jaga)	420,000	280,000	0	0	0	700,000
2.	Partus Normal (Bidan Khusus)	540,000	360,000	0	0	0	900,000
B	Ditolong Residen/Dokter Umum						
1.	Partus normal (residen/dr. Jaga)	600,000	224,250	235,750	0	0	1.150,000
2.	Partus abnormal (residen/dr. Jaga)	1.020,000	255,000	323,000	0	102,000	1.700,000
3.	Secio Caesaria (residen/dr. Jaga)	1.500,000	260,000	375,000	240,000	125,000	2.500,000
C.	DITOLONG SPESIALIS OBGYN						
1.	Partus Normal (Spesialis Jaga)	900,000	292,500	307,500	0	0	1.500,000
2.	Partus Normal (spesialis jaga/Cito)	1.020,000	221,000	425,000	0	0	1.700,000
3.	Partus Normal (Spesialis Khusus)	1.080,000	234,000	450,000	0	0	1.800,000
4.	Partus Normal (spesialis Khusus/Cito)	1.200,000	260,000	500,000	0	0	2.000,000
5.	Partus Abnormal (Spesialis Jaga)	1.320,000	330,000	418,000	0	132,000	2.200,000
6.	Partus Abnormal (Spesialis Jaga/Cito)	1.500,000	375,000	475,000	0	150,000	2.500,000
7.	Partus Abnormal (Spesialis Khusus)	1.500,000	175,000	675,000	0	150,000	2.500,000
8.	Partus Abnormal (Spesialis Khusus/Cito)	1.710,000	199,500	769,500	0	171,000	2.850,000
9.	Secio Caesaria (Spesialis Jaga)	1.800,000	312,000	450,000	288,000	150,000	3.000,000
10.	Secio Caesaria (Spesialis Jaga/Cito)	2.100,000	364,000	525,000	336,000	175,000	3.500,000
11.	Secio Caesaria (Spesialis Khusus)	2.100,000	224,000	565,000	336,000	175,000	3.500,000
12.	Secio Caesaria (Spesialis Khusus/Cito)	2.400,000	256,000	760,000	384,000	200,000	4.000,000

D.2. RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSALINAN/KEBIDANAN RAWAT INAP KELAS II

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK			TARIF (Rp)
				Sp. OG	Sp. An	Sp. A	
A	DITOLONG BIDAN						
1.	Partus Normal (Bidan Jaga)	483,000	322,000	0	0	0	805,000
2.	Partus Normal (Bidan Khusus)	621,000	414,000	0	0	0	1,035,000
B	Ditolong Residen/Dokter Umum						
1.	Partus normal (residen/dr. Jaga)	793,500	257,888	271,113	0	0	1,322,500
2.	Partus abnormal (residen/dr. Jaga)	1,173,000	263,250	371,450	0	117,300	1,955,000
3.	Sectio Caesaria (residen/dr. Jaga)	1,725,000	299,000	431,250	276,000	143,750	2,875,000
C.	DITOLONG SPESIALIS OBGYN						
1.	Partus Normal (Spesialis Jaga)	1,035,000	336,375	353,625	0	0	1,725,000
2.	Partus Normal (spesialis jaga/Cito)	1,173,000	254,150	488,750	0	0	1,955,000
3.	Partus Normal (Spesialis Khusus)	1,242,000	269,100	517,500	0	0	2,070,000
4.	Partus Normal (spesialis Khusus/Cito)	1,380,000	299,000	575,000	0	0	2,300,000
5.	Partus Abnormal (Spesialis Jaga)	1,518,000	379,500	490,700	0	151,800	2,530,000
6.	Partus Abnormal (Spesialis Jaga/Cito)	1,725,000	431,250	546,250	0	172,500	2,875,000
7.	Partus Abnormal (Spesialis Khusus)	1,725,000	201,250	776,250	0	172,500	2,875,000
8.	Partus Abnormal (Spesialis Khusus/Cito)	1,966,500	229,425	884,925	0	196,650	3,277,500
9.	Sectio Caesaria (Spesialis Jaga)	2,070,000	358,800	517,500	331,200	172,500	3,450,000
10.	Sectio Caesaria (Spesialis Jaga/Cito)	2,415,000	418,600	603,750	386,400	201,250	4,025,000
11.	Sectio Caesaria (Spesialis Khusus)	2,415,000	267,600	764,750	386,400	201,250	4,025,000
12.	Sectio Caesaria (Spesialis Khusus/Cito)	2,760,000	294,400	874,000	441,600	230,000	4,600,000

D.3. RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSALINAN/KEBIDANAN RAWAT INAP KELAS I

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK			TARIF (Rp)
				Sp. OG	Sp. An	Sp. A	
A	DITOLONG BIDAN						
1.	Partus Normal (Bidan Jaga)	567,000	378,000	0	0	0	945,000
2.	Partus Normal (Bidan Khusus)	729,000	486,000	0	0	0	1,215,000
B	Ditolong Residen/Dokter Umum						
1.	Partus normal (residen/dr. Jaga)	931,500	302,738	318,263	0	0	1,552,500
2.	Partus abnormal (residen/dr. Jaga)	1,377,000	344,250	436,050	0	137,700	2,295,000
3.	Sectio Caesaria (residen/dr. Jaga)	2,025,000	351,000	506,250	324,000	168,750	3,375,000
C.	DITOLONG SPESIALIS OBGYN						
1.	Partus Normal (Spesialis Jaga)	1,215,000	394,875	415,125	0	0	2,025,000
2.	Partus Normal (spesialis jaga/Cito)	1,377,000	298,350	573,750	0	0	2,295,000
3.	Partus Normal (Spesialis Khusus)	1,458,000	315,900	607,500	0	0	2,430,000
4.	Partus Normal (spesialis Khusus/Cito)	1,620,000	351,000	675,000	0	0	2,700,000
5.	Partus Abnormal (Spesialis Jaga)	1,782,000	445,500	564,300	0	178,200	2,970,000
6.	Partus Abnormal (Spesialis Jaga/Cito)	2,025,000	506,250	641,250	0	202,500	3,375,000
7.	Partus Abnormal (Spesialis Khusus)	2,025,000	236,250	911,250	0	202,500	3,375,000
8.	Partus Abnormal (Spesialis Khusus/Cito)	2,308,500	269,325	1,038,825	0	230,850	3,847,500
9.	Sectio Caesaria (Spesialis Jaga)	2,430,000	421,200	607,500	388,800	202,500	4,050,000
10.	Sectio Caesaria (Spesialis Jaga/Cito)	2,835,000	491,400	708,750	453,600	236,250	4,725,000
11.	Sectio Caesaria (Spesialis Khusus)	2,835,000	302,400	897,750	453,600	236,250	4,725,000
12.	Sectio Caesaria (Spesialis Khusus/Cito)	3,240,000	345,600	1,026,000	518,400	270,000	5,400,000

D. 4. RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSALINAN/KEBIDANAN RAWAT INAP KELAS UTAMA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK			TARIF (Rp)
				Sp. OG	Sp. An	Sp. A	
A. DITOLONG BIDAN							
1.	Partus Normal (Bidan Jaga)	630,000	420,000	0	0	0	1,050,000
2.	Partus Normal (Bidan Khusus)	810,000	540,000	0	0	0	1,350,000
B. Ditolong Residen/Dokter Umum							
1.	Partus normal (residen/dr. Jaga)	1,035,000	336,375	353,625	0	0	1,725,000
2.	Partus abnormal (residen/dr. Jaga)	1,590,000	382,500	484,500	0	153,000	2,550,000
3.	Secio Caesaria (residen/dr. Jaga)	2,250,000	390,000	562,500	360,000	187,500	3,750,000
C. DITOLONG SPESIALIS OBGYN							
1.	Partus Normal (Spesialis Jaga)	1,350,000	438,750	461,250	0	0	2,250,000
2.	Partus Normal (spesialis jaga/Cito)	1,530,000	331,500	637,500	0	0	2,550,000
3.	Partus Normal (Spesialis Khusus)	1,620,000	351,000	675,000	0	0	2,700,000
4.	Partus Normal (spesialis Khusus/Cito)	1,800,000	390,000	750,000	0	0	3,000,000
5.	Partus Abnormal (Spesialis Jaga)	1,980,000	495,000	627,000	0	198,000	3,300,000
5.	Partus Abnormal (Spesialis Jaga/Cito)	2,250,000	562,500	712,500	0	225,000	3,750,000
7.	Partus Abnormal (Spesialis Khusus)	2,250,000	262,500	1,012,500	0	225,000	3,750,000
8.	Partus Abnormal (Spesialis Khusus/Cito)	2,565,000	299,250	1,154,250	0	256,500	4,275,000
9.	Secio Caesaria (Spesialis Jaga)	2,700,000	468,000	675,000	432,000	225,000	4,500,000
10	Secio Caesaria (Spesialis Jaga/Cito)	3,150,000	546,000	787,500	504,000	262,500	5,250,000
11	Secio Caesaria (Spesialis Khusus)	3,150,000	336,000	987,500	504,000	262,500	5,250,000
12	Secio Caesaria (Spesialis Khusus/Cito)	3,600,000	384,000	1,140,000	576,000	300,000	6,000,000

E. RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

TINDAKAN MEDIK GIGI

No.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Acrylic Crown Tanpa RCT	105,000	21,875	48,125	175,000
2	Acrylic crown Backing Logam/ Full Cast Crown Logam	120,000	25,000	56,000	200,000
3	Alveolektomi per Regio	60,000	12,500	27,500	100,000
4	Ankat Jahitan Post Operasi	9,000	1,875	4,125	15,000
5	Apeks Reseksi Tanpa RCT	60,000	12,500	27,500	100,000
6	Apeksifikasi	60,000	12,500	27,500	100,000
7	Apeksogenesis Sebagian	36,000	7,500	16,500	60,000
8	Apeksogenesis lengkap	48,000	10,000	22,000	80,000
9	Artificial Gingival 1-2 gigi	90,000	18,750	41,250	150,000
10	Artificial Gingival 3-4 gigi	120,000	25,000	55,000	200,000
11	Artificial Gingival 5-6 gigi	150,000	31,250	68,750	250,000
12	Bibir Sumbing, Labioplasti Bilateral Kompit	600,000	125,000	275,000	1,000,000
13	Bibir Sumbing, Labioplasti Bilateral Tak Kompit	540,000	112,500	247,500	900,000
14	Bibir Sumbing, Labioplasti Unilateral Kompit	420,000	87,500	192,500	700,000
15	Bibir Sumbing, Labioplasti Unilateral Tak Kompit	360,000	75,000	166,000	600,000
16	Bracket/Band Lepas per biji, Ganti Busur/Chain	9,000	1,875	4,125	15,000
17	Cetak Gigi	18,000	3,750	8,250	30,000
18	Cetak RA/FIB Pro Arch Bar (konsul bedah)	78,000	16,250	36,750	130,000
19	Ductus Glandulae Submandibularis	54,000	11,250	24,750	90,000
20	Currtage per region	60,000	12,500	27,500	100,000

21	Coronoplasty per visit	30,000	8,250	13,750	50,000
22	Ekstraksi Fibroma < atau = 1/2 Rahang	54,000	11,250	24,750	90,000
23	Ekstraksi Fibroma , atau = 1 Rahang	84,000	17,500	38,500	140,000
24	Ekstraksi Kista Besar	210,000	43,750	96,250	350,000
25	Ekstraksi Kista Radikuler Besar	210,000	43,750	96,250	350,000
26	Ekstraksi Kista Radikuler Kecil	150,000	31,250	68,750	250,000
27	Ekstraksi Mukokel	54,000	11,250	24,750	90,000
28	Ekstraksi Odontoma / Osteoma / Torus Kecil	54,000	11,250	24,750	90,000
29	Ekstraksi Odontoma / Osteoma / Torus Besar	90,000	18,750	41,250	150,000
30	Eksisi Oportukulum	54,000	11,250	24,750	90,000
31	Eksisi Epulis	90,000	18,750	41,250	150,000
32	Ekstraksi Gigi Permanen tanpa Penyulit	24,000	5,000	11,000	40,000
33	Ekstraksi Gigi Permanen dengan Penyulit	45,000	9,375	20,625	75,000
34	Ekstraksi Gigi Sulung	18,000	3,750	8,250	30,000
35	Enucleasi Kista Rahang	180,000	37,500	82,500	300,000
36	Enucleasi Kista Besar lebih dari 1/2 Intradran	255,000	53,125	116,875	425,000
37	Resure Sealant Gigi Sulung	30,000	6,250	13,750	50,000
38	Fraktur rahang sederhana reduksi terbuka + IOW	195,000	40,625	89,375	325,000
39	Fraktur rahang sederhana reduksi terbuka + IOW + IDW	240,000	50,000	110,000	400,000
40	Fraktur rahang sederhana reduksi terbuka + IOW + IMW	540,000	112,500	247,500	900,000
41	Fraktur rahang sederhana reduksi tertutup + IMW	300,000	62,500	137,500	500,000
42	Fraktur Prosesus Alveolaris Inter Dental Wiring + IDW	75,000	15,625	34,375	125,000
43	Fraktur Proc. Alveolaris Inter Dental Wiring+IDW +debriment	135,000	28,125	61,875	225,000
44	Frenectomi per mulut	90,000	18,750	41,250	150,000
45	Flap operasi, reposisi	180,000	37,500	82,500	300,000
46	Flap operasi	90,000	18,750	41,250	150,000
47	Flap operasi + Bone graft	300,000	62,500	137,500	500,000
48	Flap operasi + GTR, tanpa bahan	180,000	37,500	82,500	300,000
49	Ganti Drain	8,400	1,750	3,850	14,000
50	Ganti Has Post Ekstraksi Kista/Tumor	8,400	1,750	3,850	14,000
51	Gingivektomi / Gingivoplasty per gigi	60,000	12,500	27,500	100,000
52	Gigi Lupa-an Sebagian				
	a. Akriik				
	- Gigi Pertama	90,000	18,750	41,250	150,000
	- Gigi berikut	30,000	6,250	13,750	50,000
	b. Logam				
	Gigi Pertama	150,000	31,250	68,750	250,000
	Gigi berikut	36,000	7,500	16,500	60,000
53	Gigi Tiruan Penuh				
	a. Akriik Rahang Atas bawah	450,000	93,750	206,250	750,000
	b. Akriik kasus Flabby	510,000	106,250	239,750	850,000
	c. Akriik Kasus Flat	690,000	143,750	316,250	1,150,000
	d. Akriik per Rahang	300,000	62,500	137,500	500,000
	e. Logam Rahang Atas Bawah	840,000	175,000	385,000	1,400,000
	f. Logam per Rahang	450,000	93,750	206,250	750,000
54	Immediate Denture	78,000	16,250	36,750	130,000
55	Immediate Over Denture	8,400	1,750	3,850	14,000
56	Insisi Abses Extra Oral / Intra Oral	27,000	5,625	12,375	45,000
57	Insisi / Excisi Biopsi Intra / Extra Oral	27,000	5,625	12,375	45,000
58	Inlay	114,000	23,750	52,250	190,000
59	Inferdental Reseksion, Operculectomy	36,000	7,500	16,500	60,000
60	Implant Gigi	4,950,000	712,500	1,837,500	7,500,000
61	Marsupialisasi Kista & Ranula (window)	54,000	11,250	24,750	90,000
62	Occlusal Adjustment	45,000	9,375	20,625	75,000
63	Odermekomi Berat Non Erupsi	360,000	75,000	165,000	600,000
64	Odermekomi Berat Erupsi	270,000	56,250	123,750	450,000
65	Odermekomi Sedang	240,000	50,000	110,000	400,000
66	Odermekomi Ringan	180,000	37,500	82,500	300,000
67	Opturacor anpa Gigi	102,000	21,250	46,750	170,000
68	Opturacor dengan gigi (per 1 gigi)	114,000	23,750	52,250	190,000
69	Orthodontik Lepas per 1 Rahang	270,000	56,250	123,750	450,000
70	Orthodontik Cekat per 1 Rahang	1,050,000	218,750	481,250	1,750,000

71	Perawatan Kompl Ekstraksi Medikamentosa/dg obat2an	12,000	2,500	5,500	20,000
72	Perawatan Kompl Ekstraksi dengan tindakan	18,000	3,750	8,250	30,000
73	Pemberahan Karang Gigi per Rahang	45,000	9,375	20,625	75,000
74	Penutupan resesi gingival dengan komposit	60,000	12,500	27,500	100,000
75	Perawatan mumifikasi	30,000	8,125	17,875	65,000
76	Perawatan demin sensitif per gigi	30,000	6,250	13,750	50,000
77	Perawatan Bruxisme	120,000	25,000	55,000	200,000
78	Perawatan Pulp capping	30,000	8,125	17,875	65,000
79	Perawatan Trismus dengan Solus	12,000	2,500	5,500	20,000
80	Perawatan Saluran Akar Gigi Anterior (Pulpektomi)	90,000	20,625	45,375	165,000
81	Perawatan Saluran Akar Gigi Anterior, one visit	80,000	18,750	41,250	160,000
82	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior (Pulpektomi)	144,000	30,000	66,000	240,000
83	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior, one visit	135,000	28,125	61,875	225,000
84	Pulpotomi Vital Gigi Anterior	45,000	9,375	20,625	75,000
85	Pulpotomi Vital Gigi Posterior	54,000	11,250	24,750	90,000
86	Perawatan perdarahan dengan tindakan	54,000	11,250	24,750	90,000
87	Perawatan perdarahan Medikamentosa	12,000	2,500	5,500	20,000
88	Pin tanpa RCT	30,000	6,250	13,750	50,000
89	Plat Retensi / Plat Baru	45,000	9,375	20,625	75,000
90	Punksi	9,000	1,875	4,125	15,000
91	Rebasung Gigi Tiruan Lengkap per Rahang	75,000	15,625	34,375	125,000
92	Retening	60,000	12,500	27,500	100,000
93	Reparasi Gigi Tiruan Lengkap	75,000	15,625	34,375	125,000
94	Reparasi Gigi Tiruan Sebagian	45,000	9,375	20,625	75,000
95	Reparasi Plat Ortho	30,000	6,250	13,750	50,000
96	Reposisi Dislokasi Mandibula manual	21,000	4,375	9,625	35,000
97	Reposisi Dislokasi Mandibula dengan injeksi	45,000	9,375	20,625	75,000
98	Reseksi Rahang Partial	256,000	53,125	116,875	425,000
99	Reseksi rahang Hemi Glosalektomi, tanpa FND	195,000	40,625	89,375	325,000
100	Reseksi Rahang Hemi Maksilektomi	360,000	75,000	165,000	600,000
101	Reseksi Rahang Hemi Mandibulektomi	420,000	87,500	192,500	700,000
102	Reseksi Rahang Total per Rahang	600,000	125,000	275,000	1,000,000
103	Reseksi Rahang Parial	270,000	56,250	123,750	450,000
104	Repack, kontrol DHE	21,000	4,375	9,625	35,000
105	Sequesterectomi / Netrotomi 1 Rahang	210,000	43,750	96,250	350,000
106	Sequesterectomi / Netrotomi < atau = 1/4 Rahang	54,000	11,250	24,750	90,000
107	Sequesterectomi / Netrotomi < atau = 1/2 Rahang	78,000	16,250	35,750	130,000
108	Sialolitomi Ductus Glandula Sublingualis	54,000	11,250	24,750	90,000
109	Sialolitomi Ductus Glandula Parotis	135,000	28,125	61,875	225,000
110	Space Maintainer Cekat Unilateral	96,000	20,000	44,000	160,000
111	Space Maintainer Cekat Bilateral	180,000	37,500	82,500	300,000
112	Space Maintainer Lepas	120,000	25,000	55,000	200,000
113	Splint dengan komposit, per gigi	36,000	7,500	16,500	60,000
114	Splint dengan komposit + Wire, per gigi	105,000	21,875	48,125	175,000
115	Splint Fixed Crown Porcelain, per gigi	300,000	62,500	137,500	500,000
116	Splint Fixed Crown Acrylic, per gigi	150,000	31,250	68,750	250,000
117	Topikal Aplikasi Fluor per Rahang	54,000	11,250	24,750	90,000
118	Trauma Jaringan Lunak, Debriment dengan jahitan	54,000	11,250	24,750	90,000
119	Trauma Jaringan Lunak, Debriment tanpa jahitan	15,000	3,125	6,875	25,000
120	Tumpatan Amalgam Kecil	24,000	5,000	11,000	40,000

121	Tumpatan Amalgam Besar	30,000	6,250	13,750	50,000
122	Tumpatan Light Curing Kecil	45,000	9,375	20,625	75,000
123	Tumpatan Light Curing Besar	75,000	15,625	34,375	125,000
124	Tumpatan Sementara	15,000	3,125	6,875	25,000
125	Uplay	114,000	23,750	52,250	190,000
126	Vesibuloplasty < atau = 1/4 Rahang	106,000	21,875	48,125	175,000
127	Vesibuloplasty < atau = 1/2 Rahang	165,000	34,375	75,625	275,000
128	Vesibuloplasty < atau = 1 Rahang	225,000	46,875	103,125	375,000

F. RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN AMBULANCE

No	JENIS PELAYANAN AMBULANCE	TARIF	
		ABONEMEN	ARGOMETER
1.	Ambulance dengan Crew Medis	75,000	7.500/Km
2.	Ambulance Tanpa Crew	75,000	5.000/Km

G. RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK SPESIALIS	TARIF(Rp)
1	Tindakan Sederhana 1	12,000	2,500	5,500	20,000
2	Tindakan Sederhana 2	15,000	3,125	6,875	25,000
3	Tindakan Sederhana 3	24,000	5,000	11,000	40,000
4	Tindakan Sederhana 4	33,000	6,875	15,125	55,000
5	Tindakan Sederhana 5	39,000	8,125	17,875	65,000
6	Tindakan Kecil 1	72,000	15,000	33,000	120,000
7	Tindakan Kecil 2	111,000	23,125	50,875	185,000
8	Tindakan Kecil 3	150,000	31,250	68,750	250,000
9	Tindakan Kecil 4	180,000	37,500	82,500	300,000
10	Tindakan Kecil 5	216,000	45,000	99,000	360,000
11	Tindakan Sedang 1	360,000	75,000	165,000	600,000
12	Tindakan Sedang 2	525,000	109,375	240,625	875,000
13	Tindakan Sedang 3	690,000	143,750	316,250	1,150,000
14	Tindakan Sedang 4	870,000	181,250	398,750	1,450,000
15	Tindakan Sedang 5	1,050,000	218,750	481,250	1,750,000

H. RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS DAN/ATAU TINDAKAN KHUSUS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	TARIF (Rp)
1.	Konsultasi gizi	5.000.-	5.000.-	-	10.000.-
2.	Konsultasi ahli gizi	5.000.-	5.000.-	10.000.-	20.000.-
3.	Konsultasi psikologi	15.000.-	10.000	15.000.-	40.000.-
4.	Konsultasi psikiatri	15.000.-	10.000.-	25.000.-	50.000.-
5.	Tindakan psikoterapi	15.000.-	10.000.-	125.000.-	150.000.-

I. RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JENAZAH

PERAWATAN JENAZAH

NO	PERAWATAN JENAZAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	TARIF (Rp)
1.	Penyimpanan jenazah	10.000.-	5.000.-	-	15.000.- per hari
2.	Pendinginan di Kulkas	30.000.-	20.000.-	-	50.000.- per hari
3.	Pengawetan Jenazah	210.000	140.000	-	350.000
4.	Pembedahan Jenazah	360.000	60.000	180.000	600.000

TRANSPORTASI JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	
		ABONEMEN	ARGOMETER
1	Transportasi Jenazah	75,000	5,000 per kilometer

J. RINCIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK DAN MIKROBIOLOGI KLINIK RAWAT INAP KELAS III

NO	URAIAN PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK SPESIALIS	TARIF
	HEMATOLOGI				
1	HEMOGLOBIN	4,800	2,000	1,200	8,000
2	LAJU ENDAP DARAH	4,800	2,000	1,200	8,000
3	HEMATOKRIT	4,800	2,000	1,200	8,000
4	ERITROCIT	4,800	2,000	1,200	8,000
5	LEUCOSIT	4,800	2,000	1,200	8,000
6	THROMBOSIT	4,800	2,000	1,200	8,000
7	HITUNG JENIS	4,800	2,000	1,200	8,000
8	EOSINOPHI	4,800	2,000	1,200	8,000
9	DARAH LENGKAP	20,400	8,500	5,100	34,000
10	EVALUASI HAPUSAN DARAH	24,000	10,000	6,000	40,000
11	FAAL HEMOSTATIS	72,000	30,000	18,000	120,000
12	WAKTU PERDARAHAN	9,000	3,750	2,250	15,000
13	WAKTU PEMBEKUAN	9,000	3,750	2,250	15,000
14	PPT	27,000	11,250	6,750	45,000
15	APT/TKPTT	27,000	11,250	6,750	45,000
16	VISCOSITAS DARAH	12,000	5,000	3,000	20,000
17	VISCOSITAS PLASMA	12,000	5,000	3,000	20,000
18	GOLONGAN DARAH A,B,O	8,000	3,750	2,250	15,000
19	GOLONGAN DARAH RHESUS	9,000	3,750	2,250	15,000
20	Hb F	45,000	18,750	11,250	75,000
21	Hb A2	84,000	35,000	21,000	140,000
22	Hb ELEKTROFORESIS	120,000	50,000	30,000	200,000
23	IAT	96,000	40,000	24,000	160,000
24	G6PD	60,000	25,000	15,000	100,000
25	SERUM IRON	36,000	15,000	9,000	60,000
26	TIBC	36,000	15,000	9,000	60,000
27	FERRITIN	102,000	42,500	25,500	170,000
28	LE CELL	24,000	10,000	6,000	40,000
29	FIBRINOGEN	54,000	22,500	13,500	90,000
	GLUKOSA DARAH				
30	GLUKOSA DARAH PUASA	7,200	3,000	1,800	12,000
31	GLUKOSA DARAH 2 Jam PP	7,200	3,000	1,800	12,000
32	GLUKOSA DARAH ACAK	7,200	3,000	1,800	12,000
33	GLUKOSA DARAH CITO	12,000	5,000	3,000	20,000
34	GTT	24,000	10,000	6,000	40,000
35	Hb A1C	75,000	31,250	18,750	125,000

NO	URAIAN PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK SPESIALIS	TARIF
	PROFIL LIPID				
36	CHOLESTEROL TOTAL	9,500	4,000	2,400	16,000
37	HDL CHOLESTEROL	10,800	4,500	2,700	18,000
39	LDL CHOLESTEROL	10,800	4,500	2,700	18,000
40	TRIGLISERIDA	10,800	4,500	2,700	18,000
41	TOTAL LIPID	9,000	3,750	2,250	15,000
42	APO - A1	72,000	30,000	18,000	120,000
43	APO - B	78,000	32,500	19,500	130,000
44	LIPOPROTEIN (a)	105,000	43,750	26,250	175,000
	FAAL HATI				
45	BILIRUBIN DIREK	12,000	5,000	3,000	20,000
46	BILIRUBIN TOTAL	12,000	5,000	3,000	20,000
47	GROSS TITRASI	6,000	2,500	1,500	10,000
48	TTT	6,000	2,500	1,500	10,000
49	ALKALI FOSFATASE	10,800	4,500	2,700	18,000
50	GAMMA GT	10,800	4,500	2,700	18,000
51	SGOT	10,800	4,500	2,700	18,000
52	SGPT	10,800	4,500	2,700	18,000
53	ALBUMIN	10,800	4,500	2,700	18,000
54	GLOBULIN	12,000	5,000	3,000	20,000
55	GAMMA GLOBULIN	12,000	5,000	3,000	20,000
56	AMYLASE	66,000	27,500	16,500	110,000
57	LIPASE	66,000	27,500	16,500	110,000
58	GLDH	54,000	22,500	13,500	90,000
59	CHOLINESTERASE	50,000	16,250	9,750	65,000
60	BILE ACID	84,000	35,000	21,000	140,000
61	ACID PHOSPHATASE	45,000	18,750	11,250	75,000
62	ELEKTROFORESIS PROTEIN	66,000	27,500	16,500	110,000
63	ELEKTROFORESIS PROTEIN URINE	42,000	17,500	10,500	70,000
	FUNGSI GINJAL				
64	UREAMBUN	9,500	4,000	2,400	16,000
65	KREATININ	9,500	4,000	2,400	16,000
66	ASAM URAT	10,200	4,250	2,550	17,000
67	CLEARANCE CREATINE	24,000	10,000	6,000	40,000
68	IMMUNOLOGI SEROLOGI				
69	WIDAL	12,000	5,000	3,000	20,000
70	TEST KEHAMILAN	12,000	5,000	3,000	20,000
71	HBs Ag	36,000	15,000	9,000	60,000
72	HBs Ab	42,000	17,500	10,500	70,000
79	HBs Ag TITER	78,000	32,500	19,500	130,000
80	HBs AB TITER	90,000	37,500	22,500	150,000
81	Hbe Ag	111,000	46,250	27,750	185,000
82	Hbe Ab	111,000	46,250	27,750	185,000
83	ANTI HAV	96,000	40,000	24,000	160,000
84	ANTI HBc	81,000	33,750	20,250	135,000
85	ANTI HCV	102,000	42,500	25,500	170,000
95	Ig M Anti HAV	96,000	40,000	24,000	160,000
87	Ig M Anti HBc	72,000	30,000	18,000	120,000
88	Ig M Anti HCV	210,000	87,500	52,500	350,000
89	Ig E	93,000	38,750	23,250	155,000
90	Ig A	93,000	38,750	23,250	155,000

91	Ig G	93,000	38,750	23,250	155,000
92	Ig M	93,000	38,750	23,250	155,000
93	TOXOPLASMA	78,000	32,500	19,500	130,000
94	Ig M Toxo	78,000	32,500	19,500	130,000
95	Ig G Toxo	78,000	32,500	19,500	130,000
96	Ig M RUBELLA	90,000	37,500	22,500	150,000
97	Ig G RUBELLA	84,000	35,000	21,000	140,000
98	Ig M DENGUE	60,000	25,000	15,000	100,000
99	Ig G DENGUE	60,000	25,000	15,000	100,000
100	Ig M Anti HSV I	84,000	35,000	21,000	140,000
101	IgG M Anti HSV II	84,000	35,000	21,000	140,000
102	Ig G Anti HSV I	84,000	35,000	21,000	140,000
103	Ig G Anti HSV II	84,000	35,000	21,000	140,000
104	Ig M CMV	96,999	40,000	24,000	159,999
105	Ig M CMV	78,000	32,500	19,500	130,000
106	ANA Test	108,000	45,000	27,000	180,000
107	HIV	75,000	31,250	18,750	125,000
108	ASO / ASTO TITER	33,000	13,750	8,250	55,000
109	CRP KawanTidat	15,000	6,250	3,750	25,000
110	CRP KawanTidat	75,000	31,250	18,750	125,000
111	SLE TEST	36,000	15,000	9,000	60,000
112	RA TEST	15,000	6,250	3,750	25,000
113	ROSE WAALER	36,000	15,000	9,000	60,000
114	TPHA	30,000	16,250	9,750	65,000
115	VDRL	15,000	6,250	3,750	25,000
116	ICT TB	72,000	30,000	18,000	120,000
117	PCR TBC	120,000	50,000	30,000	200,000
118	Ig M ACA	138,000	57,500	34,500	230,000
119	Ig G ACA	138,000	57,500	34,500	230,000
120	Ig G H PYLORI	120,000	50,000	30,000	200,000
121	SERRAMOEBA	90,000	37,500	22,500	150,000
	JANTUNG				
122	LDH	30,000	16,250	9,750	65,000
123	CK	27,000	11,250	6,750	45,000
124	CK - MB	60,000	25,000	15,000	100,000
	FAECES				
125	FAECES LENGKAP	9,000	3,750	2,250	15,000
126	LEMAK	9,000	3,750	2,250	15,000
127	BENZIDINE	12,000	5,000	3,000	20,000
128	FT	8,000	3,750	2,250	15,000
129	CT	15,000	6,250	3,750	25,000
	MIKROBIOLOGI				
130	GALL KULTUR	30,000	16,250	9,750	65,000
131	URINE KULTUR	30,000	16,250	9,750	65,000
132	PUS KULTUR	30,000	16,250	9,750	65,000
133	SPUTUM KULTUR	30,000	16,250	9,750	65,000
134	BTA KULTUR	60,000	25,000	15,000	100,000
135	MALARIA TETES TEBAL	12,000	5,000	3,000	20,000
136	PEWARNAAN ZN	12,000	5,000	3,000	20,000
137	PEWARNAAN GRAM	12,000	5,000	3,000	20,000

	ELEKTROLIT				
138	NATRIUM	27,000	11,250	6,750	45,000
139	KALIUM	27,000	11,250	6,750	45,000
140	CHLORIDA	27,000	11,250	6,750	45,000
141	CALCIUM	27,000	11,250	6,750	45,000
142	MAGNESIUM	27,000	11,250	6,750	45,000
143	PHOSPHOR	27,000	11,250	6,750	45,000
144	BICARBONAT	27,000	11,250	6,750	45,000
	PETANDA TUMOR				
145	AFP	78,000	32,500	19,500	130,000
146	CEA	78,000	32,500	19,500	130,000
147	PSA	108,000	45,000	27,000	180,000
148	PAP	39,000	16,250	9,750	65,000
149	SCC	138,000	57,500	34,500	230,000
150	Ca 125	150,000	62,500	37,500	250,000
151	Ca 19-9	162,000	67,500	40,500	270,000
152	Ca 15-3	144,000	60,000	36,000	240,000
	ENDOKRINOLOGI				
153	T3	63,000	26,250	15,750	105,000
154	T4	63,000	26,250	15,750	105,000
155	TSH-S	72,000	30,000	18,000	120,000
156	TBK	63,000	26,250	15,750	105,000
157	TBG	63,000	26,250	15,750	105,000
158	FT3	111,000	46,250	27,750	185,000
159	FT4	78,000	32,500	19,500	130,000
160	FT 4i	114,000	47,500	28,500	190,000
161	LH	87,000	36,250	21,750	145,000
162	FSH	87,000	36,250	21,750	145,000
163	PROLAKTIN	90,000	37,500	22,500	150,000
164	ESTRADIOL	120,000	50,000	30,000	200,000
165	TESTOSTERON	90,000	37,500	22,500	150,000
166	PROGESTERON	120,000	50,000	30,000	200,000
167	BETA HCG	96,000	40,000	24,000	160,000
168	C-PEPTIDE	108,000	45,000	27,000	180,000
169	INSULIN	93,000	38,750	23,250	155,000
	URNALISIS				
170	URIN LENGKAP	12,000	5,000	3,000	20,000
171	BERAT JENIS	3,000	1,250	750	5,000
172	PH	3,000	1,250	750	5,000
173	ALBUMIN	3,000	1,250	750	5,000
174	REDUKSI	3,000	1,250	750	5,000
175	BILIRUBIN	3,000	1,250	750	5,000
176	UROBILIN	3,000	1,250	750	5,000
177	KETON	3,000	1,250	750	5,000
178	NITRIT	3,000	1,250	750	5,000
179	SEDIMEN	9,000	3,750	2,250	15,000
180	AMPHETAMINE	21,000	8,750	5,250	35,000
181	MORFINE	21,000	8,750	5,250	35,000
182	THC (MARIJUANA)	21,000	8,750	5,250	35,000

**PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK DAN MIKROBIOLOGI KLINIK
RAWAT INAP KELAS II DAN RAWAT JALAN**

NO	URAIAN PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK SPESIALIS	TARIF
	HEMATOLOGI				
1	HEMOGLOBIN	5,520	2,300	1,380	9,200
2	LAJU ENDAP DARAH	5,520	2,300	1,380	9,200
3	HEMATOKRIT	5,520	2,300	1,380	9,200
4	ERITROCYT	5,520	2,300	1,380	9,200
5	LEUCOSIT	5,520	2,300	1,380	9,200
6	TROMBOSIT	5,520	2,300	1,380	9,200
7	HITUNG JENIS	5,520	2,300	1,380	9,200
8	EOSINOPHIL	5,520	2,300	1,380	9,200
9	DARAH LENGKAP	23,460	9,775	5,865	39,100
10	EVALUASI HAPUSAN DARAH	27,600	11,500	6,000	46,000
11	FAAL HEMOSTATIS	82,800	34,500	20,700	138,000
12	WAKTU PERDARAHAN	10,350	4,313	2,588	17,250
13	WAKTU PEMBEKUAN	10,350	4,313	2,588	17,250
14	PPT	31,050	12,938	7,763	51,750
15	APTT/KPTT	31,050	12,938	7,763	51,750
16	VISCOSITAS DARAH	13,800	5,750	3,450	23,000
17	VISCOSITAS PLASMA	13,800	5,750	3,450	23,000
18	GOLONGAN DARAH A,B,O	10,350	4,313	2,588	17,250
19	GOLONGAN DARAH RHESUS	10,350	4,313	2,588	17,250
20	Hb F	51,750	21,563	12,938	86,250
21	Hb A2	96,600	40,250	24,150	161,000
22	Hb ELEKTROFORESIS	138,000	57,500	34,500	230,000
23	TAT	110,400	46,000	27,600	184,000
24	G6PD	69,000	28,750	17,250	115,000
25	SERUM IRON	41,400	17,250	10,350	69,000
26	TIBC	41,400	17,250	10,350	69,000
27	FERRITIN	117,300	48,875	29,325	195,500
28	LE CELL	27,600	11,500	6,900	46,000
29	FIBRINOGEN	62,100	25,875	15,525	103,500
	GLUKOSA DARAH				
30	GLUKOSA DARAH PUASA	8,280	3,450	2,070	13,800
31	GLUKOSA DARAH 2 Jam PP	8,280	3,450	2,070	13,800
32	GLUKOSA DARAH ACAK	8,280	3,450	2,070	13,800
33	GLUKOSA DARAH CITO	13,800	5,750	3,450	23,000
34	GTT	27,600	11,500	6,900	46,000
35	Hb A1C	86,250	35,938	21,563	143,750

NO	URAIAN PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK SPESIALIS	TARIF
	PROFIT LIPID				
36	CHOLESTEROL TOTAL	12,960	5,400	3,240	21,600
37	HDL CHOLESTEROL	14,580	6,075	3,645	24,300
39	LDL CHOLESTEROL	14,580	6,075	3,645	24,300
40	TRIGLISERIDA	14,580	6,075	3,645	24,300
41	TOTAL LIPID	12,150	5,063	3,038	20,250
42	APO - A1	97,200	40,500	24,300	162,000
43	APO - B	105,300	43,875	26,325	175,500
44	LIPOPROTEIN (a)	141,750	59,063	35,438	236,250
	FAAL HATI				
45	BILIRUBIN DIREK	16,200	6,750	4,050	27,000
46	BILIRUBIN TOTAL	16,200	6,750	4,050	27,000
47	GROSS TITRASI	8,100	3,375	2,025	13,500
48	TTT	6,000	2,500	1,500	10,000
49	ALKALI FOSFATASE	14,580	6,075	3,645	24,300
50	GAMMA GT	14,580	6,075	3,645	24,300
51	SGOT	14,580	6,075	3,645	24,300
52	SGPT	14,580	6,075	3,645	24,300
53	ALBUMIN	14,580	6,075	3,645	24,300
54	GLOBULIN	16,200	6,750	4,050	27,000
55	GAMMA GLOBULIN	16,200	6,750	4,050	27,000
56	AMYLASE	89,100	37,125	22,275	148,500
57	LIPASE	89,100	37,125	22,275	148,500
58	GLDH	72,900	30,375	18,225	121,500
59	CHOLINESTERASE	52,650	21,938	13,163	87,750
60	BILE ACID	113,400	47,250	28,350	189,000
61	ACID PHOSPHATASE	60,750	25,313	15,188	101,250
62	ELEKTROFORESIS PROTEIN	89,100	37,125	22,275	148,500
63	ELEKTROFORESIS PROTEIN URI	56,700	23,625	14,175	94,500
	FUNGSI GINJAL				
64	UREA/BUN	12,960	5,400	3,240	21,600
65	KREATININ	12,960	5,400	3,240	21,600
66	ASAM URAT	13,770	5,738	3,443	22,950
67	CLEARANCE CREATINE	32,400	13,500	8,100	54,000

NO	URAIAN PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK SPESIALIS	TARIF
68	IMMUNOLOGI SEROLOGI				
69	WIDAL	16,200	6,750	4,050	27,000
70	TEST KEHAMILAN	16,200	6,750	4,050	27,000
71	HBs Ag	48,600	20,250	12,150	81,000
72	HBs Ab	56,700	23,625	14,175	94,500
79	HBs Ag TITER	105,300	43,875	26,325	175,500
80	HBs AB TITER	121,500	50,625	30,375	202,500
81	Hbe Ag	149,850	62,438	37,463	249,750
82	Hbe Ab	149,850	62,438	37,463	249,750
83	ANTI HAV	129,600	54,000	32,400	216,000
84	ANTI HBc	109,350	45,563	27,338	182,250
85	ANTI HCV	137,700	57,375	34,425	229,500
86	Ig M Anti HAV	129,600	54,000	32,400	216,000
87	Ig M Anti HBc	97,200	40,500	24,300	162,000
88	Ig M Anti HCV	283,500	118,125	70,875	472,500
89	Ig E	125,550	52,313	31,388	209,250
90	Ig A	125,550	52,313	31,388	209,250
91	Ig G	125,550	52,313	31,388	209,250
92	Ig M	125,550	52,313	31,388	209,250
93	TOXOPLASMA	105,300	43,875	26,325	175,500
94	Ig M Toxo	105,300	43,875	26,325	175,500
95	Ig G Toxo	105,300	43,875	26,325	175,500
96	Ig M RUBELLA	121,500	50,625	30,375	202,500
97	Ig G RUBELLA	113,400	47,250	28,350	189,000
98	Ig M DENGUE	81,000	33,750	20,250	135,000
99	Ig G DENGUE	81,000	33,750	20,250	135,000
100	Ig M Anti HSV I	113,400	47,250	28,350	189,000
101	Ig M Anti HSV II	113,400	47,250	28,350	189,000
102	Ig G Anti HSV I	113,400	47,250	28,350	189,000
103	Ig G Anti HSV II	113,400	47,250	28,350	189,000
104	Ig M CMV	121,500	50,625	30,375	202,500
105	Ig M CMV	105,300	43,875	26,325	175,500
106	ANA Test	145,800	60,750	36,450	243,000
107	HIV	101,250	42,188	25,313	168,750
108	ASO / ASTO TITER	44,550	18,563	11,138	74,250
109	CRP Kwanlitatif	20,250	8,438	5,063	33,750
110	CRP KwanTitatif	101,250	42,188	25,313	168,750
111	SLE TEST	48,600	20,250	12,150	81,000
112	RA TEST	20,250	8,438	5,063	33,750
113	ROSE WAALER	48,600	20,250	12,150	81,000
114	TPHA	52,650	21,938	13,163	87,750
115	VDRL	20,250	8,438	5,063	33,750
116	ICT TB	97,200	40,500	24,300	162,000
117	PCR TBC	162,000	67,500	40,500	270,000
118	Ig M ACA	186,300	77,625	46,575	310,500
119	Ig G ACA	186,300	77,625	46,575	310,500
120	Ig G H PYOLORI	162,000	67,500	40,500	270,000
121	SERRAMOEBE	121,500	50,625	30,375	202,500
	JANTUNG				
122	LDH	52,650	21,938	13,163	87,750
123	CK	36,450	15,188	9,113	60,750
124	CK - MB	81,000	33,750	20,250	135,000

	FAECES				
125	FEAECES LENGKAP	12,150	5,063	3,038	20,250
126	LEMAK	12,150	5,063	3,038	20,250
127	BENZIDINE	16,200	6,750	4,050	27,000
128	FT	12,150	5,063	3,038	20,250
129	CT	20,250	8,438	5,063	33,750
	MIKROBIOLOGI				
130	GALL KULTUR	52,650	21,938	13,163	87,750
131	URINE KULTUR	52,650	21,938	13,163	87,750
132	PUS KULTUR	52,650	21,938	13,163	87,750
133	SPUTUM KULTUR	52,650	21,938	13,163	87,750
134	BTA KULTUR	81,000	33,750	20,250	135,000
135	MALARIA TETES TEBAL	16,200	6,750	4,050	27,000
136	PEWARNAAN ZN	16,200	6,750	4,050	27,000
137	PEWARNAAN GRAM	16,200	6,750	4,050	27,000
	ELEKTROLIT				
138	NATRIUM	36,450	15,188	9,113	60,750
139	KALIUM	36,450	15,188	9,113	60,750
140	CHLORIDA	36,450	15,188	9,113	60,750
141	CALCIUM	36,450	15,188	9,113	60,750
142	MAGNESIUM	36,450	15,188	9,113	60,750
143	PHOSPHOR	36,450	15,188	9,113	60,750
144	BICARBONAT	36,450	15,188	9,113	60,750
	PETANDA TUMOR				
145	AFP	105,300	43,875	26,325	175,500
146	CEA	105,300	43,875	26,325	175,500
147	PSA	145,800	60,750	36,450	243,000
148	PAP	52,650	21,938	13,163	87,750
149	SCC	186,300	77,625	46,575	310,500
150	Ca 125	202,500	84,375	50,625	337,500
151	Ca 19-9	218,700	91,125	54,675	364,500
152	Ca 15-3	194,400	81,000	48,600	324,000
	ENDOKRINOLOGI				
153	T3	85,050	35,438	21,263	141,750
154	T4	85,050	35,438	21,263	141,750
155	TSH-S	97,200	40,500	24,300	162,000
156	TBK	85,050	35,438	21,263	141,750
157	TBG	85,050	35,438	21,263	141,750
158	FT3	149,850	62,438	37,463	249,750
159	FT4	105,300	43,875	26,325	175,500
160	FT 4 i	153,900	64,125	38,475	256,500
161	LH	117,450	48,938	29,363	195,750
162	FSH	117,450	48,938	29,363	195,750
163	PROLAKTIN	121,500	50,625	30,375	202,500
164	ESTRADIOL	162,000	67,500	40,500	270,000
165	TESTOSTERON	121,500	50,625	30,375	202,500
166	PROGESTERON	162,000	67,500	40,500	270,000
167	BETA HCG	129,600	54,000	32,400	216,000
168	C-PEPTIDE	145,800	60,750	36,450	243,000
169	INSULIN	125,550	52,313	31,388	209,250

URINALISIS					
170	URIN LENGKAP	16,200	6,750	4,050	27,000
171	BERAT JENIS	4,050	1,688	1,013	6,750
172	PH	4,050	1,688	1,013	6,750
173	ALBUMIN	4,050	1,688	1,013	6,750
174	REDUKSI	4,050	1,688	1,013	6,750
175	BILURUBIN	4,050	1,688	1,013	6,750
176	UROBILIN	4,050	1,688	1,013	6,750
177	KETON	4,050	1,688	1,013	6,750
178	NITRIT	4,050	1,688	1,013	6,750
179	SEDIMEN	12,150	5,063	3,038	20,250
180	AMPHETAMINE	28,350	11,813	7,088	47,250
181	MORHINE	28,350	11,813	7,088	47,250
182	THC (MARIJUANA)	28,350	11,813	7,088	47,250

**PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK DAN MIKROBIOLOGI KLINIK
RAWAT INAP KELAS UTAMA**

NO	URAIAN PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK SPESIALIS	TARIF
HEMATOLOGI					
1	HEMOGLOBIN	7,200	3,000	1,800	12,000
2	LAJU ENDAP DARAH	7,200	3,000	1,800	12,000
3	HEMATOKRIT	7,200	3,000	1,800	12,000
4	ERITROCIT	7,200	3,000	1,800	12,000
5	LEUCOSIT	7,200	3,000	1,800	12,000
6	TROMBOSIT	7,200	3,000	1,800	12,000
7	HITUNG JENIS	7,200	3,000	1,800	12,000
8	EOSINOPHIL	7,200	3,000	1,800	12,000
9	DARAH LENGKAP	30,600	12,750	7,650	51,000
10	EVALUASI HAPUSAN DARAH	36,000	15,000	9,000	60,000
11	FAAL HEMOSTATIS	108,000	45,000	27,000	180,000
12	WAKTU PERDARAHAN	13,500	5,625	3,375	22,500
13	WAKTU PEMBEKUAN	13,500	5,625	3,375	22,500
14	PPT	40,500	16,875	10,125	67,500
15	APTT/KPTT	40,500	16,875	10,125	67,500
16	VISCOSITAS DARAH	18,000	7,500	4,500	30,000
17	VISCOSITAS PLASMA	18,000	7,500	4,500	30,000
18	GOLONGAN DARAH A, B, O	13,500	5,625	3,375	22,500
19	GOLONGAN DARAH RHESUS	13,500	5,625	3,375	22,500
20	Hb F	67,500	28,125	16,875	112,500
21	Hb A2	126,000	52,500	31,500	210,000
22	Hb ELETROFORESIS	180,000	75,000	45,000	300,000
23	TAT	144,000	60,000	36,000	240,000
24	G6PD	90,000	37,500	22,500	150,000
25	SERUM IRON	54,000	22,500	13,500	90,000
26	TIBC	54,000	22,500	13,500	90,000
27	FERRITIN	153,000	63,750	38,250	255,000
28	LE CELL	36,000	15,000	9,000	60,000
29	FIBRINOGEN	81,000	33,750	20,250	135,000
GLUKOSA DARAH					
30	GLUKOSA DARAH PUASA	10,800	4,500	2,700	18,000
31	GLUKOSA DARAH 2 Jam PP	10,800	4,500	2,700	18,000
32	GLUKOSA DARAH ACAK	10,800	4,500	2,700	18,000
33	GLUKOSA DARAH CITO	18,000	7,500	4,500	30,000
34	GTT	36,000	15,000	9,000	60,000
35	Hb A1C	112,500	46,875	28,125	187,500

NO	URAIAN PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK SPESIALIS	TARIF
	PROFIT LIPID				
36	CHOLESTEROL TOTAL	14,400	6,000	3,600	24,000
37	HDL CHOLESTEROL	16,200	6,750	4,050	27,000
39	LDL CHOLESTEROL	16,200	6,750	4,050	27,000
40	TRIGLISERIDA	16,200	6,750	4,050	27,000
41	TOTAL LIPID	13,500	5,625	3,375	22,500
42	APO - A1	108,000	45,000	27,000	180,000
43	APO - B	117,000	48,750	29,250	195,000
44	LIPOPROTEIN (a)	157,500	65,625	39,375	262,500
	FAAL HATI				
45	BILIRUBIN DIREK	18,000	7,500	4,500	30,000
46	BILIRUBIN TOTAL	18,000	7,500	4,500	30,000
47	GROSS TITRASI	9,000	3,750	2,250	15,000
48	TTT	9,000	3,750	2,250	15,000
49	ALKALI FOSFATASE	16,200	6,750	4,050	27,000
50	GAMMA GT	16,200	6,750	4,050	27,000
51	SGOT	16,200	6,750	4,050	27,000
52	SGPT	16,200	6,750	4,050	27,000
53	ALBUMIN	16,200	6,750	4,050	27,000
54	GLOBULIN	18,000	7,500	4,500	30,000
55	GAMMA GLOBULIN	18,000	7,500	4,500	30,000
56	AMYLASE	99,000	41,250	24,750	165,000
57	LIPASE	99,000	41,250	24,750	165,000
58	GLDH	81,000	33,750	20,250	135,000
59	CHOLINESTERASE	58,500	24,375	14,625	97,500
60	BILE ACID	126,000	52,500	31,500	210,000
61	ACID PHOSPHATASE	67,500	28,125	16,875	112,500
62	ELEKTROFORESIS PROTEIN	99,000	41,250	24,750	165,000
63	ELEKTROFORESIS PROTEIN URINE	63,000	26,250	15,750	105,000
	FUNGSI GINJAL				
64	UREA/BUN	14,400	6,000	3,600	24,000
65	KREATININ	14,400	6,000	3,600	24,000
66	ASAM URAT	15,300	6,375	3,825	25,500
67	CLEARANCE CREATINE	35,000	15,000	9,000	60,000
68	IMMUNOLOGI SEROLOGI				
69	WIDAL	18,000	7,500	4,500	30,000
70	TEST KEHAMILAN	18,000	7,500	4,500	30,000
71	HBs Ag	54,000	22,500	13,500	90,000
72	HBs Ab	63,000	26,250	15,750	105,000
79	HBs Ag TITER	117,000	48,750	29,250	195,000
80	HBs AB TITER	135,000	56,250	33,750	225,000
81	Hbe Ag	166,500	69,375	41,625	277,500

NO	URAIAN PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK SPESIALIS	TARIF
82	Hbe Ab	166,500	69,375	41,625	277,500
83	ANTI HAV	144,000	60,000	36,000	240,000
84	ANTI HBc	121,500	50,625	30,375	202,500
85	ANTI HCV	153,000	63,750	38,250	255,000
86	Ig M Anti HAV	144,000	60,000	36,000	240,000
87	Ig M Anti HBc	108,000	45,000	27,000	180,000
88	Ig M Anti HCV	315,000	131,250	78,750	525,000
89	Ig E	139,500	58,125	34,875	232,500
90	Ig A	139,500	58,125	34,875	232,500
91	Ig G	139,500	58,125	34,875	232,500
92	Ig M	139,500	58,125	34,875	232,500
93	TOXOPLASMA	117,000	48,750	29,250	195,000
94	Ig M Toxo	117,000	48,750	29,250	195,000
95	Ig G Toxo	117,000	48,750	29,250	195,000
96	Ig M RUBELLA	135,000	56,250	33,750	225,000
97	Ig G RUBELLA	126,000	52,500	31,500	210,000
98	Ig M DENGUE	90,000	37,500	22,500	150,000
99	Ig G DENGUE	90,000	37,500	22,500	150,000
100	Ig M Anti HSV I	126,000	52,500	31,500	210,000
101	Igg M Anti HSV II	126,000	52,500	31,500	210,000
102	Ig G Anti HSV I	126,000	52,500	31,500	210,000
103	Ig G Anti HSV II	126,000	52,500	31,500	210,000
104	Ig M CMV	135,000	56,250	33,750	225,000
105	Ig M CMV	117,000	48,750	29,250	195,000
106	ANA Test	162,000	67,500	40,500	270,000
107	HIV	112,500	46,875	28,125	187,500
108	ASO / ASTO TITER	49,500	20,625	12,375	82,500
109	CRP KwanTitatif	22,500	9,375	5,625	37,500
110	CRP KwanTitatif	112,500	46,875	28,125	187,500
111	SLE TEST	54,000	22,500	13,500	90,000
112	RA TEST	22,500	9,375	5,625	37,500
113	ROSE WAALER	54,000	22,500	13,500	90,000
114	TPHA	58,500	24,375	14,625	97,500
115	VDRL	22,500	9,375	5,625	37,500
116	ICT TB	108,000	45,000	27,000	180,000
117	PCR TBC	180,000	75,000	45,000	300,000
118	Ig MACA	207,000	86,250	51,750	345,000
119	Ig G ACA	207,000	86,250	51,750	345,000
120	Ig G H PYOLORI	180,000	75,000	45,000	300,000
121	SERRAMOEBIA	135,000	56,250	33,750	225,000
	JANTUNG				
122	LDH	58,500	24,375	14,625	97,500
123	CK	40,500	16,875	10,125	67,500
124	CK - MB	80,000	37,500	22,500	150,000
	FAECES				
125	FEAECES LENGKAP	13,500	5,625	3,375	22,500
126	LEMAK	13,500	5,625	3,375	22,500
127	BENZIDINE	18,000	7,500	4,500	30,000
128	FT	13,500	5,625	3,375	22,500
129	CT	22,500	9,375	5,625	37,500

	MIKROBIOLOGI				
130	GALL KULTUR	58,500	24,375	14,625	97,500
131	URINE KULTUR	58,500	24,375	14,625	97,500
132	PUS KULTUR	58,500	24,375	14,625	97,500
133	SPUTUM KULTUR	58,500	24,375	14,625	97,500
134	BTA KULTUR	90,000	37,500	22,500	150,000
135	MALARIA TETES TEBAL	18,000	7,500	4,500	30,000
136	PEWARNAAN ZN	18,000	7,500	4,500	30,000
137	PEWARNAAN GRAM	18,000	7,500	4,500	30,000
	ELEKTROLIT				
138	NATRIUM	40,500	16,875	10,125	67,500
139	KALIUM	40,500	16,875	10,125	67,500
140	CHLORIDA	40,500	16,875	10,125	67,500
141	CALCIUM	40,500	16,875	10,125	67,500
142	MAGNESIUM	40,500	16,875	10,125	67,500
143	PHOSPHOR	40,500	16,875	10,125	67,500
144	BICARBONAT	40,500	16,875	10,125	67,500
	PETANDA TUMOR				
145	AFP	117,000	48,750	29,250	195,000
146	CEA	117,000	48,750	29,250	195,000
147	PSA	162,000	67,500	40,500	270,000
148	PAP	58,500	24,375	14,625	97,500
149	SCC	207,000	86,250	51,750	345,000
150	Ca 125	225,000	90,750	56,250	375,000
151	Ca 19-9	243,000	101,250	60,750	405,000
152	Ca 15-3	216,000	90,000	54,000	360,000
	ENDOKRINOLOGI				
153	T3	94,500	39,375	23,625	157,500
154	T4	94,500	39,375	23,625	157,500
155	TSH-S	108,000	45,000	27,000	180,000
156	TBK	94,500	39,375	23,625	157,500
157	TBG	94,500	39,375	23,625	157,500
158	FT3	166,500	69,375	41,625	277,500
159	FT4	117,000	48,750	29,250	195,000
160	FT 4i	171,000	71,250	42,750	285,000
161	LH	130,500	54,375	32,625	217,500
162	FSH	130,500	54,375	32,625	217,500
163	PROLAKTIN	135,000	56,250	33,750	225,000
164	ESTRADIOL	180,000	75,000	45,000	300,000
165	TESTOSTERON	135,000	56,250	33,750	225,000
166	PROGRESTERON	180,000	75,000	45,000	300,000
167	BETA HCG	144,000	60,000	36,000	240,000
168	C-PEPTIDE	162,000	67,500	40,500	270,000
169	INSULIN	139,500	58,125	34,875	232,500
	URNALISIS				
170	URIN LENGKAP	18,000	7,500	4,500	30,000
171	BERAT JEMIS	4,500	1,875	1,125	7,500
172	PH	4,500	1,875	1,125	7,500
173	ALBUMIN	4,500	1,875	1,125	7,500
174	REDUKSI	4,500	1,875	1,125	7,500
175	BILURUBIN	4,500	1,875	1,125	7,500
176	UROBILIN	4,500	1,875	1,125	7,500
177	KETON	4,500	1,875	1,125	7,500
178	NITRIT	4,500	1,875	1,125	7,500
179	SEDIMEN	13,500	5,625	3,375	22,500
180	AMPHETAMINE	31,500	13,125	7,875	52,500
181	MORHINE	31,500	13,125	7,875	52,500
182	THC (MARIJUANA)	31,500	13,125	7,875	52,500

PEMERIKSAAN RADIOLOGI RAWAT INAP KELAS III

NO	URAIAN TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK SPESIALIS	TARIF
	EXTREMITAS ATAS				
1	MANUS SATU POSISI	24,000	8,000	8,000	40,000
2	WRIST 1 POSISI	24,000	8,000	8,000	40,000
3	ANTHEBRACHI 1 POSISI	24,000	8,000	8,000	40,000
4	ELBOW 1 POSISI	24,000	8,000	8,000	40,000
5	HUMERUS 1 POSISI	24,000	8,000	8,000	40,000
6	SHOULDER 1 POSISI	24,000	8,000	8,000	40,000
7	CLAVICULA 1 POSISI	24,000	8,000	8,000	40,000
8	SCAPULA 1 POSISI	24,000	8,000	8,000	40,000
9	BONE SURVEY	72,000	24,000	24,000	120,000
	EXTREMITAS BAWAH				
10	PEDIS 1 POSISI	24,000	8,000	8,000	40,000
11	ANKLE 1 POSISI	24,000	8,000	8,000	40,000
12	CRURIS 1 POSISI	27,000	9,000	9,000	45,000
13	GENU 1 POSISI	24,000	8,000	8,000	40,000
14	FEMUR 1 POSISI	27,000	9,000	9,000	45,000
15	HIP JOINT 1 POSISI	24,000	8,000	8,000	40,000
16	BONE SURVEY	78,000	26,000	26,000	130,000
	VERTEBRAE				
17	CERVICAL 1 POSISI	30,000	10,000	10,000	50,000
18	THORACO LUMBAL ANAK 1 POSISI	33,000	11,000	11,000	55,000
19	THORACO LUMBAL DEWASA 1 POSISI	39,000	13,000	13,000	65,000
20	LUMBO SACRAL ANAK 1 POSISI	33,000	11,000	11,000	55,000
21	LUMBO SACRAL DEWASA 1 POSISI	39,000	13,000	13,000	65,000
22	SACRUM 1 POSISI	30,000	10,000	10,000	50,000
	SKULL				
23	SKULL ANAK 1 POSISI	30,000	10,000	10,000	50,000
24	SKULL DEWASA 1 POSISI	30,000	10,000	10,000	50,000
25	BASIS CRANI/TOWNE 1 POSISI	30,000	10,000	10,000	50,000
26	EISHLER 1 POSISI	30,000	10,000	10,000	50,000
27	MASTOIDSCHULLER 1 POSISI	30,000	10,000	10,000	50,000
28	NASAL	30,000	10,000	10,000	50,000
29	RHEZEE/ FOR OPTIUM 1 POSISI	30,000	10,000	10,000	50,000
30	SELLA TURSICA 1 POSISI	30,000	10,000	10,000	50,000
31	STENVERS 1 POSISI	30,000	10,000	10,000	50,000
32	TMJ 2 POSISI	48,000	16,000	16,000	80,000
33	WATERS	30,000	10,000	10,000	50,000

NO	URAIAN TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK SPESIALIS	TARIF
	THORAX				
34	THORAX BAYI / ANAK 1 POSISI	27,000	9,000	9,000	45,000
35	THORAX DEWASA 1 POSISI	33,000	11,000	11,000	55,000
34	STERNUM 1 POSISI	33,000	11,000	11,000	55,000
35	TOP LORAUTIC	33,000	11,000	11,000	55,000
	BOF				
36	BOF ANAK 1 POSISI	33,000	11,000	11,000	55,000
37	BOF DEWASA 1 POSISI	39,000	13,000	13,000	65,000
38	PELVIS ANAK 1 POSISI	33,000	11,000	11,000	55,000
39	PELVIS DEWASA 1 POSISI	39,000	13,000	13,000	65,000
40	TOMOGRAM GINJAL	60,000	20,000	20,000	100,000
	DENTAL				
41	DENTAL	18,000	6,000	6,000	30,000
42	PANORAMIC	60,000	12,500	27,500	100,000
	PEMERIKSAAN KONTRAS DENGAN KONTRAS				
43	APPENDICOGRAFI	90,000	18,750	41,250	150,000
44	PHARYNGO-OESOPHAGOGRAFI	120,000	25,000	55,000	200,000
45	COLON IN LOOP ANAK	180,000	37,500	82,500	300,000
46	COLON IN LOOP DEWASA	180,000	37,500	82,500	300,000
47	FOLLOWTHROUGH ANAK	300,000	62,500	137,500	500,000
48	FOLLOWTHROUGH DEWASA	360,000	75,000	165,000	600,000
	TANPA KONTRAS				
49	T-TUBE CHOLEDOCHOGRAFI	150,000	31,250	68,750	250,000
50	CYSTOGRAFI	120,000	25,000	55,000	200,000
51	DACRIOCYSTOGRAFI	120,000	25,000	55,000	200,000
52	OESOPHAGOGRAFI	120,000	25,000	55,000	200,000
53	FISTULOGRAFI	120,000	25,000	55,000	200,000
54	HSG	150,000	31,250	68,750	250,000
55	IVP ANAK	180,000	37,500	82,500	300,000
56	IVP DEWASA	240,000	50,000	110,000	400,000
57	RPG / APG	180,000	37,500	82,500	300,000
58	SIALOGRAFI	120,000	25,000	55,000	200,000
59	UGI ANAK	240,000	50,000	110,000	400,000
60	UGI DEWASA	300,000	62,500	137,500	500,000
61	URETHROGRAFI	120,000	25,000	55,000	200,000
62	URETHROCYSTOGRAFI	210,000	43,750	96,250	350,000
63	CAUDOGRAFI	240,000	50,000	110,000	400,000
64	MYELOGRAFI	240,000	50,000	110,000	400,000
65	PHLEBOGRAFI	360,000	75,000	165,000	600,000

NO	URAIAN TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK SPESIALIS	TARIF
	ULTRASONOGRAFI				
66	USG KANDUNGAN	48,000	10,000	22,000	80,000
67	USG KANDUNGAN DOPPLER	120,000	25,000	55,000	200,000
68	USG ABDOMEN	120,000	25,000	55,000	200,000
69	USG ABDOMEN DOPPLER	182,000	40,000	88,000	320,000
70	USG UPPER ABDOMEN	75,000	15,625	34,375	125,000
71	USG UPPER ABDOMEN DROPPER	135,000	28,125	61,875	225,000
72	USG LOWER ABDOMEN	60,000	12,500	27,500	100,000
73	USG LOWER ABDOMEN DROPPER	135,000	28,125	61,875	225,000
74	USG MAMMAE	90,000	18,750	41,250	150,000
75	USGMAMMAE DROPPER	120,000	25,000	55,000	200,000
76	USG THYROID / NECK	75,000	15,625	34,375	125,000
77	USG THYROID / NECK DROPPER	120,000	25,000	55,000	200,000
78	USG TRANSVAGINAL/RECTAL	90,000	18,750	41,250	150,000
79	USG TRANSVAGINAL/RECTAL DROPPER	120,000	25,000	55,000	200,000
80	USG TRANSVAGINAL OBGYN	90,000	18,750	41,250	150,000
81	USG KEPALA BAYI	108,000	22,500	49,500	180,000
82	USG TRANSCRANIAL DROPPER	210,000	43,750	96,250	350,000
83	USG MUCULO SCLLETAL	90,000	18,750	41,250	150,000
84	USG MUCULO SCLLETAL DROPPER	156,000	32,500	71,500	260,000
85	USG MATA	60,000	12,500	27,500	100,000
86	USG TESTIS / SCROTAL	60,000	12,500	27,500	100,000
86	USG TESTIS / SCROTAL DROPPER	120,000	25,000	55,000	200,000
	CT SCAN TANPA KONTRAS				
87	CT SCAN PLANNING (MARKER)				
88	CT SCAN KEPALA	270,000	56,250	123,750	450,000
89	CT SCAN ORBITA	270,000	56,250	123,750	450,000
90	CT SCAN TELINGA	270,000	56,250	123,750	450,000
91	CT SCAN SINUS PARANASALIS	270,000	56,250	123,750	450,000
92	CT SCAN NASO PHARYNGS	270,000	56,250	123,750	450,000
93	CT SCAN ABDOMEN ATAS-BAWAH	600,000	125,000	275,000	1,000,000
94	CT SCAN ABDOMEN ATAS	480,000	100,000	220,000	800,000
95	CT SCAN ABDOMEN BAWAH	480,000	100,000	220,000	800,000
96	CT SCAN THORAX	360,000	75,000	165,000	600,000
97	CT SCAN VERTEBRAE	380,000	81,250	178,750	650,000
98	CT SCAN GUIDING FNAB	240,000	50,000	110,000	400,000
99	CT SCAN EXTREMITAS	360,000	75,000	165,000	600,000
100	REKONSTRUKSI 3 D	210,000	43,750	96,250	350,000
	CT SCAN DENGAN KONTRAS				
101	CT SCAN KEPALA	360,000	75,000	165,000	600,000
102	CT SCAN ORBITA	360,000	75,000	165,000	600,000
103	CT SCAN TELINGA	360,000	75,000	165,000	600,000
104	CT SCAN NASO PHARYNGS	360,000	75,000	165,000	600,000
105	CT SCAN ABDOMEN ATAS-BAWAH	720,000	150,000	330,000	1,200,000
106	CT SCAN ABDOMEN ATAS	540,000	112,500	247,500	900,000
107	CT SCAN ABDOMEN BAWAH	540,000	112,500	247,500	900,000
108	CT SCAN THORAX	480,000	100,000	220,000	800,000
109	CT SCAN IVP	660,000	137,500	302,500	1,100,000

PEMERIKSAAN RADIOLOGI RAWAT INAP KELAS II DAN RAWAT JALAN

NO	URAIAN TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK SPESIALIS	TARIF
	EXTREMITAS ATAS				
1	MANUS SATU POSISI	27,600	9,200	9,200	46,000
2	WRIST 1 POSISI	27,600	9,200	9,200	46,000
3	ANTHEBRACHI 1 POSISI	27,600	9,200	9,200	46,000
4	ELBOW 1 POSISI	27,600	9,200	9,200	46,000
5	HUMERUS 1 POSISI	27,600	9,200	9,200	46,000
6	SHOULDER 1 POSISI	27,600	9,200	9,200	46,000
7	CLAVICULA 1 POSISI	27,600	9,200	9,200	46,000
8	SCAPULA 1 POSISI	27,600	9,200	9,200	46,000
9	BONE SURVEY	82,800	27,600	27,600	138,000
	EXTREMITAS BAWAH				
10	PEDIS 1 POSISI	27,600	9,200	9,200	46,000
11	ANKLE 1 POSISI	27,600	9,200	9,200	46,000
12	CRURIS 1 POSISI	31,050	10,350	10,350	51,750
13	GENU 1 POSISI	27,600	9,200	9,200	46,000
14	FEMUR 1 POSISI	31,050	10,350	10,350	51,750
15	HIP JOINT 1 POSISI	27,600	9,200	9,200	46,000
16	BONE SURVEY	89,700	29,900	29,900	149,500
	VERTEBRAE				
17	CERVICAL 1 POSISI	34,500	11,500	11,500	57,500
18	THORACO LUMBAL ANAK 1 POSISI	37,950	12,650	12,650	63,250
19	THORACO LUMBAL DEWASA 1 POSISI	44,850	14,950	14,950	74,750
20	LUMBO SACRAL ANAK 1 POSISI	37,950	12,650	12,650	63,250
21	LUMBO SACRAL DEWASA 1 POSISI	44,850	14,950	14,950	74,750
22	SACRUM 1 POSISI	34,500	11,500	11,500	57,500
	SKULL				
23	SKULL ANAK 1 POSISI	34,500	11,500	11,500	57,500
24	SKULL DEWASA 1 POSISI	34,500	11,500	11,500	57,500
25	BASIS CRANI/TOWNE 1 POSISI	34,500	11,500	11,500	57,500
26	EISHLER 1 POSISI	34,500	11,500	11,500	57,500
27	MASTOID/SCHULLER 1 POSISI	34,500	11,500	11,500	57,500
28	NASAL	34,500	11,500	11,500	57,500
29	RHEZEE/ FOR OPTIUM 1 POSISI	34,500	11,500	11,500	57,500
30	SELLA TURSICA 1 POSISI	34,500	11,500	11,500	57,500
31	STENVERS 1 POSISI	34,500	11,500	11,500	57,500
32	TMJ 2 POSISI	55,200	18,400	18,400	92,000
33	WATER'S	34,500	11,500	11,500	57,500

NO	URAIAN TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK SPESIALIS	TARIF
	THORAX				
34	THORAX BAYI / ANAK 1 POSISI	31,050	10,350	10,350	51,750
35	THORAX DEWASA 1 POSISI	37,950	12,650	12,650	63,250
34	STERNUM 1 POSISI	37,950	12,650	12,650	63,250
35	TOP LORAUTIC	37,950	12,650	12,650	63,250
	BOF				
36	BOF ANAK 1 POSISI	37,950	12,650	12,650	63,250
37	BOF DEWASA 1 POSISI	44,850	14,950	14,950	74,750
38	PELVIS ANAK 1 POSISI	37,950	12,650	12,650	63,250
39	PELVIS DEWASA 1 POSISI	44,850	14,950	14,950	74,750
40	TOMOGRAM GINJAL	69,000	23,000	23,000	115,000
	DENTAL				
41	DENTAL	20,700	6,900	6,900	34,500
42	PANORAMIC	69,000	14,375	31,625	115,000
	PEMERIKSAAN KONTRAS				
	DENGAN KONTRAS				
43	APPENDICOGRAFI	103,500	21,563	47,438	172,500
44	PHARYNGO-OESOPHAGOGRAFI	138,000	28,750	63,250	230,000
45	COLON IN LOOP ANAK	207,000	43,125	94,875	345,000
46	COLON IN LOOP DEWASA	207,000	43,125	94,875	345,000
47	FOLLOWTHROUGH ANAK	345,000	71,875	158,125	575,000
48	FOLLOWTHROUGH DEWASA	414,000	86,250	189,750	690,000
	TANPA KONTRAS				
49	T-TUBE CHOLEDOCHOGRAFI	172,500	35,938	79,063	287,500
50	CYSTOGRAFI	138,000	28,750	63,250	230,000
51	DACRIOCYSTOGRAFI	138,000	28,750	63,250	230,000
52	OESOPHAGOGRAFI	138,000	28,750	63,250	230,000
53	FISTULOGRAFI	138,000	28,750	63,250	230,000
54	HSG	172,500	35,938	79,063	287,500
55	IVP ANAK	207,000	43,125	94,875	345,000
56	IVP DEWASA	276,000	57,500	126,500	460,000
57	RPG / APG	207,000	43,125	94,875	345,000
58	SIALOGRAFI	138,000	28,750	63,250	230,000
59	UGI ANAK	276,000	57,500	126,500	460,000
60	UGI DEWASA	345,000	71,875	158,125	575,000
61	URETHROGRAFI	138,000	28,750	63,250	230,000
62	URETHROCYSTOGRAFI	241,500	50,313	110,688	402,500
63	CAUDOGRAFI	276,000	57,500	126,500	460,000
64	MYELOGRAFI	276,000	57,500	126,500	460,000
65	PHLEBOGRAFI	414,000	86,250	189,750	690,000

NO	URAIAN TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK SPESIALIS	TARIF
	ULTRASONOGRAFI				
66	USG KANDUNGAN	55,200	11,500	25,300	92,000
67	USG KANDUNGAN DOPPLER	138,000	28,750	63,250	230,000
68	USG ABDOMEN	138,000	28,750	63,250	230,000
69	USG ABDOMEN DOPPLER	220,800	46,000	101,200	368,000
70	USG UPPER ABDOMEN	86,250	17,969	39,531	143,750
71	USG UPPER ABDOMEN DROPPER	155,250	32,344	71,156	258,750
72	USG LOWER ABDOMEN	69,000	14,375	31,625	115,000
73	USG LOWER ABDOMEN DROPPER	155,250	32,344	71,156	258,750
74	USG MAMMAE	103,500	21,563	47,438	172,500
75	USGMAMMAE DROPPER	138,000	28,750	63,250	230,000
76	USG THYROID / NECK	86,250	17,969	39,531	143,750
77	USG THYROID / NECK DROPPER	138,000	28,750	63,250	230,000
78	USG TRANSVAGINAL/RECTAL	103,500	21,563	47,438	172,500
79	USG TRANSVAGINAL/RECTAL DROPPER	138,000	28,750	63,250	230,000
80	USG TRANSVAGINAL OBGYN	103,500	21,563	47,438	172,500
81	USG KEPALA BAYI	124,200	25,875	56,925	207,000
82	USG TRANSCRANIAL DROPPER	241,500	50,313	110,688	402,500
83	USG MUCULO SCKETAL	103,500	21,563	47,438	172,500
84	USG MUCULO SCKETAL DROPPER	179,400	37,375	82,225	299,000
85	USG MATA	69,000	14,375	31,625	115,000
86	USG TESTIS / SCROTAL	69,000	14,375	31,625	115,000
86	USG TESTIS / SCROTAL DROPPER	138,000	28,750	63,250	230,000
	CT SCAN TANPA KONTRAS				
87	CT SCAN PLANNING (MARKER)				
88	CT SCAN KEPALA	310,500	64,688	142,313	517,500
89	CT SCAN ORBITA	310,500	64,688	142,313	517,500
90	CT SCAN TELINGA	310,500	64,688	142,313	517,500
91	CT SCAN SINUS PARANASALIS	310,500	64,688	142,313	517,500
92	CT SC AN NASO PHARYNGS	310,500	64,688	142,313	517,500
93	CT SCAN ABDOMEN ATAS-BAWAH	690,000	143,750	316,250	1,150,000
94	CT SCAN ABDOMEN ATAS	552,000	115,000	253,000	920,000
95	CT SCAN ABDOMEN BAWAH	552,000	115,000	253,000	920,000
96	CT SCAN THORAX	414,000	86,250	189,750	690,000
97	CT SCAN VERTEBRAE	448,500	93,438	205,563	747,500
98	CT SCAN GUIDING FNAB	276,000	57,500	126,500	460,000
99	CT SCAN EXTREMITAS	414,000	86,250	189,750	690,000
100	REKONSTRUKSI 3 D	241,500	50,313	110,688	402,500
	CT SCAN DENGAN KONTRAS				
101	CT SCAN KEPALA	414,000	86,250	189,750	690,000
102	CT SCAN ORBITA	414,000	86,250	189,750	690,000
103	CT SCAN TELINGA	414,000	86,250	189,750	690,000
104	CT SCAN NASO PHARYNGS	414,000	86,250	189,750	690,000
105	CT SCAN ABDOMEN ATAS-BAWAH	828,000	172,500	379,500	1,380,000
106	CT SCAN ABDOMEN ATAS	621,000	129,375	284,625	1,035,000
107	CT SCAN ABDOMEN BAWAH	621,000	129,375	284,625	1,035,000
108	CT SCAN THORAX	552,000	115,000	253,000	920,000
109	CT SCAN IVP	759,000	158,125	347,875	1,265,000

PEMERIKSAAN RADIOLOGI RAWAT INAP KELAS I

NO	URAIAN TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK SPESIALIS	TARIF
	EXTREMITAS ATAS				
1	MANUS SATU POSISI	32,400	10,800	10,800	54,000
2	WRIST 1 POSISI	32,400	10,800	10,800	54,000
3	ANTHEBRACHI 1 POSISI	32,400	10,800	10,800	54,000
4	ELBOW 1 POSISI	32,400	10,800	10,800	54,000
5	HUMERUS 1 POSISI	32,400	10,800	10,800	54,000
6	SHOULDER 1 POSISI	32,400	10,800	10,800	54,000
7	CLAVICULA 1 POSISI	32,400	10,800	10,800	54,000
8	SCAPULA 1 POSISI	32,400	10,800	10,800	54,000
9	BONE SURVEY	97,200	32,400	32,400	162,000
	EXTREMITAS BAWAH				
10	PEDIS 1 POSISI	32,400	10,800	10,800	54,000
11	ANKLE 1 POSISI	32,400	10,800	10,800	54,000
12	CRURIS 1 POSISI	36,450	12,150	12,150	60,750
13	GENU 1 POSISI	32,400	10,800	10,800	54,000
14	FEMUR 1 POSISI	36,450	12,150	12,150	60,750
15	HIP JOINT 1 POSISI	32,400	10,800	10,800	54,000
16	BONE SURVEY	105,300	35,100	35,100	175,500
	VERTEBRAE				
17	CERVICAL 1 POSISI	40,500	13,500	13,500	67,500
18	THORACO LUMBAL ANAK 1	44,550	14,850	14,850	74,250
19	THORACO LUMBAL DEWAS	52,650	17,550	17,550	87,750
20	LUMBO SACRAL ANAK1 PO	44,550	14,850	14,850	74,250
21	LUMBO SACRAL DEWASA1	52,650	17,550	17,550	87,750
22	SACRUM 1 POSISI	40,500	13,500	13,500	67,500

NO	URAIAN TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK SPESIALIS	TARIF
	SKULL				
23	SKULL ANAK 1 POSISI	40,500	13,500	13,500	67,500
24	SKULL DEWASA 1 POSISI	40,500	13,500	13,500	67,500
25	BASIS CRANI/TOWNE 1 POSISI	40,500	13,500	13,500	67,500
26	EISHLER 1 POSISI	40,500	13,500	13,500	67,500
27	MASTOID/SCHULLER 1 POSISI	40,500	13,500	13,500	67,500
28	NASAL	40,500	13,500	13,500	67,500
29	RHEZEE/ FOR OPTIUM 1 POSISI	40,500	13,500	13,500	67,500
30	SELLA TURSICA 1 POSISI	40,500	13,500	13,500	67,500
31	STENVERS 1 POSISI	40,500	13,500	13,500	67,500
32	TMJ 2 POSISI	64,800	21,600	21,600	108,000
33	WATER'S	40,500	13,500	13,500	67,500
	THORAX				
34	THORAX BAYI / ANAK 1 POSISI	36,450	12,150	12,150	60,750
35	THORAX DEWASA 1 POSISI	44,550	14,850	14,850	74,250
34	STERNUM 1 POSISI	44,550	14,850	14,850	74,250
35	TOP LORAUTIC	44,550	14,850	14,850	74,250
	BOF				
36	BOF ANAK 1 POSISI	44,550	14,850	14,850	74,250
37	BOF DEWASA 1 POSISI	52,650	17,550	17,550	87,750
38	PELVIS ANAK 1 POSISI	44,550	14,850	14,850	74,250
39	PELVIS DEWASA 1 POSISI	52,650	17,550	17,550	87,750
40	TOMOGRAM GINJAL	81,000	27,000	27,000	135,000
	DENTAL				
41	DENTAL	24,300	8,100	8,100	40,500
42	PANORAMIC	81,000	16,875	37,125	135,000
	PEMERIKSAAN KONTRAS				
43	DENGAN KONTRAS APPENDICOGRAFI	121,500	25,313	55,688	202,500
44	PHARYNGO-OESOPHAGOG	162,000	33,750	74,250	270,000
45	COLON IN LOOP ANAK	243,000	50,625	111,375	405,000
46	COLON IN LOOP DEWASA	243,000	50,625	111,375	405,000
47	FOLLOWTHROUGH ANAK	405,000	84,375	185,625	675,000
48	FOLLOWTHROUGH DEWASA	486,000	101,250	222,750	810,000

NO	URAIAN TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK SPESIALIS	TARIF
	TANPA KONTRAS				
49	T-TUBE CHOLEDOCHOGRAFI	202,500	42,188	92,813	337,500
50	CYSTOGRAFI	162,000	33,750	74,250	270,000
51	DACRIOCYSTOGRAFI	162,000	33,750	74,250	270,000
52	OESOPHAGOGRAFI	162,000	33,750	74,250	270,000
53	FISTULOGRAFI	162,000	33,750	74,250	270,000
54	HSG	202,500	42,188	92,813	337,500
55	IVP ANAK	243,000	50,625	111,375	405,000
56	IVP DEWASA	324,000	67,500	148,500	540,000
57	RPG / APG	243,000	50,625	111,375	405,000
58	SIALOGRAFI	162,000	33,750	74,250	270,000
59	UGI ANAK	324,000	67,500	148,500	540,000
60	UGI DEWASA	405,000	84,375	185,625	675,000
61	URETHROGRAFI	162,000	33,750	74,250	270,000
62	URETHROCISTOGRAFI	283,500	59,063	129,938	472,500
63	CAUDOGRAFI	324,000	67,500	148,500	540,000
64	MYELOGRAFI	324,000	67,500	148,500	540,000
65	PHLEBOGRAFI	486,000	101,250	222,750	810,000
	ULTRASONOGRAFI				
66	USG KANDUNGAN	64,800	13,500	29,700	108,000
67	USG KANDUNGAN DOOPPLER	162,000	33,750	74,250	270,000
68	USG ABDOMEN	162,000	33,750	74,250	270,000
69	USG ABDOMEN DOPPLER	259,200	54,000	118,800	432,000
70	USG UPPER ABDOMEN	101,250	21,094	46,406	168,750
71	USG UPPER ABDOMEN DROPLER	182,250	37,969	83,531	303,750
72	USG LOWER ABDOMEN	81,000	16,875	37,125	135,000
73	USG LOWER ABDOMEN DROPLER	182,250	37,969	83,531	303,750
74	USG MAMMAE	121,500	25,313	55,688	202,500
75	USGMAMMAE DROPPER	162,000	33,750	74,250	270,000
76	USG THYROID / NECK	101,250	21,094	46,406	168,750
77	USG THYROID / NECK DROPLER	162,000	33,750	74,250	270,000
78	USG TRANSVAGINAL/RECTAL	121,500	25,313	55,688	202,500
79	USG TRANSVAGINAL/RECTAL DROPLER	162,000	33,750	74,250	270,000
80	USG TRANSVAGINAL OBGYN	121,500	25,313	55,688	202,500
81	USG KEPALA BAYI	145,800	30,375	66,825	243,000
82	USG TRANSCRANIAL DROPLER	283,500	59,063	129,938	472,500
83	USG MUCULO SCLLETAL	121,500	25,313	55,688	202,500
84	USG MUCULO SCLLETAL DROPLER	210,600	43,875	96,525	351,000
85	USG MATA	81,000	16,875	37,125	135,000
86	USG TESTIS / SCROTAL	81,000	16,875	37,125	135,000
87	USG TESTIS / SCROTAL DROPLER	162,000	33,750	74,250	270,000

NO	URAIAN TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK SPESIALIS	TARIF
	CT SCAN TANPA KONTRAS				
88	CT SCAN PLANNING (MARKER)				
89	CT SCAN KEPALA	364,500	75,938	167,063	607,500
90	CT SCAN ORBITA	364,500	75,938	167,063	607,500
91	CT SCAN TELINGA	364,500	75,938	167,063	607,500
92	CT SCAN SINUS PARANASA	364,500	75,938	167,063	607,500
93	CT SC AN NASO PHARYNGS	364,500	75,938	167,063	607,500
94	CT SCAN ABDOMEN ATAS-B	810,000	168,750	371,250	1,350,000
95	CT SCAN ABDOMEN ATAS	648,000	135,000	297,000	1,080,000
96	CT SCAN ABDOMEN BAWAH	648,000	135,000	297,000	1,080,000
97	CT SCAN THORAX	486,000	101,250	222,750	810,000
98	CT SCAN VERTEBRAE	526,500	109,688	241,313	877,500
99	CT SCAN GUIDING FNAB	324,000	67,500	148,500	540,000
100	CT SCAN EXTREMITAS	486,000	101,250	222,750	810,000
101	REKONSTRUKSI 3 D	283,500	59,063	129,938	472,500
	CT SCAN DENGAN KONTRAS				
102	CT SCAN KEPALA	486,000	101,250	222,750	810,000
103	CT SCAN ORBITA	486,000	101,250	222,750	810,000
104	CT SCAN TELINGA	486,000	101,250	222,750	810,000
105	CT SCAN NASO PHARYNGS	486,000	101,250	222,750	810,000
106	CT SCAN ABDOMEN ATAS-B	972,000	202,500	445,500	1,620,000
107	CT SCAN ABDOMEN ATAS	729,000	151,875	334,125	1,215,000
108	CT SCAN ABDOMEN BAWAH	729,000	151,875	334,125	1,215,000
109	CT SCAN THORAX	648,000	135,000	297,000	1,080,000
110	CT SCAN IVP	891,000	185,625	408,375	1,485,000

PEMERIKSAAN RADIOLOGI RAWAT INAP KELAS UTAMA

NO	URAIAN TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK SPESIALIS	TARIF
	EXTREMITAS ATAS				
1	MANUS SATU POSISI	36,000	12,000	12,000	60,000
2	WRIST 1 POSISI	36,000	12,000	12,000	60,000
3	ANTHEBRACHI 1 POSISI	36,000	12,000	12,000	60,000
4	ELBOW 1 POSISI	36,000	12,000	12,000	60,000
5	HUMERUS 1 POSISI	36,000	12,000	12,000	60,000
6	SHOULDER 1 POSISI	36,000	12,000	12,000	60,000
7	CLAVIGULA 1 POSISI	36,000	12,000	12,000	60,000
8	SCAPULA 1 POSISI	36,000	12,000	12,000	60,000
9	BONE SURVEY	108,000	36,000	36,000	180,000
	EXTREMITAS BAWAH				
10	PEDIS 1 POSISI	36,000	12,000	12,000	60,000
11	ANKLE 1 POSISI	36,000	12,000	12,000	60,000
12	CRURIS 1 POSISI	40,500	13,500	13,500	67,500
13	GENU 1 POSISI	36,000	12,000	12,000	60,000
14	FEMUR 1 POSISI	40,500	13,500	13,500	67,500
15	HIP JOINT 1 POSISI	36,000	12,000	12,000	60,000
16	BONE SURVEY	117,000	39,000	39,000	195,000
	VERTEBRAE				
17	CERVICAL 1 POSISI	45,000	15,000	15,000	75,000
18	THORACO LUMBAL ANAK	49,500	16,500	16,500	82,500
19	THORACO LUMBAL DEWASA	58,500	19,500	19,500	97,500
20	LUMBO SACRAL ANAK 1 PO	49,500	16,500	16,500	82,500
21	LUMBO SACRAL DEWASA 1	58,500	19,500	19,500	97,500
22	SACRUM 1 POSISI	45,000	15,000	15,000	75,000
	SKULL				
23	SKULL ANAK 1 POSISI	45,000	15,000	15,000	75,000
24	SKULL DEWASA 1 POSISI	45,000	15,000	15,000	75,000
25	BASIS CRANI/TOWNE 1 PO	45,000	15,000	15,000	75,000
26	EISHLER 1 POSISI	45,000	15,000	15,000	75,000
27	MASTOID/SCHULLER 1 PO	45,000	15,000	15,000	75,000
28	NASAL	45,000	15,000	15,000	75,000
29	RHEZEE/ FOR OPTIUM 1 P	45,000	15,000	15,000	75,000
30	SELLA TURSICA 1 POSISI	45,000	15,000	15,000	75,000
31	STENVERS 1 POSISI	45,000	15,000	15,000	75,000
32	TMJ 2 POSISI	72,000	24,000	24,000	120,000
33	WATER'S	45,000	15,000	15,000	75,000
	THORAX				
34	THORAX BAYI / ANAK 1 PO	40,500	13,500	13,500	67,500
35	THORAX DEWASA 1 POSIS	49,500	16,500	16,500	82,500
34	STERNUM 1 POSISI	49,500	16,500	16,500	82,500
35	TOP LORAUTIC	49,500	16,500	16,500	82,500

NO	URAIAN TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK SPESIALIS	TARIF
	BOF				
36	BOF ANAK 1 POSISI	49,500	16,500	16,500	82,500
37	BOF DEWASA 1 POSISI	58,500	19,500	19,500	97,500
38	PELVIS ANAK 1 POSISI	49,500	16,500	16,500	82,500
39	PELVIS DEWASA 1 POSISI	58,500	19,500	19,500	97,500
40	TOMOGRAM GINJAL	90,000	30,000	30,000	150,000
	DENTAL				
41	DENTAL	27,000	9,000	9,000	45,000
42	PANORAMIC	90,000	18,750	41,250	150,000
	PEMERIKSAAN KONTRAS DENGAN KONTRAS				
43	APPENDICOGRAFI	136,000	28,125	61,875	225,000
44	PHARYNGO-OESOPHAGOGRAFI	180,000	37,500	82,500	300,000
45	COLON IN LOOP ANAK	270,000	56,250	123,750	450,000
46	COLON IN LOOP DEWASA	270,000	56,250	123,750	450,000
47	FOLLOWTHROUGH ANAK	450,000	93,750	206,250	750,000
48	FOLLOWTHROUGH DEWASA	540,000	112,500	247,500	900,000
	TANPA KONTRAS				
49	T-TUBE CHOLEDOCHOGRAFI	225,000	46,875	103,125	375,000
50	CYSTOGRAFI	180,000	37,500	82,500	300,000
51	DACRIOCYSTOGRAFI	180,000	37,500	82,500	300,000
52	OESOPHAGOGRAFI	180,000	37,500	82,500	300,000
53	FISTULOGRAFI	180,000	37,500	82,500	300,000
54	HSG	225,000	46,875	103,125	375,000
55	IVP ANAK	270,000	56,250	123,750	450,000
56	IVP DEWASA	360,000	75,000	165,000	600,000
57	RPG / APG	270,000	56,250	123,750	450,000
58	SIALOGRAFI	270,000	56,250	123,750	450,000
59	UGI ANAK	360,000	75,000	165,000	600,000
60	UGI DEWASA	450,000	93,750	206,250	750,000
61	URETHROGRAFI	180,000	37,500	82,500	300,000
62	URETHROCYSTOGRAFI	315,000	65,625	144,375	525,000
63	CAUDOGRAM	360,000	75,000	165,000	600,000
64	MYELOGRAFI	360,000	75,000	165,000	600,000
65	PHLEBOGRAFI	540,000	112,500	247,500	900,000
	ULTRASONOGRAFI				
66	USG KANDUNGAN	72,000	15,000	33,000	120,000
67	USG KANDUNGAN DOOPPEL	180,000	37,500	82,500	300,000
68	USG ABDOMEN	180,000	37,500	82,500	300,000
69	USG ABDOMEN DOPPLER	288,000	60,000	132,000	480,000
70	USG UPPER ABDOMEN	112,500	23,438	51,563	187,500
71	USG UPPER ABDOMEN DR	202,500	42,188	92,813	337,500
72	USG LOWER ABDOMEN	90,000	18,750	41,250	150,000
73	USG LOWER ABDOMEN DR	202,500	42,188	92,813	337,500
74	USG MAMMAE	135,000	28,125	61,875	225,000
75	USGMAMMAE DROPPER	180,000	37,500	82,500	300,000
76	USG THYROID / NECK	112,500	23,438	51,563	187,500

NO	URAIAN TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK SPESIALIS	TARIF
77	USG THYROID / NECK DRO	180,000	37,500	82,500	300,000
78	USG TRANSVAGINAL/RECT	135,000	28,125	61,875	225,000
79	USG TRANSVAGINAL/RECT	180,000	37,500	82,500	300,000
80	USG TRANSVAGINAL OBGY	135,000	28,125	61,875	225,000
81	USG KEPALA BAYI	182,000	33,750	74,250	270,000
82	USG TRANSCRANIAL DROF	315,000	65,625	144,375	525,000
83	USG MUCULO SCLETAL	135,000	28,125	61,875	225,000
84	USG MUCULO SCLETAL DF	234,000	48,750	107,250	390,000
85	USG MATA	90,000	18,750	41,250	150,000
86	USG TESTIS / SCROTAL	90,000	18,750	41,250	150,000
87	USG TESTIS / SCROTAL DF	180,000	37,500	82,500	300,000
	CT SCAN TANPA KONTRAS				
88	CT SCAN PLANNING (MARKER)				
89	CT SCAN KEPALA	405,000	84,375	185,625	675,000
90	CT SCAN ORBITA	405,000	84,375	185,625	675,000
91	CT SCAN TELINGA	405,000	84,375	185,625	675,000
92	CT SCAN SINUS PARANAS	405,000	84,375	185,625	675,000
93	CT SC AN NASO PHARYNG	405,000	84,375	185,625	675,000
94	CT SCAN ABDOMEN ATAS	900,000	187,500	412,500	1,500,000
95	CT SCAN ABDOMEN ATAS	720,000	150,000	330,000	1,200,000
96	CT SCAN ABDOMEN BAWA	720,000	150,000	330,000	1,200,000
97	CT SCAN THORAX	540,000	112,500	247,500	900,000
98	CT SCAN VERTEBRAE	585,000	121,875	268,125	975,000
99	CT SCAN GUIDING FNAB	360,000	75,000	165,000	600,000
100	CT SCAN EXTREMITAS	540,000	112,500	247,500	900,000
101	REKONSTRUKSI 3 D	315,000	65,625	144,375	525,000
	CT SCAN DENGAN KONTRAS				
102	CT SCAN KEPALA	540,000	112,500	247,500	900,000
103	CT SCAN ORBITA	540,000	112,500	247,500	900,000
104	CT SCAN TELINGA	540,000	112,500	247,500	900,000
105	CT SCAN NASO PHARYNGS	540,000	112,500	247,500	900,000
106	CT SCAN ABDOMEN ATAS	1,080,000	225,000	495,000	1,800,000
107	CT SCAN ABDOMEN ATAS	810,000	168,750	371,250	1,350,000
108	CT SCAN ABDOMEN BAWA	810,000	168,750	371,250	1,350,000
109	CT SCAN THORAX	720,000	150,000	330,000	1,200,000
110	CT SCAN IVP	990,000	206,250	453,750	1,650,000

E. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Rancangan Peraturan Daerah

Pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Mohamad Soewandhie sejak Tahun 2008 didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan belum mengalami perubahan. Dengan adanya penambahan jenis pelayanan kesehatan dan kenaikan cost pelayanan kesehatan yang sudah berlangsung 10 tahun, maka untuk melakukan penyesuaian harga dan melegitimasi penarikan retribusi terhadap jenis pelayanan yang baru, maka ditetapkannya rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III di RSUD dr. Mohamad Soewandhie.

Penetapan rancangan peraturan daerah Kota Surabaya tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III di RSUD dr. Mohamad Soewandhie harus diikuti dengan pencabutan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie. Tujuan pencabutan ini agar tidak terjadi ketentuan ganda terkait dengan besaran tariff pelayanan kesehatan kelas III di RSUD dr. Mohamad Soewandhie.

Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie membawa konsekuensi terhadap ketentuan retribusi pelayanan kesehatan di Kelas II, Kelas I, Kelas VIP dan kelas VVIP yang ikut tercabut, oleh karena itu sebelum penetapan rancangan peraturan daerah ini, maka Pemerintah Kota Surabaya sudah menyiapkan rancangan Peraturan Walikota Surabaya tentang pembiayaan pelayanan kesehatan kelas II, Kelas I, VIP dan VVIP. Hal ini mencegah terjadinya kekosongan hukum bila dilakukan pencabutan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Tenaga Kesehatan

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan dalam Naskah Akademik ini adalah dasar yuridis yang menjadi pertimbangan dalam kerangka kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatur pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dalam mengatur perizinan tenaga kesehatan. Evaluasi dan analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

3.1. Pengaturan Wewenang Pemerintah Kota Dalam Penarikan Retribusi Pelayanan Kesehatan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), mencantumkan bahwa pemerintah daerah sebagai penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas berwenang menarik retribusi pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 111 PDRD mencantumkan objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Yang dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Pasal 152 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, biaya tersebut meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Berdasarkan Pasal 155 ayat (1) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicantumkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dimana peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, Sesuai dengan ketentuan tersebut Pemerintah Kota Surabaya belum melakukan peninjauan kembali tarif retribusi pelayanan kesehatan, dimana Pemerintah Kota Surabaya memandang bahwa pelayanan kesehatan merupakan urusan wajib pemerintah Kota Surabaya yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan memperhatikan kemampuan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah yang mampu melakukan subsidi. Dengan adanya penambahan beberapa jenis pelayanan kesehatan yang penarikan retribusinya belum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie, maka Pemerintah Kota Surabaya ingin melakukan Perubahan tarif dan penambahan jenis pelayanan kesehatan yang dapat ditarik retribusi.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dicantumkan bahwa Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan

penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Sesuai Pasal 21 dicantumkan bahwa komponen standar pelayanan salah satunya meliputi biaya atau tariff, sehingga biaya atau tariff harus disebutkan secara benar dan jelas. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang biaya atau tariff. Hal ini sesuai dengan pengertian Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Berdasarkan Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dicantumkan bahwa Pemerintah menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan, dimana Pembiayaan pelayanan kesehatan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), atau bantuan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bantuan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah salah satunya berupa Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 110 ayat (1).

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dicantumkan bahwa pembiayaan rumah sakit dapat bersumber dari penerimaan rumah sakit, anggaran pemerintah, subsidi pemerintah, anggaran pemerintah daerah, subsidi pemerintah daerah atau sumber

lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari aspek pembiayaan bahwa Rumah Sakit memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan yang cukup dan berkesinambungan, oleh karena itu pembiayaan rumah sakit milik pemerintah daerah (RSUD) tidak cukup hanya dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tetapi juga diperoleh dari masyarakat melalui biaya pengobatan yang berdasarkan Pasal 110 ayat (1) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebut Retribusi Pelayanan Kesehatan. Antisipasi dampak globalisasi perlu didukung dengan peraturan perundang-undangan yang memadai.

Berdasarkan Pasal 49 UU Rumah Sakit mencantumkan bahwa Penetapan besaran tarif rumah sakit harus berdasarkan pola tarif nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, dimana pola tarif nasional berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan dan dengan memperhatikan kondisi regional. Sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) UU Rumah Sakit, maka Besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Pasal 9 dinyatakan bahwa Urusan pemerintahan dibagi dalam 3 bentuk, yaitu : urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Sedangkan urusan konkuren merupakan

urusan pemerintahan yang menjadi dasar adanya otonomi daerah, karena urusan konkuren ini akan membagi urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintah, urusan pemerintah provinsi dan urusan pemerintah kabupaten/kota, dimana rincian pembagian urusan pemerintahan tercantum dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam urusan konkuren yang dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan, dimana urusan pemerintahan wajib ini dibagi lagi menjadi urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan urusan wajib. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dengan demikian ada kewajiban bagi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan berbagai tindak pemerintahan dan kebijakan untuk melakukan pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan.

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit

Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit mencantumkan bahwa tarif rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ditetapkan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya, namun harus mengikuti ketentuan Menteri Kesehatan atau pemerintahan daerah

paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

3.2 Peraturan Perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya produk hukum daerah, maka peraturan perundang-undangan yang perlu ditelaah meliputi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan yang mengatur tentang hirarkhi jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia serta memberi kewenangan kepada pembentuk peraturan sesuai dengan muatan materi dan jenis hirarkhinya.
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 merupakan penjabaran dan pedoman bagi pemerintah dalam membentuk peraturan perundang-undangan, hal ini terkait dengan mekanisme dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 2014 merupakan salah satu NSPK dari Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota dalam membentuk produk hukum daerah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi untuk penyelenggaraan pemerintah daerah. Produk Hukum daerah meliputi Peraturan dan keputusan, dimana dalam membentuk

kedua figure hukum tersebut diperlukan kemampuan dan ketrampilan, sehingga perlu diberikan pedoman bagi para penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menyusunnya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Secara filosofis, negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, termasuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat, khususnya pemenuhan Hak setiap orang untuk mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Dalam hal ini, posisi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dari pengguna layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan kesehatan dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak atau pungutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan menjadi tugas negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah dalam melakukan pelayanan publik sebagai bentuk dari tanggungjawab negara untuk memajukan kesejahteraan umum telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan peraturan yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun oleh masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 UU Pelayanan Publik telah dicantumkan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi :

1. pelayanan barang publik;
2. jasa public;
3. pelayanan administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Maksud dari pelayanan administrasi sesuai dengan penjelasan Pasal 5 ayat (7) yang dimaksud dengan tindakan administratif pemerintah merupakan pelayanan pemberian dokumen oleh pemerintah, antara lain yang dimulai dari seseorang yang lahir memperoleh akta kelahiran hingga meninggal dan memperoleh akta kematian, termasuk segala hal ihwal yang diperlukan oleh penduduk dalam menjalani kehidupannya, seperti memperoleh izin mendirikan bangunan, izin usaha, sertifikat tanah, dan surat nikah. Dengan demikian pelayanan perizinan merupakan salah satu bentuk dari pelayanan publik.

Seiring dengan tugas negara sebagaimana tersebut di atas, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas pelayanan perizinan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Tanggungjawab pemerintah untuk menyediakan sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kemampuan dan kewenangan di bidang kesehatan, dilakukan melalui penerbitan perizinan bagi tenaga kesehatan dengan tujuan pemberian izin ini dapat memberikan jaminan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan dari tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan dan kewenangan.

Tanggungjawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan juga harus didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana, sehingga sesuai dengan Pasal 6 UU Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Kepala daerah adalah Pembina dan penanggung jawab pelayanan publik di daerahnya yang memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan

publik. Sedangkan dalam Pasal 33, dinyatakan bahwa dalam hal penyelenggaraan publik dilakukan oleh institusi pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh undang-undang, Negara wajib mengalokasikan anggaran dana yang memadai melalui APBN dan atau APBD

4.2 Landasan Sosiologis

A. Kondisi Geografis

Secara geografis Kota Surabaya terletak pada $7^{\circ} 21'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 36' - 112^{\circ} 54'$ Bujur Timur dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Selat Madura
- Sebelah Selatan: Kabupaten Sidoarjo
- Sebelah Barat : Kabupaten Gresik.

Kota Surabaya memiliki luas wilayah kurang lebih $330,48 \text{ km}^2$ yang terbagi atas 5 wilayah pembantuan Walikota, yaitu : Surabaya Selatan, Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Barat, dan Surabaya Pusat yang terdiri 31 Kecamatan dengan 154 Kelurahan. Topografi regional Kota Surabaya memiliki ketinggian tanah sekitar 0–30 m di atas permukaan laut dan di bagian daerah pantai memiliki ketinggian 1–3 m di atas permukaan laut dan sebagian lagi lebih rendah dari permukaan laut. Secara keseluruhan ketinggian daerah Kota Surabaya terbagi dalam 2, yaitu:

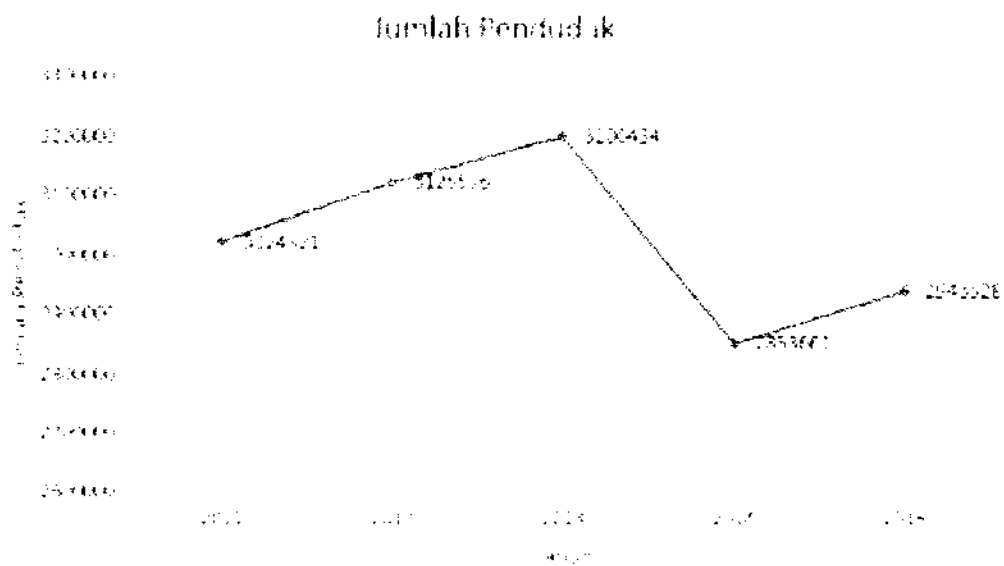
- Ketinggian lebih dari 20 meter sekitar 12,76 % di wilayah Karang Pilang;
- Ketinggian 0–10 sekitar 80,7% di wilayah Timur, Utara, Selatan, dan Pusat;
- Ketinggian 10–20 m sekitar 12,53% di wilayah Barat dan Selatan.

Kondisi geografis Surabaya tergambar dalam Peta di bawah ini :

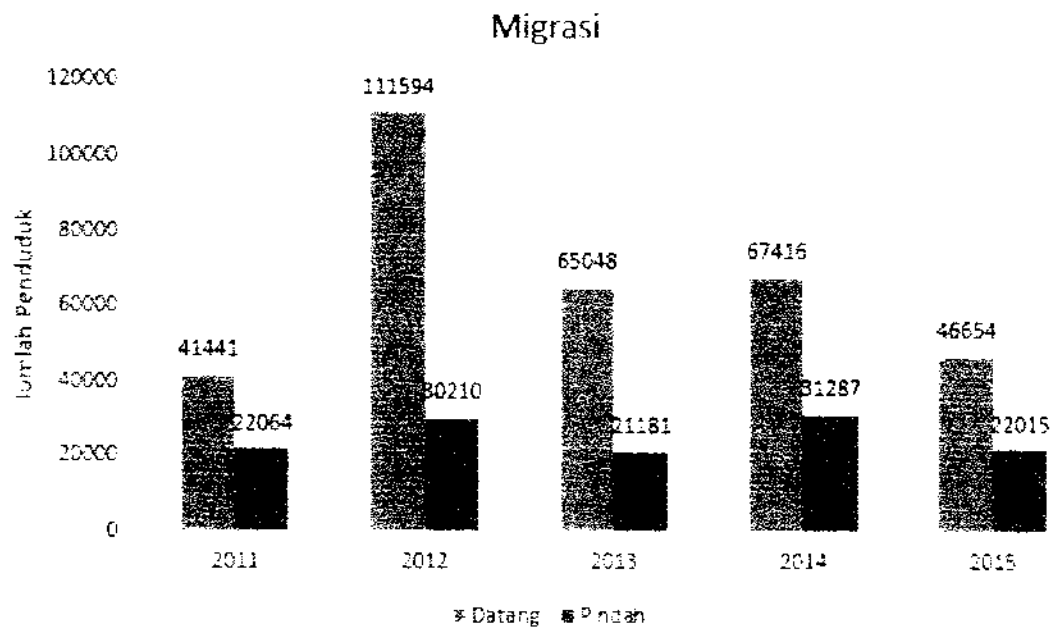


B. Demografi

Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta, sehingga jumlah penduduk di Kota Surabaya juga tinggi. Banyak faktor yang mendukung penambahan jumlah penduduk, yaitu kelahiran dan penduduk yang datang. Berikut merupakan jumlah penduduk dari Tahun 2011-2015 berdasarkan Data BPS



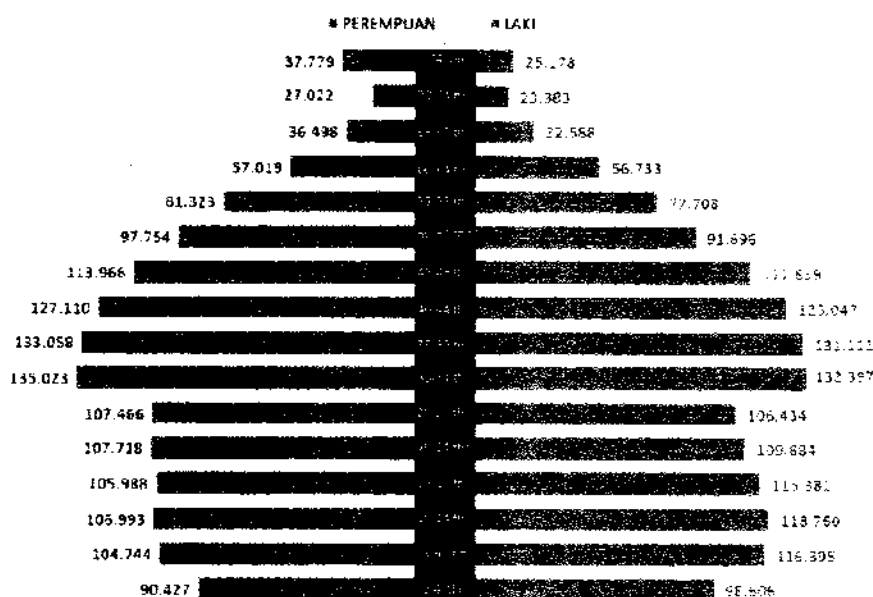
Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Timur, migrasi merupakan hal yang biasa. Tingkat migrasi di Kota Surabaya sangat tinggi, banyak penduduk yang datang dengan berbagai macam tujuan, baik mencari pekerjaan atau bersekolah. Berdasarkan data BPS, berikut merupakan tingkat migrasi di Kota Surabaya tahun 2011-2015



Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk yang datang lebih besar dari jumlah penduduk yang pindah. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk Kota Surabaya setiap tahun mengalami peningkatan.

Jumlah penduduk di Kota Surabaya Tahun 2016 berdasarkan hasil proyeksi BPS Provinsi Jawa Timur mencapai 2.862.406 jiwa dengan rincian 1.414.025 laki-laki dan 1.448.381 perempuan dan kondisi piramida di bawah ini

Grafik 1



Piramida Penduduk Kota Surabaya Tahun 2016

Dari piramida penduduk seperti gambar di bawah ini menunjukkan bahwa struktur penduduk Kota Surabaya didominasi usia yang potensial yaitu mulai dari usia 25 – 59 tahun sebesar 1.571.942 jiwa atau 53,4 % dibanding usia sekolah mulai jenjang PAUD sampai dengan perguruan tinggi yaitu usia 5 – 24 tahun sebesar 1.075.396 jiwa atau 36,5 %, sedangkan penduduk usia lanjut yaitu usia 60 tahun ke atas sebesar 296.190 atau 10,1%.

Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan meningkatnya angka harapan hidup (AHH) dan penurunan balita gizi buruk. AHH penduduk Kota Surabaya yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan program dan kegiatan pada sektor lingkungan, kesehatan, sosial dan penanggulangan kemiskinan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian perlu ditingkatkan dan

dikembangkan program-program inovasi untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik/lebih tinggi.

Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2011 -2015

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Harapan Hidup (persen)	71,27	71,53	72,12	73,85	73,85

Sumber: BPS Kota Surabaya, Juni 2016

Upaya pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan dasar yang tepat dan cepat diharapkan masalah kesehatan di masyarakat dapat diatasi.

1. Jaminan Kesehatan

Tujuan pelaksanaan program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin adalah meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Pada tahun 2016 cakupan jaminan kesehatan penduduk kota Surabaya ada 2.292.800 dengan rincian peserta Jaminan Kesehatan Nasional 2.286.838 orang sedangkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ada 5.962 orang.

2. Pemanfaatan Sarana Kesehatan

Jumlah kunjungan pasien baru rawat jalan puskesmas di 63 Puskesmas se-kota Surabaya tahun 2016 sebanyak 482.976 kunjungan dengan rincian kunjungan pasien laki-laki sebanyak 200.789 dan pasien perempuan sebanyak 282.187 orang, sedangkan kunjungan pasien baru rawat inap sebanyak 8.050 kunjungan. Jumlah kunjungan penderita gangguan jiwa di puskesmas sebanyak 17.156 kunjungan dengan rincian sebagai berikut ; pasien penderita gangguan jiwa dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 9.250 kunjungan dan pasien penderita gangguan jiwa dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 7.906 kunjungan.

3. Sarana Pelayanan Kefarmasian

Ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan dasar dalam hal ini adalah puskesmas, disesuaikan dengan kebutuhan obat di sarana pelayanan kesehatan dasar tersebut. Presentase ketersediaan obat di puskesmas dihitung berdasarkan kebutuhan obat di puskesmas dalam satu tahun. Ketersediaan obat menurut jenis obat di kota Surabaya tahun 2016.

4. Indikator Pelayanan Rumah Sakit

Beberapa indikator pelayanan Rumah Sakit, baik rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit swasta dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rumah sakit. Indikator-indikator pelayanan rumah sakit, terdiri dari Bed Occupancy Rate (BOR), Length Of Stay (LOS), Turn Over Internal (TOI), Gross Death Rate (GDR) dan Netto Death Rate (NDR). Data rumah sakit yang masuk, diketahui bahwa rata-rata BOR rumah sakit di kota Surabaya tahun 2016 sebesar 56,58%, ALOS 4,46 hari dan TOI 3,74 hari. BOR tertinggi untuk Rumah Sakit Umum di Kota Surabaya adalah RSUD Dr. Moh Soewandhie (83,49%). Sedangkan BOR Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada (51,94%). Jumlah tempat tidur (TT) pasien yang tertinggi ada di Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo (1.513 TT), dan RSAL Dr. Ramelan (658 TT). Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah Kota Surabaya yaitu RS Dr. Moh. Soewandhie dan Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada memiliki kapasitas tempat tidur pasien 308 tempat tidur dan 231 tempat tidur.

Dari data tersebut di atas diperoleh informasi bahwa RSUD dr. Mohamad Soewandhie merupakan RSUD milik Pemkot Surabaya yang memiliki BOR (Bed Occupancy Rate) tertinggi, yaitu 83,49%. RSUD dr. Mohamad Soewandhie

berawal dari pelayanan kesehatan di Kecamatan Tambaksari yang dikenal dengan nama *Poli Penyakit Kelamin* Tambakrejo kemudian Tahun 1966 diubah menjadi Puskesmas Kecamatan Tambaksari. Tahun 1997 melalui Surat Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 61 Tahun 1997, Puskesmas Tambakrejo menjadi puskesmas rujukan, dimana pengelolaan keuangan ditetapkan melalui SK Walikotamadya Nomor : 04 Tahun 1998 Tentang Cara Pengelolaan Keuangan sebagai Unit Swadana Daerah Puskesmas Rujukan Tambakrejo. Pada tanggal 14 November 1997 melalui Surat Permohonan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 645.3/3590/4025.02/1997 diajukan Izin Pendirian Puskesmas Tambakrejo menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Tambakrejo.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor : 188.4/4094/115.4/1998 tanggal 12 Mei 1998 tentang Izin Pendirian berdiri Rumah Sakit Umum Daerah Tambakrejo Kotamadya Surabaya yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 94 Tahun 1998 tanggal 23 November 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tambakrejo Kotamadya Surabaya. RSUD Tambakrejo merupakan rumah sakit Type C sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/3022/SJ tanggal 13 Desember 1999 Rumah Sakit Tambakrejo menjadi Rumah Sakit type C. Pada Tahun 2002 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 status RSUD Tambakrejo menjadi Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah dr. Mohamad Soewandhie dan berkedudukan sebagai lembaga teknis Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005.

Pada Tahun 2009 berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI Nomor : 371/MENKES/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya menjadi Rumah Sakit Umum kelas B dan memperoleh status Badan Layanan Umum pada tanggal 23 Juli 2009 melalui SK Walikota No. 188.45/251/436.1.2/2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya, dimana pada Tahun 2015 RSUD Dr. Soewandhie mendapatkan Sertifikasi sebagai Rumah Sakit Pendidikan (*Teaching Hospital*) yaitu Rumah Sakit yang berhubungan erat dengan Pendidikan Kedokteran dan berfungsi dalam pendidikan praktik untuk mahasiswa kedokteran, *Internship* dan residen atau peserta pendidikan spesialis.

Setiap orang yang mendapat pelayan kesehatan di RSUD dr. Mohamad Soewandhie wajib membayar retribusi pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie. Retribusi pelayanan kesehatan ini dikenakan terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Mohamad Soewandhie yang diukur berdasarkan jumlah, jenis, frekuensi pelayanan dan kelas (tempat) perawatan (Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas VIP dan Kelas VVIP). Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan, sedangkan besaran tarif retribusi pelayanan rawat jalan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan medic yang besarnya tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie.

RSUD dr. Mohamad Soewandhie merupakan RSUD milik Pemkot Surabaya yang memiliki BOR (Bed Occupancy Rate)

tertinggi juga diikuti dengan kunjungan pasien yang cukup tinggi. Hal ini tergambar pada tabel kunjungan pasien dalam Tahun 2017 sebagai berikut :

No	Data Kunjungan Pasien	Tahun 2017
1	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan	254,872
2	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap	23,574
3	Jumlah Kunjungan Pasien Instalasi Gawat Darurat	60,196
	Jumlah Total Kunjungan	338,642

Tabel 1. Jumlah Kunjungan RSUD dr. Mohamad Soewandhie Tahun 2017

4.3 Landasan Yuridis

Landasan Yuridis mengenai pengaturan retribusi pelayanan kesehatan kelas III di RSUD dr. Mohamad Soewandhie tidak dapat dilepaskan dari aspek yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah sebagai instrumen yuridis yang berlaku umum dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan asas desentralisasi oleh Pemerintah daerah adalah otonomi daerah yang berlangsung dan diselenggarakan oleh daerah otonom. Baik dalam konsep otonomi daerah maupun daerah otonom terkandung wewenang (fungsi) mengatur (*regelend*) dan mengurus (*bestuur*). Perbuatan 'mengatur' berarti menciptakan norma hukum yang *berlaku umum* dan umumnya bersifat *abstrak* sebaliknya *mengurus* memiliki arti perbuatan menciptakan norma hukum yang *berlaku individual* dan bersifat *konkret*. Menurut **Benyamin Hoesen**, secara materiil, mengurus dapat berupa memberikan pelayanan kepada orang atau badan tertentu dan/atau melakukan pembangunan proyek-proyek tertentu (secara konkret dan kasuistik).

Secara konseptual, maka pembentukan Perda termasuk dalam kategori wewenang mengatur, yang berarti menciptakan norma hukum berlaku umum dan abstrak. Apa yang dapat kita lihat dari pengaturan Perda dalam sistem perundang-undangan di Indonesia sebagai peraturan yang mengikat umum, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah menunjukkan signifikansi dan eksistensi penting dari jenis peraturan ini. Terhadap hal ini **Irawan Soejito** (1983) menyatakan bahwa salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu Daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah. Sedangkan **Amiroeddin Syarif** (1987) menyatakan bahwa Peraturan daerah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yaitu mengatur segala sesuatunya tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat. Senada dengan kedua pendapat tersebut, **Bagir Manan** (1992) berpendapat bahwa Peraturan daerah adalah nama peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Peraturan daerah merupakan salah satu ciri yang menunjukkan bahwa pemerintah tingkat daerah tersebut adalah satuan pemerintahan otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan demikian Perda merupakan instrumen regulatif yang paling penting dalam menjejawantahkan kewenangan otonom daerah dalam mengurus dirinya sendiri.

Dalam kerangka pelaksanaan pemerintahan yang demokratis maka diperlukan pembentukan perundang-undangan yang menata penggunaan wewenang negara

ataupun pemerintah daerah. Ketentuan perundang-undangan ini setidaknya akan menjadi dasar hukum penggunaan wewenang (asas keabsahan); landasan prosedur (mencegah tindakan sewenang-wenang) dan konformitas (alat ukur untuk menilai benar-salahnya) tindakan pemerintah. Wewenang merupakan sebuah istilah hukum yang sepadan dengan "authority", "legal power", "bevoegheid". Dalam konsep hukum, "wewenang" mempunyai karakteristik sebagai "tindakan hukum publik". **F.A. Stroink** sebagaimana dikutip oleh Philipus **M. Hadjon** (1998) menyatakan : "Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi". Sedangkan menurut **Henc van Maarseveen** (1987): "Dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.

Sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kewenangan daerah khususnya kewenangan di bidang perizinan pada dasarnya merupakan kewenangan secara atribusi ataupun kewenangan delegasi yang semuanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini maka kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatur pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dalam bidang perizinan tenaga kesehatan memiliki keterkaitan dengan perundang-undangan lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431).
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063).
 9. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256)
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).

18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 62);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
21. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 15);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1287);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 874);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 9);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 531);
27. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10)

BAB V

**RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KELAS
III RSUD dr. MOHAMAD SOEWANDHIE**

5.1. Ruang Lingkup Materi Muatan

A. Ruang Lingkup :

Ruang lingkup Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III RSUD Dr. Soewandhie.

B. Ketentuan Umum :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohamad Soewandhie yang selanjutnya dingkat RSUD Dr. Mohamad Soewandhie adalah
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

8. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
9. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik.
10. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Kesehatan.
11. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap Kompetensi Tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji Kompetensi.
12. Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
13. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik.
14. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
15. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang telah

- lulus uji kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
16. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang sudah memenuhi persyaratan untuk praktik mandiri.
 17. Pekerjaan Tenaga Kesehatan adalah kegiatan yang dilakukan Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi.
 18. Praktik mandiri adalah pekerjaan profesional yang didasari oleh landasan ilmu atau teori yang kokoh dan dengan pendekatan ilmiah dalam penyelesaian masalah kesehatan dan dilakukan oleh seorang yang mempunyai keahlian dan kewenangan tertentu dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, dilakukan secara mandiri dan menggunakan kode etik dan ketentuan perundangan sebagai landasan melaksanakan praktik.
 19. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
 20. Standar Pelayanan Profesi adalah pedoman yang harus diikuti oleh Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.
 21. Organisasi Profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu disiplin ilmu npengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.
 22. Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik

secara langsung maupun tidak langsung kepada Tenaga Kesehatan.

C. Muatan Materi :

Secara garis besar, Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie setidaknya harus memuat:

BAB I : Ketentuan Umum

Ketentuan berisi tentang istilah-istilah yang sering digunakan dalam Peraturan Daerah dan berguna untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap istilah tersebut.

BAB II : Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi

Retribusi ini adalah retribusi pelayanan kesehatan, dimana obyek retribusi meliputi semua jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Kelas III RSUD dr. Mohamad Soewandhie. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Kelas III RSUD. Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa layanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB III : Prinsip, Sasaran, Dan Struktur Penetapan Besaran Tarif Retribusi

Prinsip penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Sasaran penetapan besaran tarif untuk menutup sebagian dan/atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap

memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis pada kelas privat. Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan terdiri atas:

- a. jasa sarana; dan
- b. jasa pelayanan.

Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan per jenis layanan pada kelas III meliputi biaya bahan alat habis pakai dasar, biaya operasional dan biaya pemeliharaan tidak termasuk biaya investasi dan biaya pegawai negeri sipil. Besarnya jasa pelayanan paling banyak 50% (lima puluh persen) untuk pengalokasian di Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD atau di Rencana Bisnis Anggaran setiap tahunnya.

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan kelas III RSUD dr. Mohamad Soewandhie ditetapkan berdasarkan jenis, dan klasifikasi pelayanan yang diberikan yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan kelas III ditetapkan dan dicantumkan dalam lampiran serta merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini, sedangkan struktur dan besaran pelayanan kesehatan kelas II, Kelas I dan Kelas Utama bagi pasien Privat ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV : JENIS-JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Jenis pelayanan di RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang dikenakan retribusi pelayanan kesehatan, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan yang meliputi :
 1. pelayanan gawat darurat;
 2. pelayanan rawat jalan;
 3. pelayanan rawat inap, yang terdiri atas :

- a) pelayanan rawat inap umum;
 - b) pelayanan rawat inap intensif (ICU, ICCU, NICU, MICU, PICU, STROKE UNIT);
 - c) pelayanan rawat intermediate (*High Care Unit*); dan
 - d) pelayanan rawat inap isolasi; pelayanan rawat inap bersalin
4. pelayanan medik, yang terdiri atas:
 - a) pelayanan medik sesuai bidang spesialisasinya
 - b) pelayanan medik gigi dan mulut
 - c) pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
 5. pelayanan keperawatan;
 6. pelayanan sehari (*one day care*);
 7. pelayanan penunjang medik, yang meliputi:
 - a) pelayanan radiologi dan diagnostik elektromedik; dan
 - b) pelayanan laboratorium patologi klinik, mikrobiologi klinik dan patologi anatomi
 8. pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
 9. pelayanan pemulasaraan jenazah;
 10. pelayanan farmasi rumah sakit;
 11. pelayanan gizi rumah sakit;
 12. pelayanan transfusi darah dan gas medik;
 13. pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
 14. pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah;
 15. pelayanan *medical/general check up* (pemeriksaan medis/pengujian kesehatan); dan
 16. pelayanan sterilisasi dan *laundry* (binatu);
- b. pelayanan pendidikan dan pelatihan kesehatan;
 - c. pelayanan penelitian kesehatan;
 - d. pelayanan kesehatan lainnya.

Bahwa atas pelayanan kesehatan kelas III pada Rumah Sakit Umum Dokter Mohamad Soewandhie dikenakan retribusi sebagai berikut:

BESARAN TARIF PELAYANAN RAWAT INAP		
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Akomodasi Kamar Kelas 3	100,000
2	Visite Dokter Spesialis	55,000
3	Visite Dokter Umum	35,000
4	Visite Ahli Gizi	15,000
5	Visite Apoteker	20,000
6	Konsultasi Dr. Spesialis Di Luar Jam Kerja Datang	60,000
7	Konsultasi Dr. Spesialis Via Telpon	25,000

BESARAN TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN		
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Konsultasi / pemeriksaan Klinik Eksekutif Rawat Jalan	75,000
2	Konsultasi / pemeriksaan Klinik Rawat Jalan Spesialis	30,000
3	Pemeriksaan Gawat Darurat	45,000
4	Konsultasi Ahli Gizi	20,000
5	Konsultasi Psikologi	25,000
6	Konsultasi/ pemeriksaan Antar Klinik Rawat Jalan	30,000
7	Konsultasi/Rujukan	90,000

TARIF RAWAT INAP		
NO	TINDAKAN	TARIF
1	KHUSUS	800,000
2	BESAR	600,000
3	SEDANG	400,000
4	KECIL	160,000
5	SEDERHANA	80,000

TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF LAINNYA		
NO	TINDAKAN	TARIF
PELAYANAN KATETERISASI JANTUNG		
1	PTCA Tanpa Stent	35,452,000
2	PTCA 1 DES	52,728,000
3	PTCA 2 DES	64,771,000
4	PTCA 3 DES	76,908,000
5	PTCA 4 DES	88,736,000
6	DCA	8,801,000

7	DXRL	10,634,000
8	TPM	7,530,000
9	PPM VVI	40,776,000
10	PPM Dual Chamber	66,296,000
11	IVUS	37,077,000
12	Rotablator	35,202,000
13	IABP	13,517,000
14	Arteriografi	15,964,000
15	Perikardiosintesis	3,856,000
16	FFR	23,986,000
17	Angioplasti Perifer	35,496,000
18	Stenting Perifer (1 stent)	60,796,000
19	Stenting Perifer (2 stent)	78,374,000
PELAYANAN HEMODIALISA		
1	Hemodialisa	764,000
2	Hemodialisa (Single Use)	800,000
3	Hemodialisa (Re Use)	720,000
4	Hemodialisa (Cito)	1,200,000
5	Hemodiafiltrasi off line	2,720,000
6	Hemodiafiltrasi on line	1,360,000
SLED (Suistained Low Efficiency Dialysis)		
7	Tindakan SLED 6 jam (Reguler)	1,120,000
8	Tindakan SLED 6 jam (Cito)	1,360,000
9	Tindakan SLED 8 jam (Reguler)	1,320,000
10	Tindakan SLED 8 jam (Cito)	1,560,000
11	Tindakan SLED 10 jam (Reguler)	1,520,000
12	Tindakan SLED 10 jam (Cito)	1,760,000
13	CRRT (Continuous Renal Replace Therapy)	13,068,000
PELAYANAN NEUROINTERVENSI		
1	Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)	400,000
2	Transcranial Doppler (TCD)	480,000
3	EEG (Elektronsefalografi)	640,000
4	Neuro Feed Back	400,000
5	Pain Intervensi (DR) dengan USG	328,000
6	Polisomnografi	1,600,000
7	Brain Mapping	680,000
PELAYANAN BRONKOSKOPI DAN ENDOSKOPI		
1	FOB	2,421,000
2	Bronkoskopi	1,380,000
3	Bronkoskopi dengan GA (General Anesthetic)	1,794,000

4	Gastroskopi	2,012,000
5	Gastroskopi + Biopsi	2,380,000
6	Kolonoskopi	2,588,000
7	Kolonoskopi + Biopsi	2,956,000
8	LVE (Ligasi Varises Endoskopi)	4,956,000
9	Gastroskopi dengan GA (General Anasthetic)	2,616,000
10	Kolonoskopi dengan GA (General Anasthetic)	3,360,000
PELAYANAN JANTUNG		
1	Ankle Brachial Index (ABI) / Cardio ankle Vascular Index	811,000
2	Dobutamin Stress Echocardiography	2,010,000
3	Echocardiografi / USG jantung	640,000
4	Echocardiography Dengan Bubble Test	955,000
5	Echocardiography Transesofageal/Usg Jantung Transesofageal	574,000
6	Exercise Stress Echocardiography	2,010,000
7	Holter 24 Jam	1,028,000
8	Pemeriksaan Tes Allen	811,000
9	Treadmill Jantung	600,000
PELAYANAN PERSALINAN		
1	Pertolongan Persalinan Normal	1,983,000
2	Persalinan Vakum Ekstraksi	3,115,000
3	Persalinan Forseps Ekstraksi	1,888,000
4	Pertolongan Persalinan Sungsang	2,266,000
PELAYANAN KEFARMASIAN		
1	Preparasi Obat Kemoterapi Reguler	150,000
2	Preparasi obat Kemoterapi Cito	200,000
BESARAN TARIF PELAYANAN RAWAT INAP		
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Akomodasi Kamar Kelas 3	100,000
2	Visite Dokter Spesialis	55,000
3	Visite Dokter Umum	35,000
4	Visite Ahli Gizi	15,000
5	Visite Apoteker	30,000
6	Konsultasi Dr. Spesialis Di Luar Jam Kerja Datang	60,000
7	Konsultasi Dr. Spesialis Via Telpon	25,000

BESARAN TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Konsultasi / pemeriksaan Klinik Eksekutif Rawat Jalan	75,000
2	Konsultasi / pemeriksaan Klinik Rawat Jalan Spesialis	30,000
3	Pemeriksaan Gawat Darurat	45,000
4	Konsultasi Ahli Gizi	20,000
5	Konsultasi Psikologi	25,000
6	Konsultasi/ pemeriksaan Antar Klinik Rawat Jalan	30,000
7	Konsultasi/Rujukan	90,000

TINDAKAN RADIOLOGI

NO	TINDAKAN	TARIF
1	MANUS 1 POSISI	181,000
2	MANUS 2 POSISI	194,000
3	WRIST 1 POSISI	157,000
4	WRIST 2 POSISI	194,000
5	ANTEBRACHII 1 POSISI	181,000
6	ANTEBRACHII 2 POSISI	194,000
7	ELBOW 1 POSISI	157,000
8	ELBOW 2 POSISI	194,000
9	HUMERUS 1 POSISI	181,000
10	HUMERUS 2 POSISI	194,000
11	SHOULDER 1 POSISI	185,000
12	SHOULDER 2 POSISI	228,000
13	CLAVICULA 1 POSISI	185,000
14	SCAPULA 1 POSISI	185,000
15	SCAPULA 2 POSISI	228,000
16	PEDIS 1 POSISI	181,000
17	PEDIS 2 POSISI	194,000
18	CALCANEUS 1 POSISI	157,000
19	CALCANEUS 2 POSISI	194,000
20	ANKLE 1 POSISI	157,000
21	ANKLE 2 POSISI	194,000
22	ANKLE MORTIS VIEW 1 POSISI	157,000
23	CRURIS 1 POSISI	194,000
24	CRURIS 2 POSISI	208,000
25	GENU 1 POSISI	157,000
26	GENU 2 POSISI	194,000
27	GENU SKY LINE 1 POSISI	194,000
28	GENU VAGUS FALRUS 2 POSISI	208,000

29	FEMUR 1 POSISI	194,000
30	FEMUR 2 POSISI	208,000
31	HIP JOINT 1 POSISI	181,000
32	HIP JOINT 2 POSISI	194,000
33	THORAX 1 POSISI	218,000
34	THORAX 2 POSISI	240,000
35	THORAX TOP LODORTIC 1 POSISI	218,000
36	STERNUM 1 POSISI	218,000
37	THORAX BAYI 1 POSISI	166,000
38	THORAX BAYI 2 POSISI	204,000
39	BABYGRAM 1 POSISI	190,000
40	THORAX CITO BED 1 POSISI	252,000
41	BOF 1 POSISI	237,000
42	BOF 2 POSISI	260,000
43	BOF 3 POSISI	374,000
44	BOF PENIS 1 POSISI	292,000
45	BOF BAYI 1 POSISI	204,000
46	BOF BAYI 2 POSISI	217,000
47	ATRESIA ANI 1 POSISI	256,000
48	ATRESIA ANI 2 POSISI	337,000
49	PELVIS 1 POSISI	237,000
50	PELVIS 2 POSISI	389,000
51	PELVIS BAYI 1 POSISI	204,000
52	PELVIS BAYI 2 POSISI	217,000
53	SACRUM 1 POSISI	213,000
54	SACRUM 2 POSISI	257,000
55	COCCYGEUS 1 POSISI	213,000
56	COCCYGEUS 2 POSISI	257,000
57	CERVICAL 1 POSISI	194,000
58	CERVICAL 2 POSISI	237,000
59	CERVICAL 4 POSISI	337,000
60	CERVICAL OPEN MOUTH 1 POSISI	194,000
61	CERVICAL SOFT TISSUE 1 POSISI	218,000
62	THORACAL 1 POSISI	237,000
63	THORACAL 2 POSISI	256,000
64	THORACAL 4 POSISI	356,000
65	LUMBO SACRAL 1 POSISI	237,000
66	LUMBO SACRAL 2 POSISI	256,000
67	LUMBO SACRAL 4 POSISI	356,000
68	THORACO LUMBAL 1 POSISI	237,000
69	THORACO LUMBAL 2 POSISI	256,000
70	THORACO LUMBAL 4 POSISI	356,000

71	PROGRAM SCOLIOSIS (FOTO BENDING KANAN KIRI) 3 POSISI	256,000
72	PROGRAM SCOLIOSIS (FOTO BENDING AP LATERAL - KANAN KIRI) 4 POSISI	337,000
73	FOTO DYNAMIC (FLEXI EXTENSI) 2 POSISI	256,000
74	SKULL 1 POSISI	204,000
75	SKULL 2 POSISI	218,000
76	WATERS 1 POSISI	237,000
77	TMJ (OPEN CLOSE MOUTH) 2 POSISI	218,000
78	TMJ (OPEN CLOSE MOUTH) 4 POSISI	307,000
79	NASAL BONES 1 POSISI	167,000
80	EISLER / MANDIBULA 1 POSISI	180,000
81	EISLER / MANDIBULA 2 POSISI	218,000
82	SCHULLER (MASTOID) 1 POSISI	204,000
83	RHEESE / FORAMEN OPTICUM 1 POSISI	204,000
84	ORBITA 1 POSISI	204,000
85	BASIS CRANII (Os ZYGOMA) 1 POSISI	204,000
86	STENVERS 1 POSISI	204,000
87	TOWNE 1 POSISI	204,000
88	CADWELL 1 POSISI	204,000
89	SELLA TURSIKA 1 POSISI	204,000
90	DENTAL	58,000
91	PANORAMIC	175,000
92	MAMMOGRAPHY TANPA KONTRAS	564,000
93	MAMMOGRAPHY DENGAN KONTRAS	1,826,000
94	APG (ANTHEGRADE PYELOGRAPHY)	713,000
95	APPENDICOGRAFI	559,000
96	BARIUM FOLLOW TROUGHT	845,000
97	BIPOLAR VOLDING URETROCYSTOGRAPHY	729,000
98	CHOLANGIOGRAPHY	845,000
99	COLON IN LOOP ANAK	869,000
100	COLON IN LOOP BARIUM DEWASA	869,000
101	CYSTOGRAFI	845,000
102	FISTULOGRAFI	729,000
103	IVP	1,044,000
104	OESOFAGOGRAM	729,000
105	LOPOGRAFI	788,000
106	RPG (RETROGRADE PYELOGRAPHY)	845,000
107	TAMBAHAN PENGGUNAAN FILM 20 x 25	63,000
108	TAMBAHAN PENGGUNAAN FILM 26 x 36	86,000
109	TAMBAHAN PENGGUNAAN FILM 35 x 43	89,000

110	UGI	845,000
111	UGI - FOLLOW TROUGH	845,000
112	URETHRO CYSTOGRAFI	845,000
113	URETHROGRAFI	729,000
114	MSCT BRAIN TANPA KONTRAS	1,377,000
115	MSCT SINUS PARANASAL TANPA KONTRAS	1,377,000
116	MSCT MASTOID TANPA KONTRAS	1,377,000
117	MSCT ORBITA TANPA KONTRAS	1,377,000
118	MSCT NASOPHARYNX TANPA KONTRAS	1,619,000
119	MSCT THORAX TANPA KONTRAS	1,825,000
120	MSCT GUIDING FNAB TANPA KONTRAS	1,186,000
121	MSCT WHOLE ABDOMEN TANPA KONTRAS	2,205,000
122	MSCT ABDOMEN ATAS / UPPER ABDOMEN TANPA KONTRAS	2,205,000
123	MSCT ABDOMEN BAWAH / LOWER ABDOMEN TANPA KONTRAS	2,205,000
124	MSCT COLONOGRAPHY TANPA KONTRAS	2,209,000
125	MSCT STONOGRAPHY TANPA KONTRAS	2,213,000
126	MSCT BRAIN DENGAN KONTRAS	1,726,000
127	MSCT PERFUSION DENGAN KONTRAS	2,947,000
128	MSCT SINUS PARANASAL DENGAN KONTRAS	3,427,000
129	MSCT MASTOID DENGAN KONTRAS	3,427,000
130	MSCT ORBITA DENGAN KONTRAS	3,427,000
131	MSCT NASOPHARYNX DENGAN KONTRAS	3,482,000
132	MSCT VERTEBRAE CERVICAL DENGAN KONTRAS	3,524,000
133	MSCT VERTEBRAE THORACAL DENGAN KONTRAS	3,524,000
134	MSCT VERTEBRAE LUMBAL DENGAN KONTRAS	3,524,000
135	MSCT VERTEBRAE THORACO LUMBAL DENGAN KONTRAS	3,766,000
136	MSCT THORAX DENGAN KONTRAS	3,971,000
137	MSCT BRONCHOSCOPY DENGAN KONTRAS	3,971,000
138	MSCT WHOLE ABDOMEN DENGAN KONTRAS	4,769,000
139	MSCT ABDOMEN ATAS / UPPER ABDOMEN DENGAN KONTRAS	4,769,000
140	MSCT ABDOMEN BAWAH / LOWER ABDOMEN DENGAN KONTRAS	4,769,000
141	MSCT EXTREMITAS ATAS /UPPER EXTREMITAS DENGAN KONTRAS	3,319,000

142	MSCT EXTREMITAS BAWAH / LOWER EXTREMITAS DENGAN KONTRAS	3,319,000
143	MSCT COLONOGRAPHY DENGAN KONTRAS	3,802,000
144	MSCT IVP DENGAN KONTRAS	3,802,000
145	MSCT ANGIOGRAPHY BRAIN	3,802,000
146	MSCT ANGIOGRAPHY BRAIN CERVICAL	3,900,000
147	MSCT ANGIOGRAPHY VERTEBRAE CERVICAL	3,802,000
148	MSCT ANGIOGRAPHY VERTEBRAE THORACAL	3,802,000
149	MSCT ANGIOGRAPHY VERTEBRAE LUMBAL	3,802,000
150	MSCT ANGIOGRAPHY VERTEBRAE THORACO LUMBAL	3,900,000
151	MSCT ANGIOGRAPHY THORAX	3,900,000
152	MSCT ANGIOGRAPHY WHOLE ABDOMEN	3,802,000
153	MSCT ANGIOGRAPHY UPPER EXTREMITAS	3,802,000
154	MSCT ANGIOGRAPHY LOWER EXTREMITAS	3,802,000
155	MSCT CALCIUM SCORE TANPA KONTRAS	2,289,000
156	MSCT CARDIAC	3,627,000
157	MSCT CARDIAC+LUNG	3,705,000
158	MSCT 3D FACIAL BONE	2,679,000
159	MSCT 3D VERTEBRAE CERVICAL	2,679,000
160	MSCT 3D VERTEBRAE THORACAL	2,679,000
161	MSCT 3D VERTEBRAE LUMBAL	2,679,000
162	MSCT 3D VERTEBRAE THORACO LUMBAL	2,776,000
163	MSCT 3D PELVIS	2,581,000
164	MSCT EXTREMITAS ATAS /UPPER EXTREMITAS	2,581,000
165	MSCT EXTREMITAS BAWAH / LOWER EXTREMITAS	2,581,000
166	USG UPPER ABDOMEN / ABDOMEN ATAS	399,000
167	USG LOWER ABDOMEN / ABDOMEN BAWAH	322,000
168	USG UPPER LOWER ABDOMEN / ATAS BAWAH ABDOMEN	481,000
169	USG UROLOGI	330,000
170	USG CAROTIS	885,000
171	USG THORAX MARKER	325,000
172	USG THYROID	503,000
173	USG MUSCULOSCELETAL	963,000
174	USG MAMMAE	613,000

175	USG TESTIS	395,000
176	USG KEPALA BAYI / TRANSCRANIAL	393,000
177	USG COLLI	385,000
178	USG KEHAMILAN	388,000
179	USG KEHAMILAN 4 D	610,000
180	USG EXTREMITAS SUPERIOR DOPPLER KANAN / DEXTRA	1,077,000
181	USG EXTREMITAS SUPERIOR DOPPLER KIRI / SINISTRA	1,077,000
182	USG EXTREMITAS INFERIOR DOPPLER KANAN / DEXTRA	1,077,000
183	USG EXTREMITAS INFERIOR DOPPLER KIRI / SINISTRA	1,086,000
184	USG TUMOR JARINGAN LUNAK	462,000
185	USG INGUINAL	392,000
186	USG FAST	325,000
187	USG RENAL ARTERI + TRANSPLANT	610,000
188	USG GUIDING FNAB	590,000
189	USG TRANSVAGINAL / TRANSRECTAL	588,000
190	USG PROSTAT	392,000
191	USG UPPER ABDOMEN / ABDOMEN ATAS CITO BED	458,000
192	USG LOWER ABDOMEN / ABDOMEN BAWAH CITO BED	455,000
193	USG ABDOMEN ATAS BAWAH CITO BED	534,000
194	USG THORAX MARKER CITO BED	466,000

TINDAKAN LABORATORIUM DAN BANK DARAH

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Darah Lengkap + Diff	83,000
2	Darah Lengkap + Ret	112,000
3	Laju Endap Darah	32,000
4	Hitung Eosinophil	43,000
5	PPT	65,000
6	KPTT	66,000
7	Waktu Perdarahan	29,000
8	Waktu Pembekuan	59,000
9	Golongan Darah ABO	33,000
10	Golongan Darah Rhesus	33,000
11	Morfologi Darah Tepi	117,000
12	Retikulosit	48,000
13	Ferritin	234,000
14	Serum Iron (SI)	97,000

15	TIBC	104,000
16	D-Dimer	258,000
17	Urine Lengkap	56,000
18	Reduksi	31,000
19	Sedimen Urine	31,000
20	Tes Kehamilan	53,000
21	Faeces Lengkap	31,000
22	SGOT	37,000
23	SGPT	37,000
24	Bilirubin Total	37,000
25	Bilirubin Direk	37,000
26	Bilirubin Indirek	37,000
27	Albumin	37,000
28	Globulin	37,000
29	Total Protein Serum	43,000
30	Total Protein Pleura	69,000
31	Ureum/BUN	37,000
32	Kreatinin	37,000
33	Asam Urat	37,000
34	Cholesterol	37,000
35	Trigliserida	37,000
36	HDL Cholesterol	37,000
37	LDL Cholesterol	37,000
38	CKMB	94,000
39	Metahamphetamin	41,000
40	Morphin	41,000
41	THC	41,000
42	MDMA	41,000
43	Gula Darah Acak	37,000
44	Gula Darah Puasa	37,000
45	Gula Darah 2 Jam PP	37,000
46	Gula Darah Acak Stik (POCT)	41,000
47	Gula Darah Puasa stik (POCT)	41,000
48	Gula Darah 2 Jam PP Stik (POCT)	41,000
49	HbA1C	116,000
50	Glucosa Toleransi Test	153,000
51	Natrium	61,000
52	Kalium	61,000
53	Chlorida	61,000
54	Calsium	61,000
55	T3	181,000
56	T4	181,000

57	TSHs	181,000
58	FT4	185,000
59	Gram	77,000
60	Malaria	77,000
61	BTA (SPS)	153,000
62	Pewarnaan ZN	153,000
63	Pewarnaan ZN /MH	153,000
64	Pewarnaan Neisser	153,000
65	PSA	341,000
66	CEA	229,000
67	Widal	58,000
68	HBsAg	62,000
69	Anti HBs	65,000
70	Anti HCV	157,000
71	Anti HAV	161,000
72	IgG/Ig Manti HAV	141,000
73	Anti HIV	143,000
74	Anti HIV VCT	143,000
75	Anti HIV PITC	143,000
76	IgG/M Anti Salmonella Typhi	117,000
77	IgG/IgM Anti Dengue	197,000
78	CD4	209,000
79	Amilase	89,000
80	Lipase	137,000
81	CRP	153,000
82	TPHA	75,000
83	Analisa Gas Darah	232,000
84	Analisa Cairan Pleura	221,000
85	Analisa Cairan Asites	221,000
86	Analisa Cairan Liquor	221,000
87	Pemeriksaan Sekret Vagina	61,000
88	Pemeriksaan Sekret Uretra	61,000
89	Asam Laktat	96,000
90	Keton	96,000
91	Kultur Pus (Aerob)	401,000
92	Kultur Pus (Anaerob)	392,000
93	Kultur Darah (Aerob)	431,000
94	Kultur Darah (Anaerob)	418,000
95	Kultur Sputum	477,000
96	Kultur Urine	384,000
97	Kultur Pleura (Aerob)	431,000
98	Kultur Pleura (Anaerob)	418,000

99	Kultur Ujung CVC	434,000
100	Kultur Ujung ETT	434,000
101	Kultur Swab	401,000
102	Kultur Lochea	418,000
103	Kultur Cairan sendi	431,000
104	Pemeriksaan Rujukan	34,000
105	KOH Jamur	41,000
106	NS1Ag	233,000
107	Hbs Ag (ELFA)	119,000
108	Cross Match	89,000
109	BPPD	239,000
110	Direct Coombs Test	57,000

TINDAKAN PATOLOGI ANATOMI

NO	TINDAKAN	TARIF
1	FNAB	533,000
2	FNAB dengan tuntunan USG	622,000
3	FNAB dengan tuntunan CT Scan	768,000
4	SITOLOGI	346,000
5	BIOPSI	471,000
6	KEROKAN	471,000
7	EKSTERPASI TUMOR JINAK	729,000
8	KOLEKSISTEKTOMI	612,000
9	TIROIDEKTOMI	730,000
10	MASTEKTOMI	1,198,000
11	APPENDIKTOMI	606,000
12	MIOMEKTOMI	624,000
13	KISTEKTOMI	605,000
14	OMENTEKTOMI	576,000
15	TAH - BSO	1,075,000
16	NEFREKTOMI	799,000
17	RESEKSI USUS	1,097,000
18	MENENTUKAN RADIKALITAS	771,000
19	ON CALC (JARINGAN TULANG)	878,000
20	KEROKAN + BIOPSI	586,000
21	KET	567,000
22	BIOPSI BEBERAPA TEMPAT	565,000
23	PAP SMEAR	183,000
24	IMMUNOHISTOKIMIA per Antibody	451,000
25	POTONG BEKU (VC) BIASA	1,000,000
26	POTONG BEKU (VC) dengan Radikalitas	1,300,000

RINCIAN BESARAN TARIF PELAYANAN AMBULANS

NO	JENIS PELAYANAN AMBULANS	TARIF		
		Tarif	Abonemen	Per kilo
1	Rujukan Pasien		100,000	15,000
2	Pengantaran Jenazah		100,000	10,000
3	Kunjungan Rumah (Dokter + Perawat)	385,000	-	-
4	Pendampingan Event/P3K (Dokter+perawat)	1,000,000	-	-
5	Ambulance NETS (Tanpa Ventilator)	2,000,000	-	-
6	Ambulance NETS (dengan Ventilator)	2,500,000	-	-

PEMULASARAN JENAZAH

No.	Produk Pelayanan	TARIF
1	Perawatan Jenazah tanpa perlengkapan jenazah	75,000
2	Memandikan Jenazah Non HIV	275,000
3	Memandikan Jenazah dengan HIV	440,000
4	Penitipan jenazah di lemari Pendingin	250,000
5	Perawatan Jenazah dengan perlengkapan jenazah pasien non HIV	1,000,000
6	Perawatan Jenazah dengan perlengkapan jenazah pasien HIV	1,250,000

RINCIAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS 3
1	Alveolektomi Per Region	965,000
2	Angkat Drain Gigi	281,000
3	Angkat Jahitan Post Operasi	218,000
4	Apex Reseksi	847,000
5	Bibir Sumbing,Labioplasti Bilateral Komplit	2,003,000
6	Bibir Sumbing,Labioplasti Unilateral Tak Komplit	1,502,000
7	Biopsi Insisional dengan trephine bur [usulan]	347,000
8	Curettage Per Region	401,000
9	Ekstirpasi Fibroma < Atau = 1 Rahang	561,000

10	Ekstirpasi Fibroma < Atau = 1/2 Rahang	281,000
11	Ekstraksi gigi dengan open method per gigi [usulan]	481,000
12	Fraktur Proc.Alveolaris Intel Dental Wiring + Idw+Debriment	1,601,000
13	Fraktur Prosesus Alveolaris Inter Dental Wiring + IDW	1,201,000
14	Ganti Has Post Estirpasi Kista/Tumor	485,000
15	Implant Gigi	7,175,000
16	Incisi Abses Extra Oral/Intra Oral	431,000
17	Incisi/ Excisi Biopsi Intra/ Extra Oral	355,000
18	Kontrol Irigasi Post operasi	201,000
19	Occlusai Adjustment /grinding	201,000
20	Odenteknomi Sedang	1,441,000
21	Odenteknomi Berat Erupsi	1,601,000
22	Odenteknomi Berat Non Erupsi	2,401,000
23	Open Boor	258,000
24	Opturator Dengan Gigi (Per 1 Gigi)	2,281,000
25	Opturator Tanpa Gigi	801,000
26	Pencabutan Gigi Tetap Tanpa Penyulit dengan anasthesi biasa[usulan]	281,000
27	Penutupan OAC / OAF flap bukal LA	801,000
28	Perawatan Kompl Eextraksi Medikamentosa/dg Obat-Obatan	425,000
29	Rawat Perdarahan dgn Hetting [usulan]	845,000
30	Replantasi [usulan]	1,006,000
31	Reposisi Dislokasi Mandibula Manual	223,000
32	Reposisi tertutup + IMF	503,000
33	Trauma Jaringan Lunak, Debriment Dengan Jahitan	568,000
34	Trauma Jaringan Lunak, Debriment Tanpa Jahitan	412,000
35	Vestibuloplasty < Atau = 1 Rahang	1,027,000
36	Vestibuloplasty < Atau = 1/1 Rahang	734,000
37	Vestibuloplasty < Atau = 1/4 Rahang	441,000
38	Acrylic Crown Backing Logam/Full Cast Crown Logam	895,000
39	Acrylic Crown Tanpa Rct	721,000
40	Alveolektomi Per Region	965,000
41	Apeksifikasi [perwali]	402,000
42	Apeksifikasi dengan MTA [sk direktur]	1,201,000
43	Aplikasi Dental Pack [usulan]	241,000

44	Artificial Gingival direct	710,000
45	Artificial Gingival indirect	788,000
46	Bleaching eksternal per rahang	3,883,000
47	Bleaching internal per gigi	2,864,000
48	Bracklet/Band lepas per Biji, Ganti Busur / Chain *	736,000
49	Cetak Double Impression	549,000
50	Debonding	1,168,000
51	Diagnosa	140,000
52	Diagnosa invisalign	2,874,000
53	Fiber post	2,362,000
54	Fisssure Sealent Gigi Sulung	586,000
55	Flap Operasi + Bone Graft	1,324,000
56	Flap Operasi + GTR + Bone Graft	2,424,000
57	Flap Operasi, Reposisi	641,000
58	Implant Gigi	7,175,000
59	Frenectomi	802,000
60	Gigi Lepasan Sebagian Akrilik Gigi Berikut	675,000
61	Gigi Lepasan Sebagian Akrilik Gigi Pertama	675,000
62	Gigi Lepasan Sebagian Logam Pertama	675,000
63	Gigi Lepasan Sebagian Logam Pertama Gigi Berikut	675,000
64	Gigi Tiruan Penuh Akrilik Kasus Flabby	675,000
65	Gigi Tiruan Penuh Akrilik Kasus Flat	675,000
66	Gigi Tiruan Penuh Akrilik Per Rahang	675,000
67	Gigi Tiruan Penuh Akrilik Rahang Atas Bawah	675,000
68	Gigi Tiruan Penuh Logam Per Rahang	675,000
69	Gigi Tiruan Penuh Logam Rahang Atas Bawah	675,000
70	Gingivektomy/Gingivoplasty Per Gigi	517,000
71	Immediate Denture	676,000
72	Immediate Over Denture	676,000
73	Insersi Mahkota [usulan]	686,000
74	Interdental Reseksion operculectomy	581,000
75	Kontrol bracket lepas/pasang button	401,000
76	Kontrol Damon bracket lepas	241,000
77	Kontrol Damon ganti kawat	401,000
78	Kontrol ganti kawat+karet	241,000
79	Kontrol piranti ortodonti cekat ganti karet	241,000
80	Kontrol piranti ortodonti lepasan	241,000
81	Occlusai Adjustment	201,000

82	Open Boor / Grinding[usulan]	161,000
83	Operasi Epulis Besar [usulan]	830,000
84	Operasi Epulis Kecil [usulan]	641,000
85	Operasi Mucosel kecil [usulan]	481,000
86	Operasi Mucosel Multiple [usulan]	681,000
87	Orthodontic Lepas Per 1 Rahang	1,070,000
88	Pemasangan breket Damon	1,646,000
89	Pemasangan breket standar	1,620,000
90	Pemasangan buccal tube	397,000
91	Pemasangan facemask/headgear	359,000
92	Pemasangan invisalign	781,000
93	Pemasangan miniscrew	328,000
94	Pemasangan molar band	294,000
95	Pemasangan Piranti cekat ortho	1,087,000
96	Pemasangan Piranti lepasan ortho	623,000
97	Pemasangan Piranti Regainer	576,000
98	Pemasangan Piranti Retainer	576,000
99	Pemasangan retainer	294,000
100	Pembersian Karang Gigi Per Kwadran [usulan]	317,000
101	Pengobatan Pulpa	340,000
102	Peranti ortodonti lepasan	453,000
103	Perawatan Bruxism	633,000
104	Perawatan Dentin Sensitive Per Gigi	434,000
105	Perawatan Saluran Akar Gigi Anterior (Pulpektomi KUNJUNGAN I	1,201,000
106	Perawatan Saluran Akar Gigi Anterior (Pulpektomi) KUNJUNGAN II	801,000
107	Perawatan Saluran Akar Gigi Anterior (Pulpektomi) KUNJUNGAN III	601,000
108	Perawatan Saluran Akar Gigi Anterior,One Visit	2,161,000
109	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior (Pulpektomi) KUNJUNGAN I	879,000
110	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior (Pulpektomi) KUNJUNGAN II	846,000
111	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior (Pulpektomi) KUNJUNGAN III	738,000
112	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior (Pulpektomi) KUNJUNGAN IV	682,000
113	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior (Pulpektomi) KUNJUNGAN V	800,000

114	Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior,One Visit	5,496,000
115	Pin Tanpa RCT	615,000
116	Pulpotomi Vital Gigi Anterior	1,529,000
117	Pulpotomi Vital Gigi Posterior	2,134,000
118	Relining	675,000
119	Repack,Control DHE	120,000
120	Reparasi Gigi Tiruan Lengkap	676,000
121	Reparasi Gigi Tiruan Sebagian	755,000
122	Reparasi Plat Ortho	576,000
123	Restorasi direct veneer [usulan]	605,000
124	Restorasi inderect veneer [usulan]	4,001,000
125	Restorasi mahkota selubung porcelain crown/Mahkota all porselen / veene [usulan]	4,001,000
126	Restorasi mahkota selubung porselain fused to metal /Mahkota FPM[usulan]	1,601,000
127	Retreatment per saluran akar	525,000
128	Root planing dan kuretase [usulan]	538,000
129	Space Maintainer CekaT Bilateral	592,000
130	Space Maintainer CekaT Unilateral	592,000
131	Space Maintainer Lepas	592,000
132	Splint Dengan bracket	845,000
133	Splint Dengan Komposit + Wire,Per Gigi	1,028,000
134	Splint Dengan Komposit, Per Gigi	545,000
135	SpLint Fixed Crown AKRILIK Per Gigi	654,000
136	Splint Fixed Crown Porselen, Per Gigi	722,000
137	Topical Aplikasi Fluor Per Rahang	590,000
138	Tumpatan GIC besar [usulan]	368,000
139	Tumpatan GIC kecil [usulan]	284,000
140	Tumpatan Inlay / Onlay [usulan]	891,000
141	Tumpatan Inlay Adoro	974,000
142	Tumpatan komposit Besar	1,054,000
143	Tumpatan komposit Kecil	572,000
144	Tumpatan Sementara	350,000
145	Valplas Gigi berikutnya	711,000
146	Valplas Gigi pertama	711,000
147	Veener komposit [sk direktur] = venner direct	685,000
148	Biopsi Lokal Anestesi	642,000
149	Cabut tampon zalf CAV.Nasi anterior 1 hidung poli gigi	241,000

150	Cabut tampon ZalfCAV.Nasi anterior 2 hidung poli gigi	241,000
151	Cetak Gigi Alginate 1 Rahang	281,000
152	Cetak Gigi Alginate 2 Rahang	561,000
153	Cetak Gigi Elastomer	807,000
154	Ekstraksi Gigi Permanen Dengan Penyulit	481,000
155	Hemisection / root resection?? [usulan]	401,000
156	Incisi Abses Extra Oral/Intra Oral	431,000
157	Incisi/ Excisi Biopsi Intra/ Extra Oral	355,000
158	Perawatan Trismus Dengan Solux	381,000
159	Reposisi Dislokasi TMJ	164,000
160	Reposisi tertutup fraktur os nasal	423,000
161	Surgical exposure dgn flap bukal/palatal	1,201,000

RINCIAN BESARAN TARIF PELAYANAN REHAB MEDIK

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS 3
1	6 MWT	58,000
2	Alat Bantu Jalan	80,000
3	Ambulasi dan Lat. Keseimbangan	79,000
4	Baby massage < 3 th	102,000
5	Baby massage > 1 - 3 th	77,000
6	Baby massage 0 - 1 th	68,000
7	Casting	82,000
8	Chest Physical Therapy (Postural Drainage, dll)	81,000
9	Cleft Palate	105,000
10	Diatermi MWD	108,000
11	Diatermi SWD	108,000
12	Diatermi USD	101,000
13	Disartri	106,000
14	Disfagia	106,000
15	Disfonia	119,000
16	EMG Biofeedback	170,000
17	EMG invasif jarum	481,000
18	ESWT	294,000
19	Fitting Ortosis	80,000
20	Fitting Protesis Kaki, NOS	82,000
21	Fitting Protesis Lengan Atas dan Bahu	82,000
22	Fitting Protesis Lengan Bawah dan Bahu	82,000
23	Fitting Protesis Lengan, NOS	82,000
24	Fitting Protesis Lutut Atas	82,000
25	Fitting Protesis Lutut Bawah	82,000

26	Gagap	106,000
27	Gangg Bahasa Tidak Spesifik (Mis Disleksia)	106,000
28	Gangguan Bahasa (Afasia)	106,000
29	Hot Packs	112,000
30	Hubber tank	295,000
31	Infra Red Radiasi	79,000
32	Injeksi Botulinum Toxin A 1 - 3 titik	292,000
33	Injeksi Botulinum Toxin A 4 - 6 titik	574,000
34	Injeksi Intraartikular	92,000
35	IRR	79,000
36	Keterlambatan bicara bahasa	107,000
37	Lat Ketahanan Otot (NDT, PNF)	82,000
38	Lat. Ketahanan Kardiopulmunar	99,000
39	Lat. Koord dan Ketr. Motorik	80,000
40	Lat. Mobilisasi (i.e Tilting Table)	83,000
41	Lat. Streching Otot atau Tendon	79,000
42	Latihan ADL (i.e Proper Body Mechanism, Hand Skills, Analisis Lingkungan dan Ergonomik, Terapi Sensorimotor)	81,000
43	Latihan Jalan Menggunakan Protesis, Orthosis dan Kruk	81,000
44	Latihan Lingkup Gerak Sendi	79,000
45	Latihan Penguatan Otot (i.e NK Table, EN tree, Cybex)	89,000
46	Latihan Pernapasan	81,000
47	Manual limfatik drain voder	247,000
48	Manual testing of muscle function	203,000
49	MLDV	99,000
50	Mobilization of Other Joints	99,000
51	Mobilization of Spine	99,000
52	Nebulizer	196,000
53	Parafin Bath	159,000
54	Pasca laringektomi	119,000
55	Pembuatan alat bantu (kursi khusus, hand splint)	79,000
56	Penanganan Persepsi - Kognisi	80,000
57	Play Therapy / Terapi Bermain	81,000
58	Rehabilitasi Vokasional	81,000
59	Splint (AGA/AGB)	204,000
60	Spray & Strecth	116,000
61	Stretching of Fascia	79,000
62	Tapping & Strapping Berat	248,000

63	Tapping & Strapping Ringan	82,000
64	Tapping & Strapping Sedang	163,000
65	Terapi Edukasi (i.e Preschooler, WritingSkill)	81,000
66	Terapi Laser	71,000
67	Terapi Latihan Lain (i.e Kaegel Exercise, Skoliosis, Osteoporosis, Koreksi Postur	80,000
68	Terapi Manipulasi	126,000
69	Terapi Multi Sensori Terintegrasi (Snoezellen, Latihan Relaksasi)	101,000
70	Terapi NMES	111,000
71	Terapi Sensori Integrasi	80,000
72	Traksi Manual	126,000
73	Traksi Mekanik	101,000
74	Trans Electrical Nerve Simulation, Electrical Stimulation	103,000
75	Uji Dekondisi	82,000
76	Uji Fleksibilitas dan LGS	82,000
77	Uji Fungsi Berkemih	108,000
78	Uji Fungsi Defekasi	108,000
79	Uji Fungsi Eksekusi Gerak	82,000
80	Uji Fungsi Kardiorespirasi	108,000
81	Uji Fungsi Kognisi	82,000
82	Uji Fungsi Komunikasi	82,000
83	Uji Fungsi Lokomotor	82,000
84	Uji Fungsi Menelan	108,000
85	Uji Integrasi Sensori Motor	82,000
86	Uji Kekuatan Otot	82,000
87	Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan Diri	82,000
88	Uji Keseimbangan Statis & Dinamis	82,000
89	Uji Kontrol Postur	82,000
90	Uji Motorik Halus	82,000
91	Uji Pola Jalan	82,000
92	Uji Sensibilitas	108,000
93	Vitastim	247,000
94	Whirpool	294,000

TARIF TINDAKAN DI KAMAR OPERASI

NO	BAGIAN	Kategori	TARIF OPERASI
			Kelas 3
1	Bedah Umum, Digestif, Onko	Kecil	2,990,000
		Sedang	4,600,000
		Besar	7,360,000
		Khusus	10,580,000
		Canggih	17,735,000
2	Bedah Orthopedi	Kecil	-
		Sedang	4,600,000
		Besar	7,360,000
		Khusus	10,580,000
		Canggih	15,180,000
3	Mata	Kecil	800,000
		Sedang	2,000,000
		Besar	4,000,000
		Khusus	4,800,000
		Canggih	9,600,000
4	THT	Kecil	-
		Sedang	4,600,000
		Besar	7,360,000
		Khusus	10,580,000
		Canggih	15,180,000
5	Urologi	Kecil	2,990,000
		Sedang	4,600,000
		Besar	7,360,000
		Khusus	10,580,000
		Canggih	15,180,000
6	Obgyn	Kecil	2,990,000
		Sedang	4,600,000
		Besar	7,360,000
		Khusus	10,580,000
		Canggih	15,180,000
7	Bedah Plastik	Kecil	1,380,000
		Sedang	4,140,000
		Besar	7,360,000
		Khusus	11,360,000
		Canggih	16,100,000

8	Kulit Kelamin	Kecil	2,990,000
		Sedang	4,600,000
		Besar	7,360,000
		Khusus	10,580,000
		Canggih	15,180,000
9	BTKV	Kecil	2,990,000
		Sedang	4,600,000
		Besar	7,360,000
		Khusus	10,580,000
		Canggih	15,180,000
10	Bedah Mulut	Kecil	3,462,000
		Sedang	5,200,000
		Besar	8,160,000
		Khusus	11,580,000
		Canggih	16,380,000
11	Bedah Saraf	Kecil	5,200,000
		Sedang	12,000,000
		Besar	14,400,000
		Khusus	16,000,000
		Canggih	20,000,000

BAB V : WILAYAH PEMUNGUTAN

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah kota Surabaya, dimana retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Seluruh hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Umum Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI : TATA CARA PEMUNGUTAN

- Pemungutan tarif pemeriksaan umum rawat jalan dan/atau rawat darurat menggunakan karcis harian atau yang dipersamakan.
- Pemungutan jasa konsultasi menggunakan karcis konsultasi atau yang dipersamakan.
- Pemungutan tindakan medik, akomodasi dan tindakan atau pelayanan keperawatan

menggunakan kwitansi disertai daftar rincian biaya sesuai perawatan/tindakan medik yang diterima.

- Dalam hal hasil verifikasi pembayaran ada selisih lebih atau selisih kurang akan disampaikan dan diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai hak kewajiban masing-masing.
- Dalam hal wajib bayar tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar yang tidak dijamin oleh Badan/Penjamin, maka wajib membuat Surat Pengakuan Hutang (SPH) disertai rincian kesanggupan pelunasannya.

BAB VII : KERINGANAN PENGURANGAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada pasien umum atas dasar pertimbangan obyektif, kemanusiaan dan/atau kebijakan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dilakukan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain: pemberian potongan, dan/atau mengangsur retribusi yang terutang. Ketentuan lebih lanjut pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam peraturan walikota.

BAB VIII : PENAGIHAN

Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan melalui pemberian surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka

waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB IX : PENGHAPUSAN PIUTANG DAN DALUWARSA

RSUD harus mengupayakan penagihan piutang retribusi pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien. Hak melakukan penagihan retribusi pelayanan kesehatan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terutangnya retribusi, kecuali :

- a. Diterbitkan surat teguran, atau
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi secara langsung maupun tidak langsung (melalui surat permohonan).

Dalam hal piutang retribusi wajib bayar tidak mampu melunasi kewajibannya, maka direktur wajib melaporkan kepada walikota untuk pengusulan penghapusan piutang kadaluarsa. Tatacara penghapusan piutang retribusi pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

BAB X : PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Berdasarkan Pasal 115 UU Paraj Daerah dan Retribusi Daerah, besarnya tarif retribusi dapat ditinjau sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak diberlakukan di masyarakat dengan didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan peraturan daerah ini, dan/atau adanya perubahan atau kenaikan harga

komponen jasa sarana, serta tingkat perekonomian masyarakat yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB XI : PENCATATAN DAN PELAPORAN

RSUD dr. Mohamad Soewandhie harus melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit, khususnya pencatatan dan pelaporan terhadap penyakit wabah atau penyakit tertentu lainnya yang dapat menimbulkan wabah, dan pasien penderita ketergantungan narkotika dan/atau psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah melakukan pencatatan Rumah Sakit harus menyelenggarakan penyimpanan terhadap pencatatan dan pelaporan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan rumah sakit dilakukan secara tertib, teratur sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pendapatan fungsional seluruhnya dapat digunakan oleh RSUD untuk menutup biaya operasional dan peningkatan mutu pelayanan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Perencanaan penggunaan pendapatan fungsional untuk belanja operasional RSUD menggunakan mekanisme RKA dan DPA APBD.

BAB XIII : PENGAWASAN

Pengawasan merupakan salah satu bentuk sanksi administrasi yang bersifat mencegah terjadinya pelanggaran, sehingga pengawasan selalu diikuti

dengan pembinaan. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran perda, maka pengawasan dilakukan kepada setiap orang atau badan sebagai subyek retribusi dan RSUD dr. Mohamad Soewandhie. Pengawasan kepada orang dan/atau badan dilakukan oleh RSUD dr. Mohamad Soewandhie, sedangkan pengawasan dan pembinaan kepada RSUD dilakukan oleh Dewan Pengawas dalam hal pengelolaan BULD, oleh instansi pengelola keuangan dalam hal pembinaan teknis atas pengelolaan keuangan dan Sekretaris daerah dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

BAB XIV : SANKSI ADMINISTRASI

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya, atau kurang membayar dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, dimana sanksi administrasi tersebut didahului dengan teguran lisan atau tertulis.

BAB XV : KETENTUAN PENYIDIKAN

Penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah. Wewenang Penyidik meliputi:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang

- kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan /atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI : KETENTUAN PIDANA

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi pelayanan kesehatan, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII : KETENTUAN PENUTUP

Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
- b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
- c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

PENUTUP

SIMPULAN

Sesuai perkembangan pelayanan kesehatan dan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD dr. Mohamad Soewandhie, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan dan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD dr. Mohamad Soewandhie telah diatur dalam Perauran Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Dokter Mohamad Soewandhie, namun dengan adanya penambahan jenis pelayanan kesehatan yang belum diatur sebelumnya dan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi, maka perlu dilakukan perubahan tariff retribusi pelayanan kesehatan. Berdasarkan Pasal 155 ayat (1) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan tariff dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Walikota). Sesuai dengan urgensi RSUD melakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2008 karena adanya beberapa jenis pelayanan kesehatan yang belum tercantum dalam Perda dan bukan hanya penyesuaian tarif, maka Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2008 dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah baru yaitu khusus retribusi pelayanan kesehatan di Kelas III, sedangkan kelas yang lain dilakukan dengan membentuk Peraturan Walikota, hal ini

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

2. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Dokter Mohamad Soewandhie melakukan pencabutan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Dokter Mohamad Soewandhie yang materi muatannya tentang retribusi pelayanan kesehatan untuk semua kelas, maka akan terjadi kekosongan hukum untuk penetapan retribusi pelayanan kesehatan di luar Kelas III, dimana muatan materi retribusi pelayanan kesehatan di luar kelas III diatur dengan Peraturan Walikota Surabaya. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, maka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini harus disertai dengan Draf rancangan Peraturan Walikota tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan selain Kelas III di RSUD dr. Mohamad Soewandhie.

DAFTAR PUSTAKA

- Jurnal Hukum Kesehatan Vol. 4 No. 6 Tahun 2012, Jakarta, Kemenkes RI, 2005.
- Kajian Kebijakan Perencanaan Tenaga Kesehatan, Jakarta, Bappenas RI, 2005.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063).
- Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun

2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 62);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 15);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1287);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 874);

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 9);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif (BeritaNegara RI Tahun 2016 Nomor 531);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10)